

**PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS  
SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL  
MELALUI PROGRAM DESAKU MENANTI**

(Studi di Dinas Sosial Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Adinda Saraswati**

**145030101111066**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## MOTTO

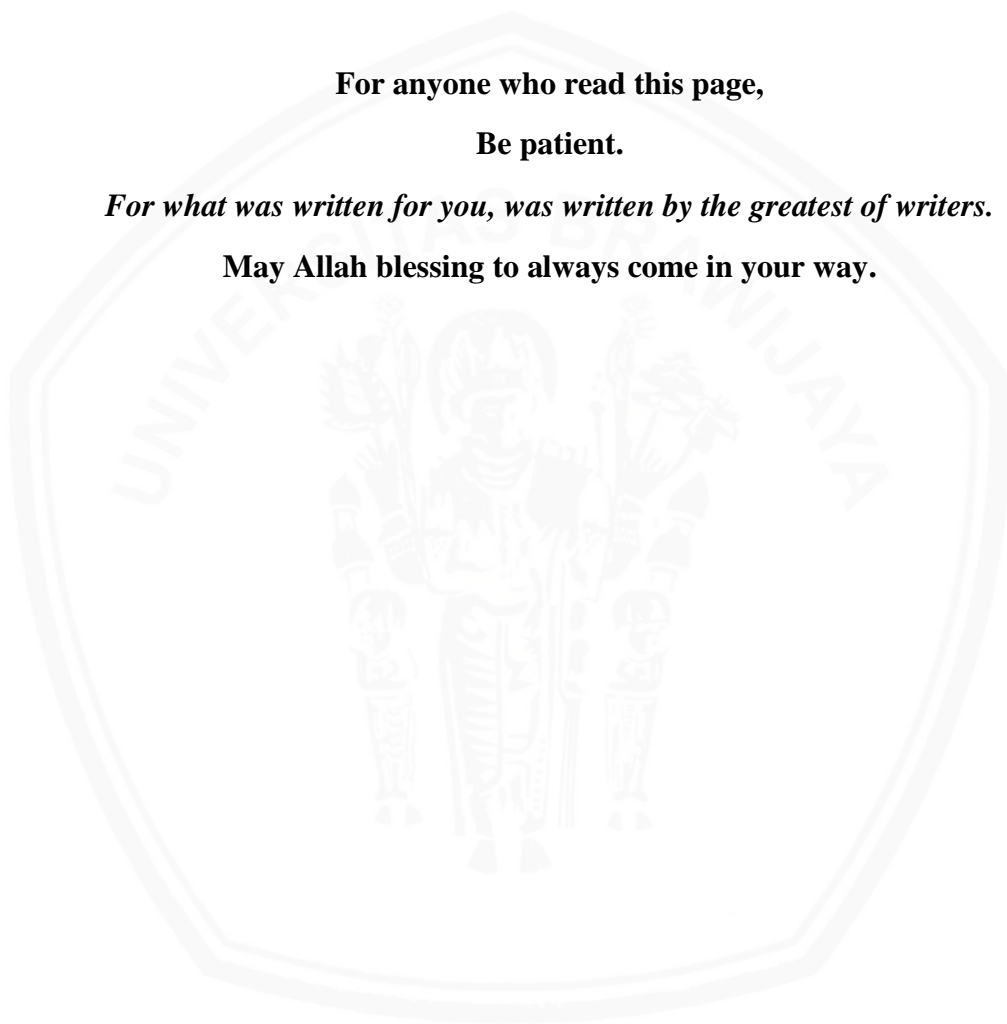
“Verily, wiith every *diffucilty*, there is *relief*” -Qur’an 94:5

**For anyone who read this page,**

**Be patient.**

*For what was written for you, was written by the greatest of writers.*

**May Allah blessing to always come in your way.**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Sebagai  
Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku  
Menanti (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)

Disusun oleh : Adinda Saraswati

NIM : 145030101111066

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 7 Mei 2018

**Komisi Pembimbing,**



**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
**NIP. 19690524 200212 2 002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 7 Mei 2018

Mahasiswa

A yellow rectangular stamp with the text "METERAI TEMPEL" at the top, a Garuda emblem on the right, and "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Nama : Adinda Sarswati

NIM : 145030101111066

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 Mei 2018  
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Adinda Saraswati  
Judul : Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai  
Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku  
Menanti (Studi di Dinas Sosial Kota Malang)

**Dan dinyatakan LULUS**


**MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
**NIP. 19690524 200212 2 002**

Anggota



**Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D**  
**NIP. 19691205 200501 1 003**

Anggota



**Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP**  
**NIP. 2011078607242001**

## RINGKASAN

Adinda Saraswati, 2018. **Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program Desaku Menanti (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.

Program “Desaku Menanti” adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan menyentuh aspek rehabilitatif, aspek preventif, jaminan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan. Program Desaku Menanti memiliki unsur pembaharuan yang dimana akan diberikan kegiatan-kegiatan dalam menunjang keterampilan. Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Desaku Menanti studi pada Dinas Sosial Kota Malang. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang sebagai upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya 1) Penjangkauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis; 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial; 3) Bimbingan Keterampilan; 4) Bantuan Stimulan UEP; 5) Jaminan Hidup; 6) Bantuan Stimulan; 7) Pengembalian Anak-Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah; 7) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas. Selain itu tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku; 2) Tahap transformasi; 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan. Kemudian aktor-aktor yang terlibat dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan diantaranya: 1) Dinas Sosial; 2) LKS Mutiara Insani 3) Instansi Pemerintah Pusat; 4) Perguruan Tinggi; 5) Swasta. Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi, diantaranya: 1) Merubah mindset, mental, dan sikap SDM WBS Desaku Menanti; 2) Upaya Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas; 3) Lokasi Program Desaku Menanti; 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana. Sedangkan faktor pendukung yang mempengaruhi, diantaranya: 1) Dana yang mencukupi dalam proses pemberdayaan; 2) Kerjasama yang baik antar *stakeholder*.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan tujuan pemberdayaan yaitu WBS Desaku Menanti dapat mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) Adanya perencanaan kegiatan pemberdayaan setiap tahun; 2) Adanya indikator keberhasilan setiap tahun; 3) kelompok atau satuan kerja yang terdiri dari beberapa *stakeholder*; 4) Penguatan bimbingan mental, sosial, advokasi sosial, dan pengembangan aksesibilitas; 5) Pembangunan sarana dan prasarana Kampung Topeng sebagai Desa Wisata.

*Kata Kunci: Pemberdayaan, Gelandangan dan Pengemis, Rehabilitasi Sosial*

## SUMMARY

Adinda Saraswati, 2018. **Empowering Vagrants and Beggars as Efforts for Social Rehabilitation through *Desaku Menanti* Program (Study on Social Service of Malang City)** Minor Thesis. Public Administration Major, Faculty of Administration Sciences, Universitas Brawijaya. Supervisor: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.

---

The *Desaku Menanti* program is a social rehabilitation program for homeless and beggars by touching on rehabilitative, preventive, guarantee, social protection and empowerment aspects. The *Desaku Menanti* program has an element of renewal which will be provided with activities in supporting the skills, so that the skills can meet the needs of family life. This study discusses the empowerment of vagrants and beggars as an effort of social rehabilitation through the program *Desaku Menanti* study at the Social Service of Malang City. This research is qualitative descriptive. Data collection is done by interview, observation, and documentation.

Result of research indicate effort of empowerment done by Social Service of Malang City as social rehabilitation effort which done among others 1) Outreach and Return of Vagrants and Beggars; 2) Physical, Mental and Social Guidance; 3) Skills Guidance; 4) Productive Economic Stimulant Support; 5) Life Insurance; 6) Stimulant Help; 7) Return of Homeless Children and Beggars to School; 7) Social Advocacy and Accessibility Development. In addition, the stages of community empowerment, namely: 1) Stages of awareness and formation of behavior; 2) Stage transformation; 3) Stage of Intelligence ability improvement, skill competence. Then the actors involved in empowerment efforts that are done include: 1) Social Services; 2) *LKS Mutiara Insani* 3) Central Government Agency; 4) University; 5) Private Sector. The inhibiting factors that affect, among others: 1) Changing the mindset, mental, and attitudes of Human Resource Social Welfare *Desaku Menanti*; 2) Social Advocacy and Accessibility Development Efforts; 3) Location of Program; 4) Lack of Facilities and Infrastructure. While the supporting factors that influence, including: 1) sufficient funds in the process of empowerment; 2) Good cooperation between stakeholders.

Based on the above explanation can be concluded the purpose of empowerment of the Social Vulnerable *Desaku Menanti* can independently and carry out its social function in community life. Efforts that can be done are: 1) The existence of planning activities of empowerment every year; 2) There are indicators of success each year; 3) group or work unit consisting of several stakeholders; 4) Strengthening the mentality, social, social advocacy, and accessibility development mentorship; 5) Development of facilities and infrastructure of Mask Village as Tourism Village.

**Keywords:** *Empowerment, Vagrants and Beggars, Social Rehabilitation*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Machfudz Sadikin dan Ibu Sutini yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M. AP., P.hD selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti., M.Si selaku ketua komisi pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya



- untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
  7. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam Dinas Sosial Kota Malang yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
  8. Bapak dan Ibu LKS Mutiara Insani, terutama kepada Bapak Nunang yang senantiasa memberikan semangat, bimbingan, waktu, dan motivasi untuk selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Sistah tersayang yaitu Sheila Amanda dan Lathifa Dinar serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, do'a dan kasih sayang nya yang menyertai selama pengerjaan skripsi ini.
  10. Manusia-manusia terbaik di sekitar saya yaitu Ukhti-Ukhti kesayangan (Adiba Jeyhan, Afifatuz Zakiyah, Anggiyaza Adha, Farah Dhiba, Reyna Lazuardi, Quntum Chanif). Terima kasih telah memberikan pundak untuk bersandar, kaki untuk menopang, dan tangan senantiasa menggenggam. Terima kasih atas waktu dan bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
  11. Manusia-manusia terbaik selanjutnya yaitu Babo Fam Ottokee (Astari Arumdhani, Candra Febri, Ciresta Adlina, Fildzah Zata, Fitri Sholihah, Longgomita Sabrina, Madina Nailufar, Oktary Devira, Tika Riana) Terima

kasih selalu ada, terima kasih telah mengukir canda dan tawa, terima kasih atas segala dukungan, motivasi yang diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada keluarga besar HUMANISTIK, Departemen Humas yang senantiasa memberikan semangat, dan kebahagiaan kepada penulis selama masa-masa kuliah dan penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih juga kepada keluarga besar AIESEC, BDiamond yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan mengukir tawa kepada penulis.
14. Terima kasih juga kepada teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 7 Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b>	i
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	iii
<b>RINGKASAN</b>	iv
<b>SUMMARY</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik	14
B. Pemberdayaan Masyarakat	17
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	17
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	19
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat	23
4. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat	24
5. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat	28
C. Rehabilitasi Sosial	31
1. Pengertian Rehabilitasi Sosial	31
2. Tujuan Rehabilitasi Sosial	33

3. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial .....	34
D. Gelandangan dan Pengemis .....	36
1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis .....	36
2. Kriteria Gelandangan dan Pengemis .....	38
3. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan dan Pengemis ....	40
E. Program Desaku Menanti .....	44
1. Pengertian Program Desaku Menanti .....	44
2. Landasan Hukum Program Desaku Menanti .....	45
3. Tujuan Program Desaku Menanti .....	46
4. Sasaran Program Desaku Menanti .....	47
5. Ruang Lingkup Kegiatan Program Desaku Menanti .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	53
B. Fokus Penelitian .....	54
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	56
D. Sumber Data .....	57
E. Metode Pengumpulan Data .....	59
F. Instrumen Penelitian .....	61
G. Analisis Data .....	63

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Situs Penelitian .....	67
1. Gambaran Umum Kota Malang .....	67
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang .....	76
3. Gambaran Umum LKS “Mutiaras Insani” .....	81
B. Penyajian Data Fokus .....	83
1. Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti .....	83
a. Bentuk Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti ....	83

1) Penjangkuan Dan Pemulangan Gelandangan Dan Pengemis .....	86
2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial .....	89
3) Bimbingan Keterampilan .....	93
4) Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif .....	96
5) Jaminan Hidup.....	98
6) Bantuan Stimulan .....	99
7) Pengembalian Anak-Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah .....	102
8) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas .....	104
b. Tahap-Tahap Pemberdayaan .....	108
1) Tahap Penyadaran .....	108
2) Tahap Transformasi.....	111
3) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual, Kecakapan, dan Keterampilan .....	113
c. Para Pelaku Pemberdayaan Warga Binaan Sosial Desaku Menanti.....	118
1) Dinas Sosial.....	118
2) LKS Mutiara Insani.....	119
3) Instansi Pemerintah Pusat.....	120
4) Perguruan Tinggi.....	121
5) Swasta.....	121
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti.....	123
a. Faktor Penghambat.....	123
1) Merubah Mindset, Mental, dan Sikap WBS Desaku Menanti.....	123
2) Upaya Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas ...	124
3) Lokasi Program Desaku Menanti .....	126
4) Kurangnya Sarana dan Prasarana di Desaku Menanti .....	127

b. Faktor Pendukung .....	130
1) Dana Program Mencukupi .....	130
2) Kerjasama yang Baik Antar <i>Stakeholders</i> .....	133
C. Analisis Data Fokus .....	136
1. Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti .....	136
a. Bentuk Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti ....	136
1) Penjangkuan Dan Pemulangan Gelandangan Dan Pengemis .....	141
2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial .....	141
3) Bimbingan Keterampilan .....	142
4) Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif .....	142
5) Jaminan Hidup.....	143
6) Bantuan Stimulan .....	143
7) Pengembalian Anak-Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah .....	144
8) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas .....	144
b. Tahap-Tahap Pemberdayaan .....	153
1) Tahap Penyadaran .....	154
2) Tahap Transformasi.....	157
3) Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual, Kecakapan, dan Keterampilan .....	159
c. Para Pelaku Pemberdayaan Warga Binaan Sosial Desaku Menati.....	164
1) Dinas Sosial.....	164
2) LKS Mutiara Insani .....	165
3) Instansi Pemerintah Pusat.....	165
4) Perguruan Tinggi.....	166
5) Swasta.....	166

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti.....	167
a. Faktor Penghambat.....	167
1) Merubah Mindset, Mental, dan Sikap WBS Desaku Menanti.....	167
2) Upaya Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas ...	168
3) Lokasi Program Desaku Menanti .....	169
4) Kurangnya Sarana dan Prasarana di Desaku Menanti .....	169
b. Faktor Pendukung .....	170
1) Dana Program Mencukupi .....	170
2) Kerjasama yang Baik Antar <i>Stakeholders</i> .....	171

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	172
B. Saran.....	176

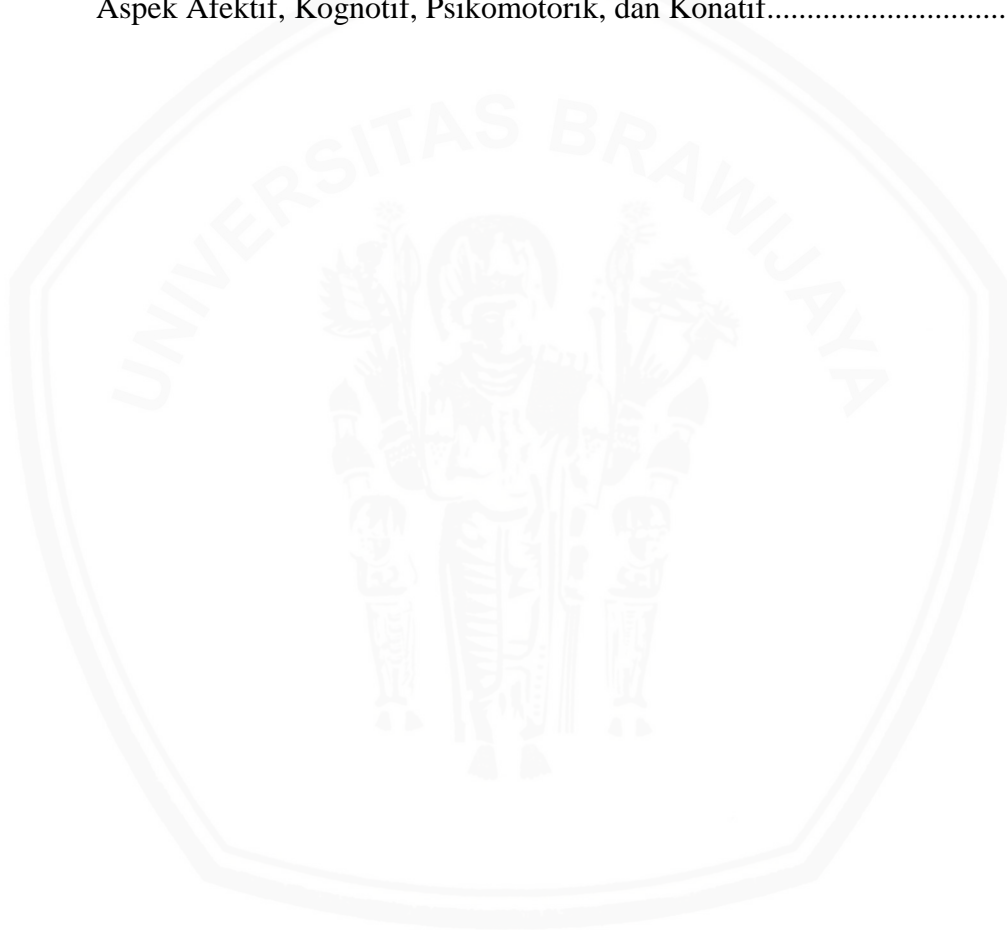
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>178</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>181</b>
----------------------	------------



**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Tahun 2016-2017.....	2
2	Strategi Pemberdayaan dengan mempertimbangkan tiga bentuk intervensi ...	20
3	Tahapan Pemberdayaan Knowledge, Attitudes, Practice dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik, dan Konatif.....	26

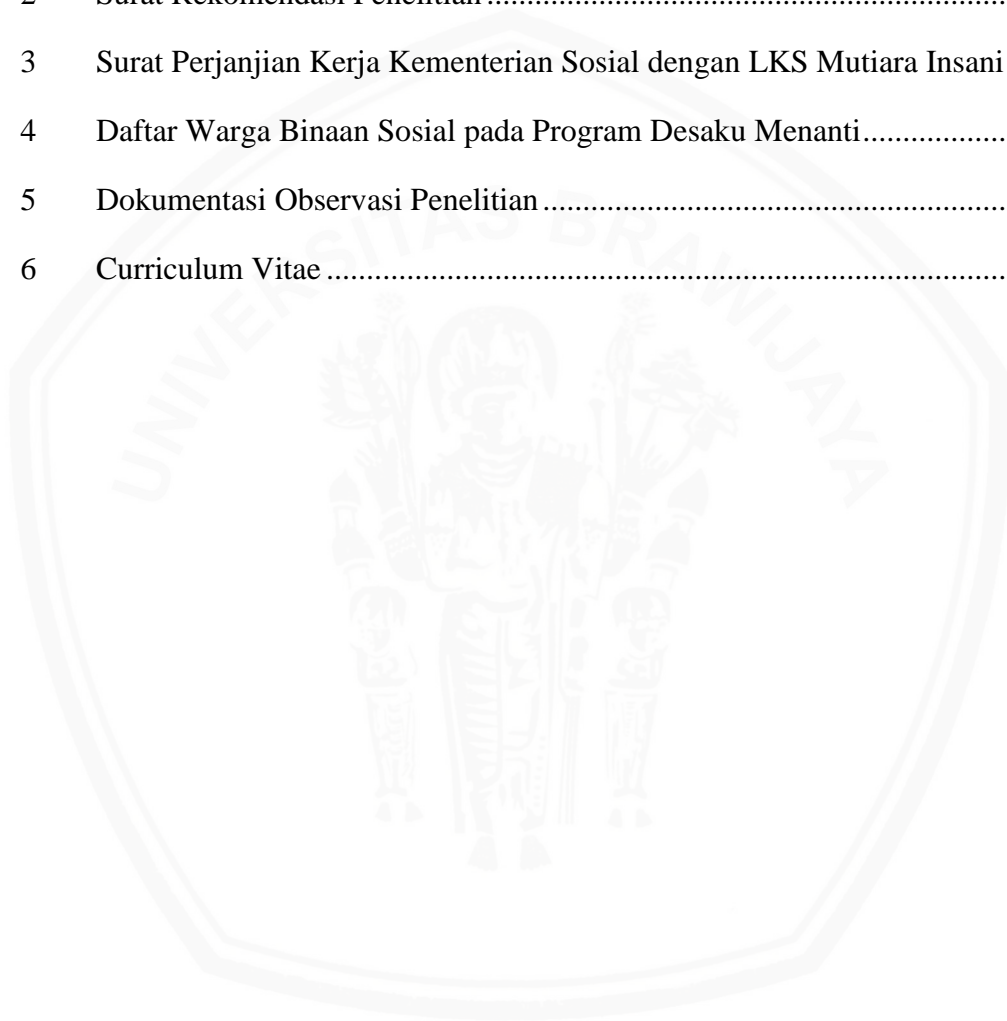


## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Model Lingkaran Setan Kemiskinan.....	29
2	Analisis Data Model Interaktif .....	64
3	Peta Wilayah Kota Malang .....	69
4	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang 2010, 2014, dan 2015.....	71
5	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK, dan TPT, 2010-2014.....	72
6	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang .....	81
7	Struktur Organisasi LKS Mutiara Insani .....	83

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara.....	181
2	Surat Rekomendasi Penelitian .....	187
3	Surat Perjanjian Kerja Kementerian Sosial dengan LKS Mutiara Insani.....	188
4	Daftar Warga Binaan Sosial pada Program Desaku Menanti.....	190
5	Dokumentasi Observasi Penelitian .....	194
6	Curriculum Vitae .....	199



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama suatu negara. Negara tidak bisa dikatakan sebagai negara yang berhasil apabila tingkat kesejahteraan sosial warga negara nya masih dikatakan rendah. Banyak faktor yang menyebabkan kesejahteraan sosial pada suatu negara belum bisa dikatakan tercapai atau dikatakan sebagai negara sejahtera. Faktor-faktor tersebut diantaranya, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, banyak nya pengangguran, dan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan sosial menjadi perhatian utama yang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah. Peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui pembangunan. Pembangunan dilakukan secara seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik. Pada masa ini, pembangunan kesejahteraan sosial tidak saja dilaksanakan oleh pemerintah namun juga dilaksanakan oleh *stakeholder* lain, yaitu swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun masyarakat itu sendiri. Indonesia juga sedang mengupayakan terciptanya kesejahteraan sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam memberantas penyebab-penyebab terjadinya kemiskinan.

Sulistiyani (2004:17) mendefinisikan kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan,

fasilitas lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih dikatakan tinggi. Hal tersebut didukung oleh data pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Jika ditinjau menurut daerah tempat tinggal, secara nasional GK di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Jumlah		
	2016		2017	2016		2017	2016		2017
	Semt 1	Semt 2	Semt 1	Semt 1	Semt 2	Semt 1	Semt 1	Semt 2	Semt 1
	(Maret)	(Desember)	(Maret)	(Maret)	(Desember)	(Maret)	(Maret)	(Desember)	(Maret)
JAWA BARAT	2497.59	2543.3	2588.62	1726.73	1624.81	1579.82	4224.33	4168.11	4168.44
JAWA TENGAH	1824.08	1879.55	1889.09	2682.81	2614.2	2561.63	4506.89	4493.75	4450.72
DI YOGYAKARTA	297.71	301.25	309.03	197.23	187.58	179.51	494.94	488.83	488.53
JAWA TIMUR	1518.79	1552.77	1574.12	3184.51	3085.76	3042.89	4703.3	4638.53	4617.01
DKI JAKARTA	384.3	385.84	389.69	0	0	-	384.3	385.84	389.69

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Provinsi Tahun 2016-2017.**

*Sumber: Web Badan Pusat Statistik. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)*

Salah satu penyebab kemiskinan yaitu urbanisasi. Banyaknya urbanisasi mengakibatkan kemiskinan serta pemukiman penduduk diperkotaan yang semakin padat, dan kumuh. Berdasarkan data jumlah penduduk diatas, dapat diketahui

Jawa Timur masih memiliki persentase kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Penyebab faktor kemiskinan adalah tidak memiliki penghasilan tetap ataupun pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan. Kemiskinan memberikan dampak yang begitu besar dalam menjalankan norma-norma kehidupan. Dampak dari kemiskinan diantaranya tidak mampu memperoleh pendidikan yang berkualitas, tidak dapat memperoleh kesehatan yang layak, tidak memiliki penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak memiliki jaminan keluarga. Hal tersebut membuktikan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memberantas kemiskinan.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah harus tepat sasaran. Sasaran dalam mengatasi kemiskinan yaitu diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan PMKS. Jenis PMKS menurut Permensos 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial diantaranya anak balita telantar, anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan,

pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil. Salah satu jenis PMKS yang diperhatikan dan diupayakan dalam penurunan jumlahnya oleh Kementerian Sosial yaitu gelandangan dan pengemis. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Sosial, tercatat pada tahun 2012 jumlah gelandangan di Indonesia mencapai 18.599 jiwa dan Jumlah Pengemis mencapai 178.262 jiwa (Kementerian Sosial RI, 2014). Angka tersebut masih perlu diteliti kembali mengingat kelompok gelandangan dan pengemis ini memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga data riilnya dapat saja lebih tinggi (Kementerian Sosial RI, 2014).

Masalah gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang terjadi setiap tahunnya. Permasalahan Gelandangan dan Pengemis sulit untuk diatasi baik di wilayah perkotaan (penerima) maupun di wilayah pedesaan (pengirim). Fenomena kemiskinan yang terjadi di perkotaan dengan ditandai munculnya gelandangan dan pengemis ini membutuhkan intervensi pemberdayaan. Proses Pemberdayaan hendaknya dilakukan dalam program, serta kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus hingga tercapainya kemandirian masyarakat. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan baik lingkungan fisik maupun sosial (Sulistiyani, 2004:19).

Pemerintah mempunyai peran lebih dalam pemberdayaan masyarakat selain peran swasta dan masyarakat, khususnya pada rambu-rambu dan aturan - aturan secara umum, serta mempunyai peran pada pengambilan keputusan dan



pendanaan (Nasirin, 2010:106). Menurut Suharto (2017:61) menyebutkan ada beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat ekonomi lemah, yaitu ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional. Berdasarkan teori tersebut, PMKS merupakan salah satu masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pemberdayaan PMKS terutama gelandangan dan pengemis harus segera dituntaskan.

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis sangat diperlukan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat mendukung terciptanya program yang berkualitas dan sesuai oleh kebutuhan PMKS. Kebijakan yang berkaitan dengan penanganan gelandangan dan pengemis diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan sosial yang dimaksud yaitu meliputi rehabilitasi sosial. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, penanggulangan gelandangan dan pegemisan yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai

taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Upaya mengentaskan angka gelandangan dan pengemis yang jumlahnya mencapai belasan ribu di seluruh Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI mencanangkan sebuah program yang bernama “Desaku Menanti” sebagai salah satu bentuk penanganan masalah gelandangan dan pengemis (Kementerian Sosial RI, 2014). Program ini bekerja sama dengan Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Sosial agar mantan gepeng bisa mendapatkan kehidupan layak sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2 UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. (Kementerian Sosial RI, 2017)

Program “Desaku Menanti” adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu berbasis desa dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-imigrasi (Kementerian Sosial RI, 2017). Bentuk rehabilitasi sosial yang ditawarkan pada program ini berbeda dari program-program sebelumnya yang belum mencakup kebutuhan psikis, fisik, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, program Desaku Menanti memiliki unsur pembaharuan yang ditujukan bagi gelandangan dan pengemis yang dimana akan diberikan kegiatan-kegiatan dalam menunjang keterampilan, sehingga dari pelatihan keterampilan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keterampilan yang diberikan juga bertujuan agar gelandangan dan pengemis mencapai tingkat kemandirian dan

berjalan secara terus menerus sehingga tidak lagi menjadi Gelandangan dan Pengemis.

Pelaksanaan program Desaku Menanti dilaksanakan di Kota Malang. Kota Malang memiliki luas wilayah 110.06 km dengan jumlah penduduk adalah 887.443 jiwa di tahun 2016 (suryamalang.tribunews. com). Jumlah penduduk yang padat mengharuskan pemerintah malang berupaya memberikan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial menjadi dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan kesejahteraan sosial masyarakat tingkat daerah. Kebijakan yang berkaitan dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang diantaranya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan Lingkungan, serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Berdasarkan peraturan tersebut, yang melarang orang untuk menggelandang, mengemis, dan melakukan aktivitas, yang mengganggu ketertiban di jalan, termasuk larangan membeli pedagang asongan dan memberi sedekah pada pengemis di jalanan. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Program Desaku Menanti merupakan salah satu upaya rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial RI. Program Desaku Menanti Kota Malang diresmikan pada tanggal 25 Maret 2016 dan telah direalisasikan pada tanggal 12 Agustus 2016 di

Kampung Kesetiakawanan Sosial Margo Mulyo Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Program Desaku Menanti menampung warga yang berlatar belakang pengemis dan pengamen, tercatat sekitar 40 Kartu Keluarga yang terdiri atas 140 jiwa (Dinas Sosial, 2017).

Gelandangan dan Pengemis yang disebut dengan Warga Binaan Sosial Desaku Menanti mendapatkan beberapa fasilitas, diantaranya rumah, kegiatan pemberdayaan, pendanaan, dan sebagainya. Pembinaan, pemberdayaan, dan sosialisasi yang dilakukan di Desaku Menanti yaitu merupakan kerja sama antara Dinas Sosial Kota Malang dengan LKS Mutiara Insani selaku lembaga yang menerima dana dan mengeksekusi program ini. Dinas Sosial Kota Malang dan LKS Mutiara Insani bekerja sama dalam mengubah pola hidup warga binaan sosial Desaku Menanti. Dinas Sosial dan LKS Mutiara Insani berupaya memberikan pelatihan dan kegiatan dalam mengembangkan usaha maupun keterampilan para WBS dalam meningkatkan perekonomiannya. Tidak hanya dalam sektor ekonomi, pemberdayaan yang dilakukan juga dilakukan dalam upaya merubah pola pikir, memberikan semangat, maupun spiritual untuk menjalankan norma-norma kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk (a) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, (b) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Sosial terutama bagi PMKS Gelandangan dan

Pengemis bukan merupakan hal yang mudah. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Mind-set dan psikis seperti malas, terbiasa meminta-minta menjadi kendala utama dalam mengupayakan kemandirian bagi Warga Binaan Sosial Desaku Menanti. Hal tersebut juga senada dengan pendapat Sarifuddin, Pekerja Sosial Dinsos Kota Malang, yang membina warga di desaku menanti ini, merubah mental gepeng agar mau berusaha adalah tugas yang cukup berat. Bagaimana merubah mental mereka agar mau berusaha, tidak hanya hidup dengan meminta. (Kementerian Sosial RI, 2017)

Berdasarkan dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana program Desaku Menanti Kota Malang dalam upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis, sehingga penelitian ini berjudul **“Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti”** dengan alasan Kota Malang merupakan salah satu kota yang dipilih dalam pelaksanaan program Desaku Menanti. Pelaksanaan program desaku menanti di Kota Malang telah banyak mendapatkan apresiasi, salah satunya oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi perkembangan Kampung Desaku Menanti yang berlokasi di Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang ([malangkota.go.id](http://malangkota.go.id)). Namun, pelaksanaan program tidak saja berakhir dengan pembangunan secara fisik, juga meliputi pemberdayaan masyarakat yang ada didalamnya. Memandirikan eks gelandangan dan pengemis adalah tujuan

didirikannya desaku menanti (kampung topeng) (Kementerian Sosial RI, 2017). Hal itu bertujuan dalam Rehabilitasi Sosial PMKS yang merupakan sasaran dari Program Desaku Menanti untuk dapat menjalankan fungsi sosial sebagaimana mestinya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melaui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian diantaranya:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran terkait Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti pada fenomena yang sama.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai pentingnya Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang.
  - b. Bagi pemerintah penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” di Kota Malang.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, selanjutnya disampaikan pokok-pokok pembahasan yang ada dalam setiap bab antara lain:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, sistematika pembahasan.



## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan pada bab ini akan menunjukkan tentang (1) Administrasi Publik (2) Pemberdayaan Masyarakat, (3) Rehabilitasi Sosial, (4) Gelandangan dan Pengemis (5) Program Desaku Menanti.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mencantumkan Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Metode Analisis Data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti dengan menjelaskan tentang Penyajian Data. Untuk memperjelas hal ini maka dalam pembahasan mencantumkan tentang Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program “Desaku Menanti” Kota Malang terkait dalam bentuk pemberdayaan, tahapan-tahapan pemberdayaan, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan melalui program “Desaku Menanti”. kemudian di akhir pembahasan bab ini peneliti menunjukkan analisis data dan intervensi hasil temuan penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari sub bab yaitu kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan sebagai jawaban atau hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Sedangkan saran merupakan pendapat ilmiah tambahan dari penulis mengenai hal-hal ideal atau

konkrit yang telah atau dapat ditempuh untuk melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga peneliti ini dapat menjadi karya penelitian yang bermanfaat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Istilah kata “administrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (Latin : *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Utrecht dalam Indradi (2010:11) mengatakan administrasi adalah gabungan yang dibawah jabatan pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan (tugas memerintah) yang ditugaskan kepada badan-badan pemerintah dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah daripada negara.

Ilmu Administrasi dilihat dari tujuan penyelenggaraan kegiatannya dapat dibagi kedalam tiga golongan besar, yaitu (1) administrasi negara (*public administration*); (2) administrasi swasta/privat (*privat administration*); dan (3) administrasi Internasional (*international administration*) (Hutabarat dalam Indradi 2010:71). Adminidtrasi negara/publik (*public administration*), yaitu *administration* yang menyangkut seluruh rangkaian penyelenggaraan untuk mencapai tujuan kenegaraan. Administrasi negara/publik dibagi atas: (1) adminidtrasi pemerintahan yang terdiri dari: (a) administrasi sipil, (b) administrasi militer.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Indradi (2010:118-119) mengatakan dalam “Sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia buku

I” mendefinisikan publik (negara) yaitu : adminnistrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya. Dalam suatu dan kondisi negara bagaimanapun, administrasi negara harus tetap berperan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan negara, mengemban tugas penyelenggaraan negara, mengemban misi perjuangan bangsa dalam bernegara; memberikan perhatian dan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan membuka peluang kepada masyarakat untuk berkarya dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, ataupun untuk melakukan peran tertentu dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang secara tradisional dilakukan oleh aparatur negara.

Ilmu administrasi yang memiliki konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar, dalam penerapannya akan berbeda jika diterapkan pada sektor publik atau negara dibandingkan dengan sektor bisnis atau swasta. Tujuan administrasi publik adalah meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam suatu negara atau daerah. Motif dari seluruh proses kegiatan dari administrasi publik adalah pemberian pelayanan (*service*) yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya pada seluruh masyarakat. Sifat pelayanan yang diberikan administrasi publik yaitu memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga masyarakat. Sumber kekuasaan administrasi publik yaitu administrasi publik memperoleh kekuasaan dari rakyat baik secara langsung maupun mellaui perwakilan dalam menjalankan kegiatannya. Artinya, rakyat yang berdaulat. (Indradi 2010:120-122)

Administrasi Publik menurut (Pasalong, 2008:7) menjelaskan bahwa proses dimana sumber daya dan publik dikoordinasi untuk memformulasikan,

mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik yang ditentukan. Sedangkan Nigro dalam Pasalong (2008:8) memaparkan administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah yang meliputi tiga cabang yaitu, eksekutif, legislatif, serta peranan penting dalam merumuskan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dituliskan diatas, terdapat beberapa hal penting yang diperhatikan dan menjadi kesimpulan. Administrasi publik merupakan kerjasama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada administrasi publik, kebijakan publik akan melahirkan sebuah program yang berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Program tersebut bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.

Administrasi publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yaitu ditujukan pada PMKS jenis gelandangan dan pengemis. Administrasi publik berperan sangat penting sebagai acuan dalam memberi pelayanan publik berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Penyatuan teori administrasi publik dengan masalah yang ada saat ini, diharapkan dapat menciptakan solusi yang sesuai.

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan pada masa kini, terutama bagi kelompok orang yang berkekurangan baik dalam hal ekonomi maupun hal lain. Menurut Suharto (2017:58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya Sulistiyanti (2004:77).

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Menurut Suharto (2017:60) pemberdayaan sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang bedaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial “Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat demi melaksanakan tujuan hidup kelompok masyarakat itu sendiri. Maka dari itu pemberdayaan sangat perlu dilakukan terutama bagi kelompok masyarakat lemah yang belum dapat berdayakan potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Salah satu yang tergolong masyarakat lemah yaitu gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis layak mendapatkan pemberdayaan sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri yaitu untuk memperkuat daya kelompok gelandangan dan pengemis sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup baik dalam hal ekonomi maupun hal lainnya.



## 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak saja dilakukan perseorangan ataupun individu dengan individu namun juga dilakukan kolektif atau berkelompok. Parsons et.al dalam Suharto (2017:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting petolongan perseorangan. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro. Pemberdayaan mikro, mezzo, dan makro memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task center apporoach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai startegi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

**Tabel 2.1 Strategi Pemberdayaan Dengan Mempertimbangkan Tiga Bentuk Intervensi.**

Pendekatan	Sasaran	Teknik	Tujuan
Mikro	Individu, keluarga	Konseling, terapi, bimbingan, pembinaan, management stress, konseling, perkawinan, dan intervensi krisis	Mengurangi tekanan, menumbuhkan kesadaran, <i>self image</i> , konsep diri, tumbuhnya motivasi, mengenal potensi, kemampuan dan kelemahan, mengarahkan, membimbing dan melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Pendekatan	Sasaran	Teknik	Tujuan
Mezzo	Kelompok, <i>peer group</i> , <i>self-help</i> <i>group</i>	Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok	Peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap- sikap agar dapat mengatasi masalah sendiri dan kelompok.
Makro	Komunitas dan masyarakat	Kebijakan sosial, perencanaan sosial, kampanye, lobbying, media massa, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik	Partisipasi masyarakat, meningkatkan performa/kinerja organisasi, perubahan kebijakan, dan perubahan sosio ekonomi.

*Sumber: Hasil adaptasi Ife, Parson, Jorgensen, dan Hernandes, serta Netting Kettner, dan McMurtry dalam Fahrudin (2011)*

Menurut Suharto dalam Suharto (2017:67) Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5p, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan.

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehisupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Strategi yang dipakai

dalam pemberdayaan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai. Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam mengupayakan kemandirian maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan, pelatihan, perlindungan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga diterapkan dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program Desaku Menanti.

### 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak saja mencakup dalam hal perekonomian masyarakat. Pemberdayaan juga harus mencakup pada kebutuhan hidup masyarakat dalam segala sektor. Hal tersebut dibuktikan dengan pendapat menurut Fahrudin (2011:96) tentang proses dalam pemberdayaan masyarakat. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;

- a. *Enabling*, menciptakan suatu iklim yang dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran dalam memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya dalam upaya mengembangkan potensi yang ada.
- b. *Empowering*, meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang dimiliki untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar *input* dan *output*.
- c. *Protecting*, melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem yang diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktek eksploitasi yang berguna sebagai perlindungan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa proses. Pemberdayaan harus mencakup pada upaya menyadarkan masyarakat tentang potensi yang dimiliki, pemberian semangat, motivasi, pelatihan dalam upaya pemberdayaan, serta harus mencakup upaya melindungi untuk masyarakat itu sendiri sehingga dapat menjalankan kehidupan sosial nya dengan baik. Proses pemberdayaan masyarakat juga harus berupaya pada tujuan pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu kemandirian masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial. Hal tersebut harus diperhatikan terutama bagi pemberdayaan masyarakat berekonomi lemah dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah. Proses pemberdayaan masyarakat dari sisi *enabling*, *empowering*, dan *protecting* juga harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat PMKS. Karna pada dasarnya, PMKS tidak saja membutuhkan pemberdayaan dalam bentuk ekonomi, namun juga dalam bentuk perlindungan, dan pengakuan dalam kehidupan sosial.

#### **4. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan dalam mencapai kemandirian berkesinambungan. Namun, dalam upaya menciptakan kemandirian berkesinambungan perlu dilakukan motivasi secara terus menerus, pemeliharaan semangat, pengembangan potensi agar tidak adanya kemunduran. Pada fase inisial, semua proses pemberdayaan berasal; dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk pemerintah. Dalam hal ini rakyat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan oleh pemerintah dan tetap

bergantung pada pemerintah. Pada fase, partisipatoris, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama-sama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat, dan diperuntukkan kepada rakyat, pada fase ini rakyat sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian. Sedangkan pada fase mensipatoris, proses pemberdayaan dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung pemerintah.

Adapun tahap-tahap pemberdayaan masyarakat seperti diungkap oleh Sulistiyani (2004: 83), adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan/aktor perilaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini



masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian masyarakat dalam bentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

Tahapan-tahapan dari proses belajar dalam pemberdayaan suatu masyarakat dapat dilihat juga melalui kedewasaan sikap masyarakat seperti tabel berikut:

**Tabel 2.2 Tahapan Pemberdayaan *Knowledge, Attitudes, Practice* dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik, dan Konatif.**

<b>Tahapan Afektif</b>	<b>Tahapan Kognitif</b>	<b>Tahapan Psikomotorik</b>	<b>Tahapan Konatif</b>
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan

<b>Tahapan Afektif</b>	<b>Tahapan Kognitif</b>	<b>Tahapan Psikomotorik</b>	<b>Tahapan Konatif</b>
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

*Sumber: Sumodiningrat dikutip oleh Sulistiyani (2004:84)*

Tabel tersebut menjelaskan bagaimana peningkatan afeksi, kognisi, psikomotrik, dan konatif dalam suatu pembangunan masyarakat. Masyarakat akan berproses secara bertahap, dalam waktu yang tidak singkat. Dengan demikian proses pemberdayaan masyarakat hendaknya memperhatikan tahap demi tahap. Apabila perubahan dipaksakan justru akan menimbulkan bumerang bagi pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.

Proses pemberdayaan tidak berlangsung secara singkat. Untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki memerlukan waktu yang panjang. Tahapan pemberdayaan dapat disimpulkan bermula pada penyadaran bagi masyarakat akan potensi yang dimiliki, transformasi tentang pengetahuan dasar bagi potensi itu sendiri, serta pelatihan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Setiap tahapan pemberdayaan, peran dalam berbagai sektor sangat dibutuhkan. Peran pemerintah pada tahap awal pemberdayaan dibutuhkan lebih dominan, sedangkan pada tahap-tahap selanjutnya diharapkan masyarakat sudah bisa lebih aktif dalam pemberdayaan sehingga pemberdayaan sampai pada tahap dari rakyat untuk rakyat dengan didukung peran pemerintah.

Pemberdayaan PMKS juga dilakukan secara bertahap. Hal tersebut mengingat bahwa PMKS merupakan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dan perlu diperlakukan dengan cara yang tepat. Tahapan pemberdayaan harus dilakukan secara perlahan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu tahap penyadaran, transformasi, dan peningkatan kemampuan.

## 5. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Model memiliki arti sebagai contoh, pola, acuan, ragam, macam dan sebagainya. Menurut Suryono (2010:264) terdapat beberapa model pemberdayaan masyarakat, yaitu:

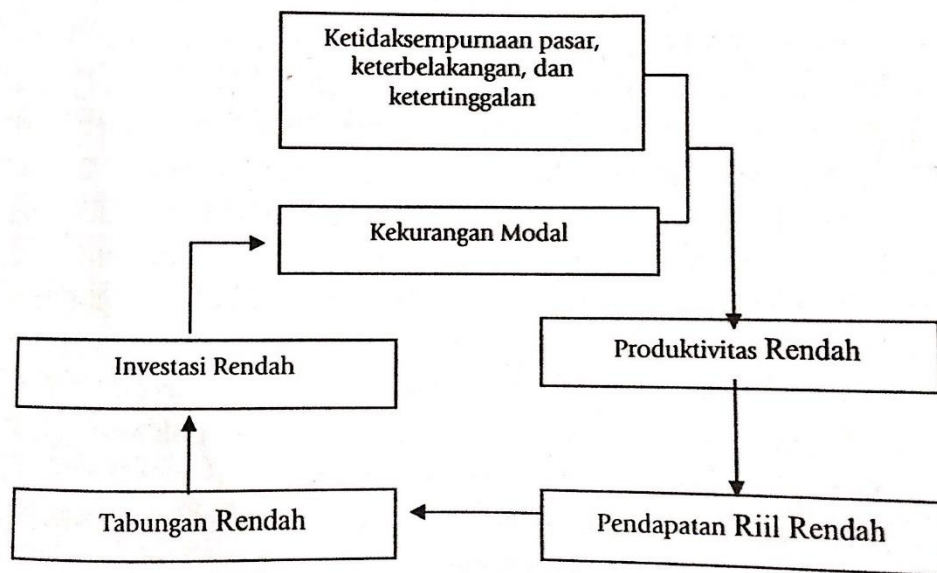
### a. Model *people center development*

Menurut model ini pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya.

### b. Model lingkaran setan kemiskinan

Asumsi dasar dari model ini adalah "*a poor country is poor because it is poor*". Kemiskinan itu merupakan suatu lingkaran yang disebutnya dengan lingkaran kemiskinan yang mengemukakan bahwa kemiskinan diawali adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Rendahnya investasi berakibat pada

keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir dari model ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1 Model Lingkaran Setan Kemiskinan**

*Sumber: Suryono, 2014.*

#### c. Model kemitraan

Kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan (1) ada dua pihak atau lebih, (2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, (3) ada kesepakatan, (4) saling membutuhkan. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok.

d. Model *Grameen Bank*

Model ini berasal dari contoh pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Bangladesh *Grameen Bank* yang memberikan pelayanan program pengentasan kemiskinan pada masyarakat. Model kerja dari *Grameen Bank* sebagai berikut: sebuah unit bank dipimpin oleh manajer lapangan dan sejumlah pekerja yang mencakup area pelayanan sekitar 15-20 desa. Manajer dan karyawan datang ke desa untuk memperkenalkan mereka dan mengenalkan program Bank pada masyarakat. *Grameen Bank* mempunyai 2.247 cabang dan memberikan pelayanan di 72.096 desa, mereka juga menerangkan tujuan, fungsi, model kerja Bank kemasyarakatan daerah. *Grameen Bank* memberikan kredit kepada masyarakat tanpa agunan dan menciptakan sistem perbankan yang berbasis pada kesalingpercayaan, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas.

e. Model sistem kelompok tanggung renteng (*multiplier effect*)

Model ini banyak diadopsi oleh para pengelola koperasi di Indonesia yang pada dasarnya merupakan upaya penguatan kelompok dalam berintegrasi antar manusia atau antar anggotanya dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut: (1) sistem tanggung renteng merupakan upaya memperbaiki kualitas manusia melalui interaksi antar manusia, (2) kelompok tanggung renteng merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana pendewasaan manusia melalui interaksi antar manusia dalam kelompok menuju manusia berkualitas, (3) kelompok tanggung

renteng mengembangkan nilai-nilai umum dan nilai-nilai khusus yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki koperasi.

Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan disesuaikan oleh kebutuhan dan karakter masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa latar belakang masalah dalam pemberdayaan akan mempengaruhi tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai. Pemberdayaan melalui program Desaku Menanti dapat digolongkan pada model pemberdayaan masyarakat yaitu: model *people center development*, model lingkaran setan kemiskinan, dan model kemitraan.

## **C. Rehabilitasi Sosial**

### **1. Pengertian rehabilitasi sosial**

Rehabilitasi sosial adalah salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan. Rehabilitasi sosial merupakan upaya refungsionalisasi dan meningkatkan kemampuan diri pada seseorang maupun masyarakat agar mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam mewujudkan tujuan hidup dari seseorang ataupun masyarakat itu sendiri. Menurut Allan dalam UPT pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang (2013:34) rehabilitasi bukan hanya merupakan proses restorasi semata, melainkan juga merupakan suatu usaha untuk mencapai kemandirian, perawatan diri, dan mewujudkan potensi yang dimiliki.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial didefinisikan

sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran ialah meliputi sebagai berikut:

Sasaran rehabilitasi sosial:

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Penyandang cacat fisik        | 11. Pengguna psikotropika sindroma |
| 2. Penyandang cacat mental       | ketergantungan                     |
| 3. Penyandang cacat fisik dan    | 12. Orang dengan <i>Human</i>      |
| mental                           | <i>Immunodeficiency Virus/</i>     |
| 4. Tuna Susila                   | <i>Acquired Immuno Deficiency</i>  |
| 5. Gelandangan                   | <i>Syndrome</i>                    |
| 6. Pengemis                      | 13. Korban tindak kekerasan        |
| 7. Eks penderita penyakit kronis | 14. Korban bencana                 |
| 8. Eks narapidana                | 15. Korban perdagangan orang       |
| 9. Eks pecandu narkoba           | 16. Anak terlantar                 |
| 10. Eks psikotik                 | 17. Anak dengan kebutuhan khusus   |

*Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*

Rehabilitasi sosial penting dilakukan sebagai mewujudkan tujuan utama suatu negara yaitu kesejahteraan sosial. Pengertian rehabilitasi sosial yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial adalah upaya refungsionalisasi masyarakat untuk menjalankan fungsi sosialnya. Rehabilitasi sosial sangat diutuhkan bagi masyarakat yang merupakan



golongan PMKS. PMKS jenis gelandangan dan pengemis merupakan salah satu sasaran rehabilitasi sosial yang harus diupayakan untuk dibenahi. Kehidupan gelandangan dan pengemis dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat. Maka dari itu, perlu adanya upaya rehabilitasi sosial bagi PMKS jenis gelandangan dan pengemis.

## **2. Tujuan Rehabilitasi Sosial**

Tujuan rehabilitasi sosial merupakan pondasi dasar untuk pelaksanaan dari rehabilitasi sosial itu sendiri. Tujuan rehabilitasi sosial bertujuan dalam meningkatkan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Kosasih (2012:10) juga menyimpulkan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi maupun mencegah penurunan kemampuan bersosialisasi bagi individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar. Disamping itu, rehabilitasi sosial juga berperan sangat penting untuk mencegah kondisi fisik, mental, dan sosial individu yang bersangkutan menjadi lebih buruk atau lebih parah dari sebelumnya.

Disisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan jika rehabilitasi sosial memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Tujuan rehabilitasi sosial berkaitan dengan fisik maupun psikis seseorang. Dapat disimpulkan bahwa tujuan rehabilitasi sosial yaitu memulihkan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi dengan wajar dan untuk menjaga kondisi fisik maupun mental yang ada pada individu.

### 3. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial tidak begitu saja diberikan tanpa melihat dari berbagai cara pandang. Pelayanan rehabilitasi sosial diberikan berdasarkan kebutuhan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu sendiri. Menurut UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang (2013:31) terdapat tiga bentuk pendekatan pelayanan rehabilitasi sosial yakni sebagai berikut:

- a. Secara institusional, adalah suatu system pelayanan rehabilitasi sosial dengan menempatkan penyandang masalah sosial dalam suatu institusi, yaitu meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi Pendidikan, rehabilitasi sosial dan kelas karya (*pre-vocasional training*).
- b. Rehabilitasi bersumber daya masyarakat (RBM) adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan cara membangkitkan kesadaran masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, dengan adanya konsep RBM memungkinkan adanya peran serta lembaga dalam penanganan penyandang masalah sosial di setiap daerah.
- c. Rehabilitasi dalam keluarga (RDK) adalah suatu system pelayanan dengan menepatkan penyandang masalah sosial pada keluarga, sehingga

keluarga yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan rehabilitasi lanjutan di dalam keluarga itu sendiri, terutama yang bersifat rehabilitasi medik seperti fisioterapi, terapi wicara, dan terapi okupasi.

Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial jelas tertulis pada Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial, menyatakan bahwa rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Bimbingan mental dan spiritual;
- e. Bimbingan fisik;
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. Pelayanan aksesibilitas;
- h. Bantuan dan asistensi sosial;
- i. Bimbingan resosialisasi;
- j. Bimbingan lanjut; dan/atau
- k. Rujukan.

Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dilakukan berbeda-beda tergantung pada karakter dari masyarakat ataupun individu yang ingin diberdayakan. Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan harus berkesinambungan dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

## **D. Gelandangan dan Pengemis**

### **1. Pengertian Gelandangan dan Pengemis**

Gelandangan dan pengemis bukanlah hal yang baru bagi masyarakat. Tidak sedikit gelandangan dan pengemis yang kita temui setiap harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial masih menjadi masalah utama di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- b. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (11) tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum. Kemudian Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara baik berupa

mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan dan pengemis, yaitu: gelandangan adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-kesini, tidak tentu tujuannya, berpetualangan. Kemudian, pengemis adalah orang yang meminta-minta. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) tentang kesejahteraan sosial menjelaskan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan, kelompok, masyarakat. Gelandangan dan pegemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan penghasilan tetap serta menjalankan kehidupannya di tempat-tempat umum. Sedangkan pengemis yaitu orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan meminta-minta sebagai penghasilan. Warga binaan sosial desaku menanti yang selanjutnya disebut dengan WBS desaku menanti, merupakan salah satu jenis PMKS gelandangan dan pengemis. Hal tersebut menjadikan perlu adanya pemberdayaan dalam upaya rehabilitasi sosial mantan gelandangan dan pengemis yaitu WBS desaku menanti untuk kembali menjalankan fungsi sosial dengan baik.

## 2. Kriteria Gelandangan dan Pengemis

Tidak semua orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dapat dikatakan sebagai gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis ditentukan berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 11 dan Pasal 12 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis menjelaskan, gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

- a. Tanpa kartu tanda penduduk.
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap.
- c. Tanpa penghasilan yang tetap.
- d. Tanpa rencana hari kedepan anak-anaknya maupun dirinya.

Sedangkan, pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. Mata pencaharian tergantung pada belas kasihan orang lain.
- b. Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
- c. Berada di tempat umum.
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Dalam pelaksanaan program Desaku Menanti, terdapat kriteria gelandangan dan pengemis yang menjadi prioritas utama menjadi sasaran dari pelaksanaan program. Kriteria tersebut diantaranya:

- a. Kriteria prioritas I:

- 1) Pengemis
- 2) Produktif

- 3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap/ sewa/ kontrak
- 4) Kemauan berubah
- 5) Kesiediaan mengikuti program

b. Kriteria prioritas II:

- 1) Pemulung/ diluar PMKS tapi miskin
- 2) Produktif
- 3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap/ sewa/ kontrak
- 4) Kemauan berubah
- 5) Kesiediaan mengikuti program

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, maka orang-orang yang dapat dikatakan sebagai gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab pemerintah. Dapat disimpulkan, ciri utama gelandangan dan pengemis yaitu tidak memiliki tempat tinggal, penghasilan yang tetap, serta terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, individu maupun masyarakat yang tergolong dalam kelompok gelandangan dan pengemis membutuhkan perhatian khusus untuk dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga bisa memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan penghasilan tetap. Berdasarkan kriteria gelandangan dan pengemis yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 11 dan Pasal 12 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, maka telah ditentukan kriteria prioritas sasaran gelandangan dan pengemis yang dapat menjadi warga binaan sosial desaku menanti. Hal tersebut menjadi acuan dinas sosial dalam menentukan sasaran sebagai penerima program desaku menanti.



### 3. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan Dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis tidak begitu saja muncul. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang seseorang memilih ataupun terpaksa menjadi Gelandangan dan pengemis. Menurut Irawan (2013:6) ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, diantaranya:

a. Merantau dengan modal nekad

Gelandang dan pengemis dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar berasal dari wilayah pedesaan. Kelompok gelandangan dan pengemis tersebut berupaya untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar, namun tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat mengakibatkan kelompok tersebut tidak bisa bertahan hidup di kota dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Sehingga, menjadi gelandangan dan pengemis terpaksa harus dilakukan.

b. Malas berusaha

Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan sesuatu tanpa usaha, cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis.

c. Cacat fisik

Keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis. Sulitnya kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

membuat individu terpaksa bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis.

d. Tidak adanya lapangan pekerjaan

Sulitnya mencari pekerjaan terutama bagi individu yang tidak memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan formal, mengakibatkan adanya keterbatasan akademis. Sehingga, keterbatasan tersebut menjadikan gelandangan dan pengemis merupakan pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

e. Tradisi yang turun temurun

Gelandangan dan pengemis bisa disebabkan oleh tradisi yang sudah ada. Kebiasaan meminta-minta dan hidup dijalan terus dilanjutkan. Hal tersebut disebabkan oleh profesi orang tua yang biasanya sudah menjadi gelandangan dan pengemis. Sehingga, anak-anak dari orang tua tersebut tidak memiliki pendidikan yang memadai untuk menjalankan fungsi sosialnya, dan memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

f. Mengemis daripada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, mengakibatkan beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran untuk mengemis dan menggelandang daripada menganggur dan tidak memiliki penghasilan.

g. Harga kebutuhan pokok yang mahal

Harga kebutuhan pokok yang mahal membuat sebagian orang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan yang didapatkan tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada tahap ini, sebagian orang tersebut memilih gelandangan dan pengemis sebagai cara dalam menambah penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

h. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Banyak gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu dalam menghadapi masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang memilih menjadi gelandangan dan pengemis sebagai jalan bagi individu atau masyarakat tersebut untuk bertahan hidup.

i. Ikut-ikutan saja

Kehadiran pendatang baru bagi gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang gelandangan dan pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di kota. Hal tersebut mengakibatkan kelompok tersebut melihat fenomena itu sebagai peluang mendapatkan penghasilan dengan mudah dan cepat. Sehingga adanya gelandangan dan pengemis yang dilatarbelakangi oleh “ikut-ikutan” tidak bisa dihindari.

j. Disuruh orang tua

Disuruh orang tua menjadi alasan yang biasa ditemukan pada gelandangan dan pengemis yang tergolong pada usia anak-anak. Gelandangan dan pengemis yang masih berusia anak-anak, melakukan pekerjaan tersebut disebabkan oleh perintah dari orang tua dan hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu eksploitasi anak.

k. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan terutama bagi pendatang baru di kota. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya pilihan lain bagi pendatang untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang atau bertahan hidup.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial, (2004:11) faktor terjadinya gelandangan dan pengemis disebabkan sikap masyarakat sekitar gelandangan yang kurang peduli. Faktor ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan hukum, gelandangan pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di wilayah yang sebetulnya dilarang dijadikan tempat tinggal dan hidup berkeliaran di jalan-jalan atau tempat umum serta tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang dicatat kelurahan, RT/RW setempat. Kemudian faktor lainnya penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis yaitu faktor kemiskinan, faktor yang krusial yang menyebabkan terjadinya dan timbulnya/lahirnya gelandangan dan pengemis.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kelompok masyarakat memilih menjadi gelandangan dan pengemis. Namun, dapat disimpulkan bahwa faktor utama munculnya gelandangan dan pengemis yaitu kemiskinan. Dalam keadaan miskin, terkadang seseorang tidak memiliki pilihan untuk bertahan hidup atau menginginkan penghasilan lebih tanpa tau bagaimana cara

yang harus dilakukan. Hal itulah yang menyebabkan mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

## **E. Program Desaku Menanti**

### **1. Pengertian Program Desaku Menanti**

Program Desaku Menanti merupakan program penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terpadu berbasis desa. Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia melalui Ditjen Rehabilitasi Sosial, tepatnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (RSTSKPO), melakukan upaya yang berkesinambungan guna mengentaskan gelandangan dan pengemis (Gepeng). Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberdayakan eks gepeng melalui program Desaku Menanti.

Program “Desaku Menanti” adalah program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu berbasis desa dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-migrasi. Program ini sangat bermanfaat bagi eks Gepeng, karena bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dengan bantuan berupa rumah layak huni. Selain itu ada bantuan penguatan ekonomi produktif bagi peningkatan kesejahteraan.

## 2. Landasan Hukum Program Desaku Menanti

Dasar dalam terwujudnya suatu program yaitu perlu adanya landasan hukum yang kuat. Adapun landasan hukum pelaksanaan program Desaku Menanti berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 H, dan Pasal 34.
- b. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat
- l. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Pemangunan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal.

### **3. Tujuan Program Desaku Menanti**

Tujuan dari Program Desaku Menanti diantaranya terdapat tujuan umum dan khusus melalui program tersebut, yaitu:

#### **a. Tujuan Umum**

Tujuan umum program desaku menanti adalah mengembangkan modal penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan, agar hilang secara permanen di kota-kota besar.

#### **b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari program desaku menanti, diantaranya:

- 1) Meningkatkan kapasitas gelandangan dan pengemis
- 2) Terciptanya kesempatan berusaha dan bekerja
- 3) Memperkuat peran gelandangan dan pengemis
- 4) Meningkatkan akses gelandangan dan pengemis terhadap pelayanan sosial dasar
- 5) Memberikan jaminan sosial dan rasa aman



#### **4. Sasaran Program Desaku Menanti**

Dalam pelaksanaan program Desaku Menanti, Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang untuk menanggulangi permasalahan PMKS Gelandangan dan Pengemis. Terdapat sasaran Gelandangan dan Pengemis yang diutamakan sebagai penerima Program tersebut. Sasaran dari program desaku nmenanti sebagai berikut:

##### **a. Gelandangan**

- 1) Kelompok umur dibawah 55 tahun
- 2) Memiliki keluarga/kerabat di desa
- 3) Menjadi gelandangan karena keterpaksaan
- 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap
- 5) Tidak memiliki tanda identitas resmi

##### **b. Pengemis**

- 1) Keompok umur dibawah 55 tahun
- 2) Memiliki keluarga/kerabat di desa
- 3) Menjadi pengemis karena keterpaksaan
- 4) Tidak memiliki tempat tinggal tetap
- 5) Tidak memiliki tanda identitas resmi

#### **5. Ruang Lingkup Kegiatan Program Desaku Menanti**

##### **a. Rehabilitasi Sosial**

Kegiatan rehabilitasi sosial selama ini dilakukan di ota-kota besar melalui panti-panti gelandangan pengemis milik Kementerian Sosial

maupun pemerintah Daerah. Namun demikian, jumlah gelandangan dan pengemis tidak berkurang secara signifikan. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah seyogyanya apabila kegiatan rehabilitasi sosial dilakukan secara terpadu di daerah asal gelandangan dan pengemis, serta digokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan kontrol sosial masyarakat.

#### 1) Penjangkauan dan Pemulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Kementerian sosial bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana untuk pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal. Gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan adalah hasil dari operasi yutisi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja ataupun mereka yang sudah keluar dari panti-panti rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis milik pemerintah. Dalam pemulangannya, kementerian sosial berkoordinasi lembaga kesejahteraan sosial, Dinas/Instansi Sosial di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan dan desa. Pemulangan dilakukan sampai di tingkat desa dengan mengundang tokoh masyarakat setempat. Pemulangan ini juga sekaligus sebagai upaya diseminasi dan penyuluhan sosial yang sifatnya preventif untuk masa mendatang. Kegiatan ini dapat menggugah kepedulian masyarakat mengenai kondisi ekonomi warganya, dan untuk

menerima kembali mantan gelandangan dan pengemis dengan baik (reintegrasi sosial).

## 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial

Para gelandangan dan pengemis yang lolos seleksi dan persyaratan akan diberikan bimbingan fisik, mental, dan sosial. Bimbingan fisik diarahkan pada tuntutan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin, agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan mental diarahkan pada tuntutan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, dengan belajar tentang keagamaan, cara berfikir positif dan keinginan untuk berprestasi. Bimbingan sosial diarahkan pada tatanan kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

## 3) Bimbingan Keterampilan

Para gelandangan dan pengemis yang sudah dipulangkan kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Propinsi atau Kabupaten/Kota. Biaya pelatihan ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*cost sharing*). Bagi mereka yang telah lulus pelatihan keterampilan akan diberikan bantuan stimulan untuk modal usaha sesuai

dengan keterampilan yang dimilikinya ataupun dirujuk ke tempat kerja bila dimungkinkan. Namun demikian mereka diharuskan menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis lagi.

#### 4) Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif

Karakteristik gelandangan dan pengemis memang beragam. Ada diantara mereka yang membutuhkan pelatihan keterampilan, namun ada juga dari mereka yang membutuhkan modal untuk usaha. Penerima manfaat hanya butuh modal untuk usaha dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan melalui 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota juga akan mendapatkan bantuan stimulan langsung. Bantuan ini berupa bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) yang jenis bantuannya disesuaikan dengan minat, bakat, dan pangsa pasar di daerah setempat. Bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan modal usaha juga harus menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang dan mengemis lagi.

#### 5) Jaminan Hidup

Sementara gelandangan dan pengemis mengikuti layanan yang ada, otomatis mereka tidak bekerja (menggelandang dan mengemis). Sebagai konsekuensinya mereka akan mendapatkan jaminan hidup (Jadup) yang waktunya disesuaikan dengan situasi

kondisi serta dana yang ada. Jaminan hidup akan dihentikan ketika para penerima mafaat diperkirakan sudah hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar.

6) Bantuan Stimulan.

Pelayanan ini diberikan pada mereka yang masuk dalam kategori usia produktif, inggap mempunyai mental kuat untuk mengubah diri, diperkirakan tidak mempunyai kerabat di desa dan membutuhkan lingkungan tempat tinggal baru. Mereka yang serius mengikuti *Program Desaku Menanti* akan dibangun rumah sederhana yang layak ditempat di daerah asalnya. Kegiatan ini untuk sementara dibiayai oleh Kementerian Sosial ataupun Dinas/Instansi Sosial di Propinsi/Kabupaten/Kota, mengingat sifat program yang lingkunganya masih kecil bentuknya masih program uji coba. Kedepan, jika program ini berhasil dan siap direplikasikan secara nasional, *Program Desaku Menanti* akan bekerja sama dengan Kemeterian Perumahan dan Permukiman atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik yang ada di tingkat pusat maupun Propinsi/Kabupaten/Kota. Melalui bantuan perumahan ini diharapkan para gelandangan dan pengemis kembali memahami arti sebuah rumah yaitu sebagai simbol utama dalam keluarga, sehingga nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan juga dapat timbul dengan sendirinya.

7) Pengembalian Anak-Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah.

Kegiatan ini berupa bantuan stimulan seperti peralatan sekolah untuk anak-anak meliputi seragam, sepatu, tas, buku, dan alat tulis dalam satu paket. Besarnya bantuan stimulan disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. Pendamping juga melakukan advokasi ke lembaga pendidikan baik formal ataupun non formal agar mau menerima anak kembali bersekolah.

8) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas.

Terbatasnya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki gelandangan dan pengemis sangat berdampak pada ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pengelolaan aktifitas sosial ekonomi. Para penerima manfaat perlu difasilitasi agar mereka dapat menjangkau berbagai sistem sumber yang tersedia. Ketidakmampuan gelandangan dan pengemis dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan rentannya kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu dilakukan advokasi sosial untuk memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2014:5) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah Moleong (2014:6).

Jane Richie dalam Moleong (2014:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud dalam upaya mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menyimpulkan dari permasalahan yang ada dan dibentuk kedalam tulisan sistematis terkait pemberdayaan gelandangan dan pengemis dalam upaya rehabilitasi sosial terpadu berbasis desa.



## B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap suatu masalah Moleong (2014:92). Menurut Moleong (2014:93) penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus.

Menurut Moleong (2014:94) terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian Moleong (2014:94). Berdasarkan penjelasan diatas, fokus penelitian yang akan diambil untuk mempermudah menentukan data yang diperlukan dalam penelitian, antara lain:

1. Pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya Rehabilitasi Sosial melalui program Desaku Menanti, dilihat dari:
  - a. Bentuk pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Desaku Menanti, meliputi:

- 1) Penjangkauan Dan Pemulangan Gelandangan Dan Pengemis
  - 2) Bimbingan Fisik, Mental, Dan Sosial
  - 3) Bimbingan Keterampilan
  - 4) Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif
  - 5) Jaminan Hidup
  - 6) Bantuan Stimulan
  - 7) Pengembalian Anak-Anak Gelandangan Dan Pengemis Ke Sekolah
  - 8) Advokasi Sosial Dan Pengembangan Aksesibilitas
- b. Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat yang dikutip oleh Sulistiyani (2004:83) yang meliputi:
- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
  - 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
  - 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.
- c. Para Pelaku Pemberdayaan Warga Binaan Sosial Desaku Menanti
- 1) Dinas sosial kota malang
  - 2) Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani
  - 3) Instansi Pemerintah Pusat

- 4) Perguruan Tinggi
  - 5) Swasta
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis dalam upaya rehabilitasi sosial pada program Desaku Menanti Kota Malang, dilihat dari:
- a. Faktor penghambat
    - 1) Merubah Mindset, Mental, Dan Sikap Warga Binaan Sosial Desaku Menanti
    - 2) Upaya Advokasi Sosial, Dan Pengembangan Aksesibilitas
    - 3) Lokasi Program Desaku Menanti
    - 4) Kurangnya Sarana Dan Prasarana
  - b. Faktor Pendukung:
    - 1) Dana Program Mencukupi
    - 2) Kerja Sama Yang Baik Antar *Stakeholders*

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi Kota Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan oleh terpilihnya Kota Malang sebagai salah satu kota di Indonesia yang menjadi kota pelaksana program Desaku Menanti. Program Desaku Kota Malang juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Sosial RI Khofifah Indar Prawansa atas perkembangan kampung Desaku Menanti. (malangkota.go.id). Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, program

Desaku Menanti Kota Malang juga telah menjadi acuan bagi kota-kota lain yang ingin mengadopsi dan mengimplentasikan program ini.

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat mengetahui keadaan yang terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang didapatkan bisa dikatakan valid dan objektif. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah:

1. Dinas Sosial Kota Malang, Jalan Raya Sulfat No. 12 Kota Malang.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani, Jalan Sufelir No. 22, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
3. Desaku Menanti yang merupakan tempat tinggal gelandangan dan pengemis (Warga Binaan Sosial atau WBS) yang berada di Kampung Kesetiakawanan Sosial Margo Mulyo Dusun Baran Keleruhan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

#### **D. Sumber Data**

Sumber Data dalam penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian, Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:257) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terdapat pengklasifikasian jenis data oleh Sugiyono (2009:225) yaitu terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut sangat penting dan diperlukan untuk ketetapan dari sejumlah informasi yang relevan dengan data terkait variable-variable penelitian dan untuk menyederhanakan data yang akan dikumpulkan agar

dalam penelitian dapat membuat kesimpulan-kesimpulan dari data-data yang didapatkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data ini berasal dari sumber-sumber informan yang ditemui dilapangan. Data primer melibatkan beberapa informan, diantaranya:

- a. Hasil wawancara langsung dengan Pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang membidangi proses pemberdayaan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis program Desaku Menanti.
- b. Hasil wawancara langsung dengan LKS Mutiara Insani sebagai mitra kerja Dinas Sosial Kota Malang dalam proses pemberdayaan dan rehabilitasi sosial mulai dari tahapan-tahapan pemberdayaan hingga kegiatan-kegiatan rehabilitatif dalam program Desaku Menanti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang telah diperoleh dan berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini didapatkan dari dokumen-dokumen program Desaku Menanti. Menurut Arikunto (2006:129) dokumen yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis, serta arsip yang tersedia yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Berikut macam-macam dokumen yang menjadi sumber penelitian:

- a. Buku laporan pelaksanaan pengembangan model rehabilitasi sosial gepeng dan pemulung melalui program Desaku Menanti Provinsi Jawa Timur
- b. Pedoman program Desaku Menanti Kota Malang Tahun 2016
- c. Rekaman suara dari hasil wawancara.
- d. Catatan dari hasil wawancara.
- e. Dokumen-dokumen dari Dinas Sosial dan LKS Mutiara Insani Kota Malang.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Moleong (2014:186). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian Moleong (2014:190)

Penelitian ini menggali data primer menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa

narasumber yang memiliki pengaruh dalam topik penelitian. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Sosial Kota Malang yang membidangi pelaksanaan program Desaku Menanti, LKS Mutiara Insani sebagai mitra kerja Dinas Sosial Kota Malang dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Desaku Menanti, warga binaan sosial (WBS) Desaku Menanti yaitu gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemberdayaan.

## 2. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan Moleong (2014:69). Berdasarkan keterlibatan pengamatan dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik observasi takpartisipan (*nonparticipant observation*). Dalam observasi takpartisipan, pengamat berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan Moleong (2014: 70).

Sedangkan apabila berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, teknik observasi yang dilakukan yaitu menggunakan observasi tak berstruktur. Dalam observasi tak berstruktur, pengamat tidak membawa catatan tentang tingkah laku apa saja yang secara khusus akan diamati. Ia akan mengamati arus peristiwa dan mencatatnya atau meringkasnya untuk kemudian dianalisis Moleong (2014:70).



Menggunakan teknik observasi dalam mengumpulkan data penelitian, diharapkan peneliti mendapatkan kesesuaian informasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Desaku Menanti. Informasi juga diharapkan sesuai dengan pemberdayaan yang dilaksanakan terhadap gelandangan dan pengemis serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi Soehartono (2008:70). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan-laporan, dokumen resmi, peraturan-peraturan maupun arsip lain mengenai Desaku Menanti yang tersedia di Dinas Sosial Kota Malang dan LKS Mutiara Insani. Dokumen yang digunakan untuk mendukung kebutuhan penelitian akan menjawab sejauh mana pemberdayaan warga binaan sosial dilakukan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian Moleong (2014:168). Instrumen penelitian Arikunto (2006:149) merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian bisa

dikatakan sebagai alat dalam pengumpulan data agar data yang didapat dalam penelitian dapat diolah dan menghasilkan kesesuaian dengan data yang dibutuhkan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok yang dimaksud yaitu manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang yaitu pedoman yang digunakan dalam pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

1. Instrumen pokok dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim atau *idiosinkratik*. dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

- a. Mengadakan identifikasi terhadap isu yang ada di rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
- b. Menjadikan isu menjadi sub atau bagian variable.
- c. Mencari indikator setiap sub atau bagian variable.
- d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrument.
- e. Melengkapi instrument dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar Arikunto (2006:135).

2. Instrumen Penunjang

- a. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang digunakan sebagai panduan agar pertanyaan terarah dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman wawancara juga berfungsi agar proses tanya jawab tidak keluar dari fokus penelitian.
- b. Catatan lapangan adalah hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang berupa tulisan dan dibuat oleh peneliti pada saat adanya kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### **G. Analisis Data**

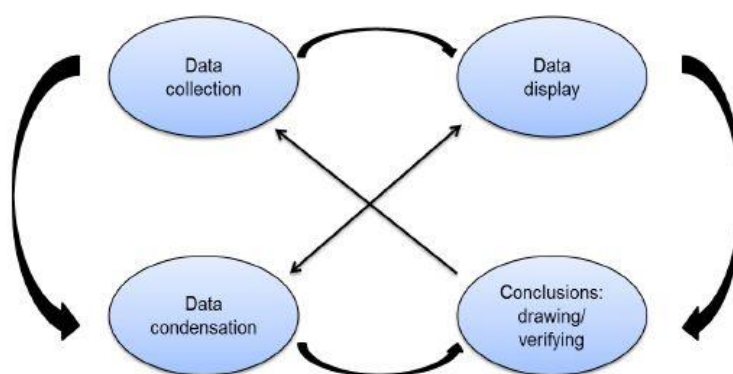
Metode analisa data kualitatif merupakan analisa data dekriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun lisan yang berasal dari orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian sehingga data yang didapat lebih akurat terhadap suatu peristiwa dan dapat disimpulkan.

Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Bodgan & Biklen dalam Moleong (2014:248)

Dengan menggunakan analisis data kualitatif, diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan suatu kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan yaitu pada Warga Binaan Sosial di Desaku Menanti. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data

kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: kondensasi data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah penuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



**Gambar 2 Analisis Data Model Interaktif**

*Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)*

Analisis model interaktif ini ada empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan model interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Keempat kegiatan dalam analisis model interaktif harus dilakukan secara berurutan dan dapat diperjelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collecting*)

Memahami bagaimana menyusun pengumpulan data (*data collecting*) adalah satu kunci sukses keberhasilan dalam sebuah penelitian. Data collecting merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dalam penelitian berguna dan dapat diandalkan untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan.

## 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan kondensasi data dengan cara memilih-memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan dokumentasi, dan catatan data lapangan yang sudah disajikan dalam catatan-catatan tadi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sebagai peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar kode sebelumnya sesuai dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah diberi kode selanjutnya dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

#### 4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi.

Langkah terakhir dalam menganalisa data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sejak awal oleh peneliti.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Situs Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi dilakukan untuk mengamati pemberdayaan warga binaan sosial Desaku Menanti dalam upaya rehabilitasi sosial yang meliputi bentuk-bentuk pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan LKS Mutiara Insani Kota Malang. Pengumpulan data wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yaitu pekerja sosial, wakil ketua LKS Mutiara Insani, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemberdayaan melalui program Desaku Menanti. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi maupun data dari berbagai arsip yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan LKS Mutiara Insani Kota Malang.

#### **1. Gambaran Umum Kota Malang**

##### **a. Sejarah singkat Kota Malang**

Sejarah singkat Kota Malang, Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai dioperasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna



tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah dinoyo dengan kerajaan gajayana.

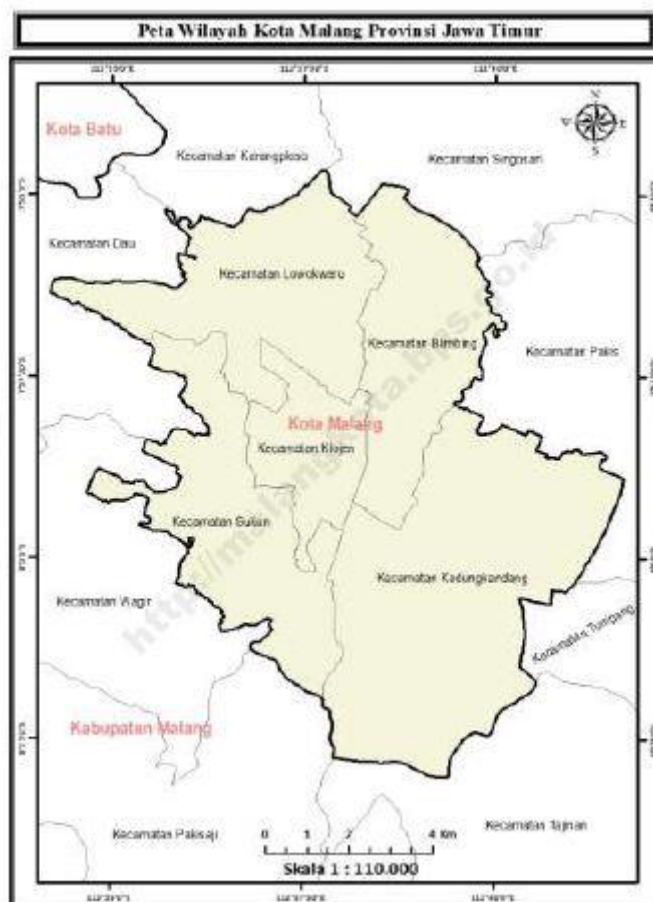
b. Kondisi geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, secara astronomis terletak pada posisi  $112,06^{\circ} - 112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ} - 8,02^{\circ}$  Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: kec. Singosari dan kec. Karangploso kab. Malang
- 2) Sebelah timur: kec. Pakis dan kec. Tumpang kab. Malang
- 3) Sebelah selatan: kec. Tajinan dan kec. Pakisaji kab. Malang
- 4) Sebelah barat: kec. Wagir dan kec. Dau Kab. Malang (Malang Dalam Angka, 2013)

Serta dikeliling gunung-gunung:

- 1) Sebelah utara: gunung arjuno
- 2) Sebelah timur: gunung semeru
- 3) Sebelah selatan: gunung kelud
- 4) Sebelah barat: gunung kawi dan panderman



**Gambar 3 Peta Wilayah Kota Malang**  
*Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2016*

c. Kondisi Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara  $22,7^{\circ}\text{C}$  –  $25,1^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan suhu maksimum mencapai  $32,7^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $18,4^{\circ}\text{C}$ . Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% – 86% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang

relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

d. Kependudukan dan tenaga kerja

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Kota Malang terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. Tersebar di 5 Kecamatan yaitu kecamatan Klojen, kecamatan Blimbing, kecamatan Kedungkandang, kecamatan Sukun, dan kecamatan Lowokwaru.

**Tabel 3.1.1** Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2010, 2014, dan 2015  
**Table 3.1.1** Population and Population Growth Rate by Subdistrict in Malang Municipality, 2010, 2014, and 2015

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Penduduk (ribu) Population (thousand)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kedungkandang	174 477	183 927	186 068	1,29	1,16
2 Sukun	181 513	188 545	190 053	0,92	0,80
3 Klojen	105 907	104 590	104 127	-0,34	-0,44
4 Blimbing	172 333	176 845	177 729	0,62	0,50
5 Lowokwaru	186 013	192 066	193 321	0,77	0,65
<b>Kota Malang</b>	<b>820 243</b>	<b>845 973</b>	<b>851 298</b>	<b>0,75</b>	<b>0,63</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035

Source : Indonesia Population Projection 2010–2035

**Gambar 4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Malang, 2010, 2014, dan 2015**

*Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2016*

Diketahui berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 – 2015 menurut kecamatan di Kota Malang yaitu pada kecamatan Kedungkandang, kecamatan Sukun, kecamatan Klojen, kecamatan Blimbing, dan kecamatan Lowokwaru. Jumlah penduduk pada tahun 2015, diketahui kecamatan Kedungkandang memiliki 186.068 jiwa, kecamatan Sukun memiliki 190.053 jiwa,

kecamatan Klojen memiliki 104.127 jiwa, kecamatan Blimbing memiliki 177.729 jiwa, dan kecamatan Lowokwaru memiliki 193.321 jiwa.

Diketahui jumlah pencari kerja pada tahun 2014 yang terdaftar sebanyak 26.703 orang pencari kerja laki-laki dan perempuan sebanyak 22.446 orang. Sementara jumlah lowongan kerja yang tersedia 2.003 orang. Hal tersebut membuktikan masih terjadi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia.

**Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK dan TPT, 2006–2014**

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Angkatan Kerja (orang)	392 500	427 177	413 933	431 403	423 631
Bekerja (orang)	358 415	404 992	382 126	398 094	393 050
Pengangguran (orang)	34 085	22 185	31 807	33 309	30 581
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja - TPAK ( % )	63,81	66,03	64,26	66,44	63,66
Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT (%)	8,68	5,19	7,68	7,72	7,22

Sumber : Sakernas 2006-2014

**Gambar 5 Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, Pengangguran, TPAK, dan TPT, 2010-2014**

*Sumber: Kota Malang Dalam Angka 2016*

Kesenjangan antara lowongan kerja dengan jumlah pencari kerja menyebabkan terjadinya fenomena pengangguran. Pengangguran masih menjadi masalah di Kota Malang. Dibuktikan pada tabel diatas, pada tahun 2014, jumlah pengangguran di Kota Malang sebanyak 30.581 orang/jiwa.

**e. Ekonomi**

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja dari suatu wilayah antara lain dengan melihat seberapa besar nilai tambah yang diberikan oleh faktor-

faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi tersebut umumnya disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan besaran PDRB tersebut dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pendekatan produksi, dari seluruh faktor produksi tersebut dinilai berdasarkan atas harga tahun berjalan/berlaku dan atas harga dasar pada tahun dasar (konstan) tertentu. Tahun yang digunakan sebagai tahun dasar perhitungan adalah tahun 2010.

Pada hasil perhitungan, besaran nominal PDRB atas dasar berlaku pada tahun 2014 sebesar 20.543.001,92 (Juta Rp), sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 11.380. 769,92 (Juta Rp). Sektor yang memberikan andil cukup signifikan secara berurutan adalah sektor Industri Pengolahan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Angkutan dan Komunikasi. Salah satu indikator lain yang dapat menggambarkan kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan, dimana keadaan ini dapat menggambarkan kenaikan jumlah produksi dengan menghilangkan faktor perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2014 adalah 5,98 %. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (7,12%), Hotel dan Restoran (6,68%), Bangunan (0,28%), Jasa-jasa (5,79%), Industri Pengolahan (5,41%),

Angkutan dan Komunikasi (4,0 %), dan Listrik, Gas dan Air Bersih (3,54%).

Berdasarkan penjelasan tersebut kemajuan pertumbuhan ekonomi Kota Malang melalui sektor diantaranya, sektor yang memberikan andil cukup signifikan secara berurutan adalah Sektor Industri Pengolahan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Angkutan dan Komunikasi.

f. Visi dan Misi Kota Malang

1. Visi: Terwujudnya Kota Malang yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan.

Mandiri, artinya bahwa kedepan Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber daya lokal (SDA, Potensi Daerah SDM yang dimiliki). Berbudaya, artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tetap mengedepankan nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Kota Malang dan mengembangkan pendidikan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Malang menuju Kota Metropolitan. Sejahtera, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Malang kesemuanya di arahkan pada kesejahteraan masyarakat kota, baik secara materiil maupun spiritual. Berwawasan Lingkungan, artinya bahwa pelaksanaan pembangunan



yang dilaksanakan tetap berupaya menjaga kelestarian alam dan kualitas lingkungan serta pemukiman Kota Malang.

**2. Misi:**

- a) Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan.
- b) Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota.
- c) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya, yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang.
- d) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigm pembangunan berdasarkan pada wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia dan keadilan sosial.
- e) Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang

pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat.

- f) Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis strategis, dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

## **2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang**

Dinas Sosial Kota Malang melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Kota Malang mengacu pada Peraturan Wali Kota Malang Nomor 55 tahun 2012. Dinas sosial dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi nya memberikan standar pelayanan minimum terkait masalah-masalah kesejahteraan sosial, membantu meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, membantu meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan

NAPZA, korban tindak kekerasan, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan beberapa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Dinas Sosial Kota Malang melalui tiga bidang strategi yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan Dan Perlindungan Sosial melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan di masyarakat.

Dinas Sosial Kota Malang mulai berdiri sendiri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tanggal 18 Desember 2012. Sedangkan berdiri sebagai sebuah dinas, instansi ini masih menyatu dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial sebagai sebuah bidang kerja. Setelah dirasa masalah-masalah terkait kesejahteraan sosial muncul dengan akibat yang semakin kompleks maka melalui proses rapat dengan DPRD dan seluruh SKPD di Kota Malang akhirnya Dinas Sosial yang sebelumnya dalam bentuk bidang akhirnya berdiri sendiri sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang.

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Malang

1) Visi

Terwujudnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sejahtera dan bermartabat.

2) Misi

a) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b) Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat .
- c) Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

1) Tugas Pokok

Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang berkaitan dengan program Desaku Menanti.

2) Fungsi Dinas Sosial Kota Malang

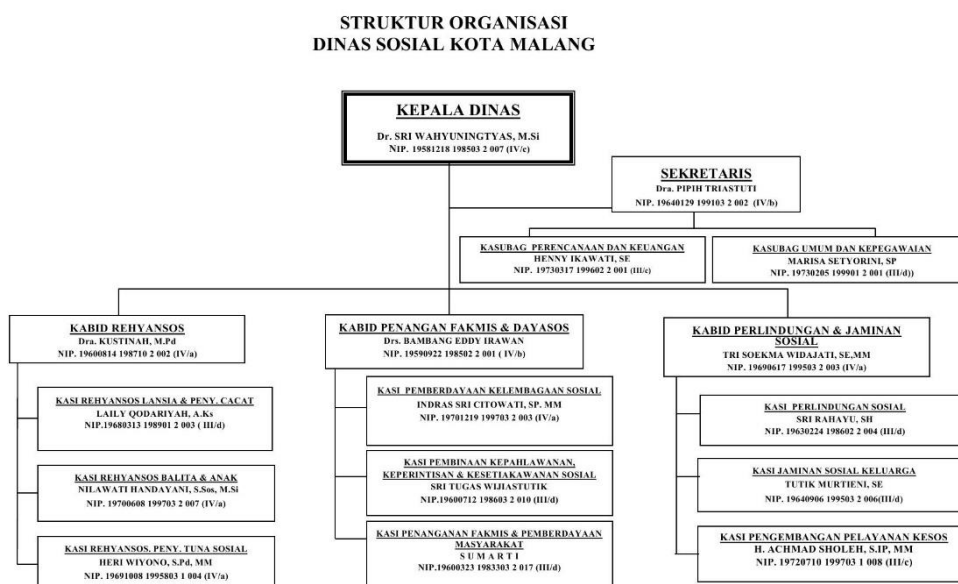
- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
- c) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
- d) Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- e) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- f) Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;

- g) Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
- h) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- i) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
- j) Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
- k) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
- l) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- m) Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
- n) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;

- o) Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
- p) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- t) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- u) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- v) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- w) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- x) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;

- z) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- aa) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- bb) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- cc) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

### c. Struktur Organisasi



**Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang.**

*Sumber: dinsos.malangkota.go.id, 11 April 2018*

### 3. Gambaran Umum Lembaga Kesejahteraan Sosial “Mutiara Insani”

Lembaga Kesejahteraan Sosial (untuk selanjutnya disebut dengan LKS) Mutiara Insani, didirikan pada tanggal 19 Agustus 2015 di kota Malang. Kantor LKS yang bertempat di jalan Sufelir nomor 22, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dipercaya untuk terlibat dalam program rehabilitasi sosial Desaku Menanti dengan alasan:



- a. Aktif dan terlibat dalam penganan gelandangan pengemis.
- b. Telah melakukan pelayanan, rehabilitasi, dan pendampingan bagi gelandangan pengemis.
- c. Memenuhi persyaratan administrasi.
- d. Memiliki tenaga petugas dan pendamping.

Adapun visi dan misi dari LKS Mutiara Insani ialah:

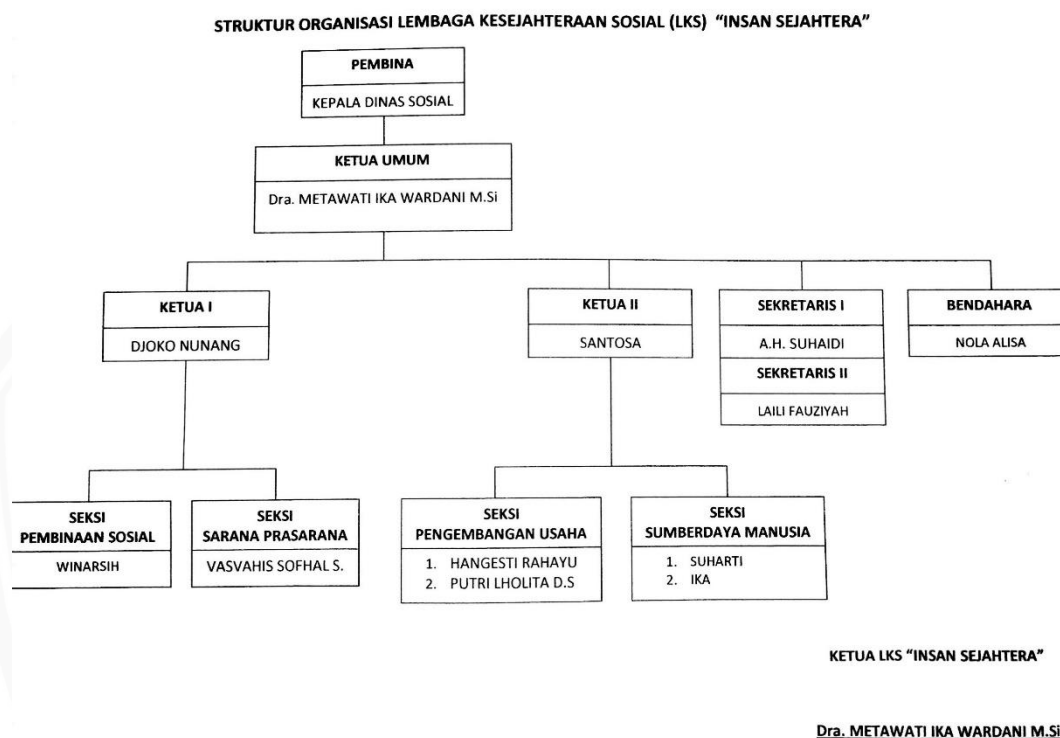
a. Visi

- 1) Terwujudnya Lembaga Kesejahteraan Sosial terunggul di seluruh Indonesia
- 2) Mengubah tatanan kehidupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pembekalan keterampilan (*life skill*) berwawasan global di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Misi

- 1) Memberikan pendidikan keagamaan untuk meningkatkan iman dan tawa bertujuan memberikan kesadaran merubah tatanan kehidupan sesuai fitrahnya menjadikan insan yang mulia dan mandiri.
- 2) Memberikan pelatihan keterampilan atau life skill dan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi pendapatan keluarga
- 3) Memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mencetak jiwa wirausaha (entrepreneur) dan menjadi usaha mandiri yang produktif
- 4) Memberikan layanan dan pengawasan asuhan bagi anak dan keluarga didalam wadah LKS Mutiara Insani

- 5) Memberikan bimbingan belajar bagi anak keluarga LKS Mutiara Insani dan bertujuan meningkatkan prestasi sekolah dan dapat meraih target generasi emas bagi anak Indonesia.



**Gambar 7 Struktur Organisasi LKS Mutiara Insani**

*Sumber: Data Sekunder, LKS Mutiara Insani*

## B. Penyajian Data Fokus

### 1. Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi

#### Sosial melalui Program Desaku Menanti.

- a. Bentuk Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program Desaku Menanti.

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial mengembangkan sebuah model rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis terpadu berbasis desa yang diberi nama program “Desaku Menanti”. Program Desaku Menanti merupakan program rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis yang dilakukan terpadu berbasis desa dengan menekankan pengembalian mereka ke daerah asal atau re-migrasi. Program Desaku Menanti merupakan alternatif penanganan yang ditawarkan dengan maksud untuk memberikan sentuhan baik sebelum menjadi gelandangan dan pengemis, setelah menjadi gelandangan dan pengemis, dan pemberdayaan di kampung halaman (desa). Program ini tidak hanya menyentuh aspek rehabilitatif saja, tetapi juga memperhatikan aspek preventif, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Kegiatan program desaku menanti berfokus pada penanganan keluarga gelandangan dan pengemis termasuk di dalamnya anak, dan orang tuanya. Untuk itu dukungan terbesar dari keberhasilan program ini adanya ketersediaan potensi dan sumber yang ada di desa dimanfaatkan secara optimal.

Program Desaku Menanti adalah program terobosan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang ada, baik yang sifatnya rehabilitatif, preventif, maupun suportif, dilakukan secara bersamaan, simultan, dan berkesinambungan. Mengingat program ini adalah uji coba

pengembangan model, untuk keberlanjutannya (*sustainability*), diharapkan pada tahap replikasi dapat mengadvokasi pemerintah daerah supaya program ini ke depan dapat dibiayai dengan menggunakan APBD. Untuk tahun pertama, kegiatan akan difokuskan pada rehabilitasi sosial untuk para gelandangan dan pengemis. Untuk tahun kedua, kegiatan masih akan difokuskan pada rehabilitasi sosial yang sifatnya pengembangan, bagi para gelandangan dan pengemis di lingkungan desaku menanti.

Program 'Desaku Menanti' merupakan salah satu upaya dari Kementerian Sosial RI untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia. Program Desaku Menanti diresmikan di Kota Malang pada tanggal 25 Maret 2016 dan telah direalisasikan pada tanggal 12 Agustus 2016 di Kampung Kesetiakawanan Sosial Margo Mulyo Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Program Desaku Menanti menampung warga yang berlatar belakang pengemis dan pengamen, tercatat sekitar ada 40 Kartu Keluarga yang terdiri atas 180 jiwa.

Program 'Desaku Menanti' dimaksudkan untuk penanganan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan secara komperhensif dengan mengedepankan keterpaduan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Tujuan dari program 'Desaku Menanti' yaitu mengembalikan gelandangan dan pengemis dari daerah kota ke daerah asal melalui rehabilitasi sosial terpadu, sehingga mereka dapat mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial selama ini dilakukan di kota-kota besar melalui panti-panti gelandangan pengemis milik

Kementerian Sosial maupun Pemerintah Daerah. Namun demikian, jumlah gelandangan dan pengemis tidak berkurang secara signifikan. Rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dalam paradigma baru diharapkan tidak lagi mengandalkan bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah namun lebih mengoptimalkan sumber-sumber atau potensi yang ada di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Sosial menciptakan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan secara terpadu di daerah asal gelandangan dan pengemis, serta difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan kontrol sosial masyarakat.

#### 1) Penjangkauan dan pemulangan gelandangan dan pengemis

Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana untuk pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal. Gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan adalah hasil dari operasi yutisi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan satuan polisi pamong raja ataupun mereka yang sudah keluar dari panti-panti rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis milik pemerintah. Dalam pemulangannya, Kementerian Sosial berkoordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Dinas/Instansi Sosial di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Proses penjangkauan dan pemulangan gelandangan dan pengemis di Kota Malang, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial selaku dinas yang akan bertanggung jawab dalam

menentukan keluarga yang menjadi sasaran program Desaku Menanti. Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Malang, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu Mutiara Insani bekerja sama dalam melaksanakan proses penjangkauan gelandangan dan pengemis yang berasal dari Kota Malang sebagai sasaran program desaku menanti. Hal ini didukung dengan wawancara dari Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, yang menyatakan:

“Proses penjangkauan gelandangan dan pengemis yang merupakan calon Warga Binaan Sosial Desaku Menanti dilakukan oleh beberapa *stakeholder* yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Kota, juga LKS Mutiara Insani. Kementerian Sosial selaku pemberi anggaran, dan Dinas Sosial merupakan lembaga yang bertanggung jawab terlaksananya program ini di Kota Malang, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani sebagai pelaksana dan Lembaga yang juga langsung melakukan MoU dengan Kementerian Sosial.”

Program desaku menanti diresmikan di Kota Malang pada tanggal 26 Maret 2016 dan telah direalisasikan pada tanggal 12 Agustus 2016 di Kampung Kesetiakawanan Sosial Margo Mulyo Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Sedangkan, penjangkauan calon warga binaan sosial Desaku Menanti dilakukan pada tahun 2015 dan dilakukan dengan sosialisasi dan pendaftaran calon Warga Binaan Sosial. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dias Sosial, Ia mengatakan:

“Jadi kita, saya dan teman-teman pekerja sosial lainnya sudah melakukan penyeleksian bagi calon Warga Binaan Sosial Desaku Menanti sekitar bulan Agustus-Desember tahun 2015.

Kemudian, setelah warga sudah menjadi daftar calon warga binaan sosial desaku menanti, mereka diberikan pelatihan-pelatihan maupun bimbingan untuk persiapan menjalankan kehidupan baru yang tidak lagi bisa menggelandang dan mengemis. Pelatihan dan bimbingan dilaksanakan saat pembangunan dilakukan. Warga pun diikutsertakan dalam proses pembangunan didampingi oleh pekerja profesional.”

Program desaku menanti menampung warga yang berlatar belakang gelandangan, pengemis, dan keluarga yang mencapai taraf hidup miskin. Tercatat sekitar 40 KK yang terdiri dari 180 jiwa dan didominasi oleh anak-anak. Sasaran yang diutamakan dalam penjangkauan warga binaan sosial desaku menanti yaitu gelandangan dan pengemis yang merupakan warga asli Kota Malang. Hal tersebut didukung juga oleh hasil wawancara penulis dengan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani yang dipercaya sebagai LKS yang ikut terlibat dalam pemberdayaan Warga Binaan Sosial Desaku Menanti:

“Program desaku menanti diambil ataupun diadopsi oleh pemerintah kota malang melalui dinas sosial kota malang bertujuan dalam penuntasan kemiskinan PMKS di Kota Malang. Warga binaan sosial desaku menanti harus merupakan warga kota malang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Malang. Tempat yang menjadi sasaran utama dalam penjangkauan Warga Binaan Sosial Desaku menanti yaitu yang pertama di jalan putra yudha 1, kelurahan tanjungrejo, kecamatan sukun. Tempat kedua yaitu di bantaran sungai muharto, kelurahan kota lama, kecamatan kedungkandang. Beberapa tempat juga yang terpencar yang kami jadikan sasaran yaitu salah satunya di Gadang. Lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi kantong-kantong kemiskinan yang memang profesi warga disana sebagai pemulung, gelandangan, pengemis, juga memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni, tumbuh dan berkembangnya anak-anak disana.”



Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penjangkauan gelandangan dan pengemis pada program desaku menanti ditujukan bagi warga asli Malang sebanyak 40 KK yang memang berada di garis kemiskinan dan memiliki pekerjaan gelandangan dan pengemis. Proses penjangkauan dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember tahun 2015. Penjangkauan calon Warga Binaan Sosial Desaku Menanti ditujukan di beberapa lokasi yang memang merupakan daerah kumuh di Kota Malang, yaitu bantaran sungai Muharto, kelurahan Kota Lama, kecamatan Kedungkandang, dan kelurahan Tanjungrejo, kecamatan Sukun.

## 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial

Para gelandangan dan pengemis yang lolos seleksi dan persyaratan, diberikan bimbingan fisik, mental, dan sosial. Bimbingan fisik diarahkan pada tuntunan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin, agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalu sehat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, yaitu:

“Pendampingan dalam merubah pola hidup menjadi pola hidup bersih sudah dilaksanakan. Kami memberikan bimbingan pola hidup bersih karna dirasa hal tersebut sangat penting dilakukan. Kebiasaan hidup dengan serba keterbatasan menyebabkan para warga binaan sosial tidak mementingkan kebersihan. Hal ini juga sebagai upaya menjadikan Desaku Menanti sebagai desa wisata yang mengharuskan kebersihan untuk kenyamanan wisatawan. Pembangunan toilet umum, dan menyediakan air bersih adalah salah satu yang diupayakan. Bimbingan untuk selalu menjaga lingkungan, penyuluhan pengelolaan sampah, serta menjaga penampilan juga telah dilaksanakan.”

Bimbingan fisik ditujukan untuk upaya kesehatan, kebersihan baik warga binaan sosial maupun desaku menanti dilakukan dengan berbagai hal. Selain dilakukan melalui bimbingan pola hidup bersih dan fasilitas penunjang lainnya, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan untuk para warga binaan sosial. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial, Ia mengatakan:

“Salah satu upaya bimbingan fisik untuk upaya meningkatkan tingkat kesehatan para warga binaan sosial, kita lakukan bekerjasama dengan puskesmas. kita datangkan puskesmas untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan sosial.”

Bimbingan mental diarahkan pada tuntunan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, dengan belajar tentang keagamaan, cara berpikir positif dan keinginan untuk berprestasi. Namun, merubah mental yang terbangun di jalan terbelang tidak mudah. Maka dari itu, bimbingan mental terus diupayakan dan menjadikan hal yang harus terus dilakukan. Bimbingan mental dilakukan dari berbagai pihak yang memang ahli dalam bidangnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Tidak luput juga kami memberikan bimbingan mental sebagai salah satu hal yang sangat penting dilakukan. Bimbingan mental kami lakukan bekerjasama dengan akademisi jurusan psikologi dari beberapa universitas. Universitas yang ikut berkontribusi dalam pembentukan mental warga binaan sosial beberapa diantaranya yaitu UIN Malang, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Gajayana. Karna berhadapan dengan kondisi

WBS yang sudah memiliki mental puluhan tahun yang dibangun di jalan terbelah tidak mudah. Merubah atau memperbaiki karakter dan budaya tersebut harus didampingi oleh ahlinya. Tanpa adanya kerjasama dengan akademisi, salah satu nya dengan jurusan psikologi dalam upaya bimbingan mental para wbs maka akan sangat sulit pemberdayaan akan berkelanjutan. Bimbingan mental yang juga penting yaitu dari segi keagamaan yang memang masih minim di lingkungan para warga binaan sosial. Sarana prasarana seperti musholla, dan perlengkapannya juga sudah diberikan. Namun, masih kurangnya antusias serta partisipasi warga binaan sosial dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan masih tertanamnya mindset pada warga binaan sosial yang mementingkan imbalan pada setiap kegiatan, masih kurangnya kesadaran. Namun, tidak saja untuk orang tua, penanaman nilai-nilai agama kita lakukan juga untuk anak-anak. Dengan harapan mereka tidak mengikuti jejak orangtua nya untuk turun ke jalan.”

Bimbingan sosial diarahkan pada tantanan kerukunan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Upaya bimbingan sosial juga sudah dilakukan melalui pekerja sosial dinas sosial. Pendampingan selalu dilakukan dengan menempatkan pekerja sosial di desaku menanti untuk terus mengetahui perubahan-perubahan maupun konflik yang terjadi. Berbagai cara dalam pendampingan sosial dilaksanakan dalam bentuk *one on one, family to family* ataupun secara keseluruhan. Namun bimbingan dalam hal ekonomi masih menjadi fokus yang diutamakan dalam memberdayakan warga binaan sosial Desaku Menanti. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial Dinas Sosial Kota Malang, Ia mengatakan:

“Bimbingan sosial melalui pekerja sosial Dinas Sosial dilakukan setiap hari, karna memang kita difokuskan dan ditempatkan disana. pekerja sosial melakukan berbagai cara dalam melakukan bimbingan yang dirasa memang efektif yaitu *family to family*, *one on one* karena memang setiap keluarga maupun individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun ada juga yang memang diberikan secara berbarengan dan oleh beberapa tenaga yang ahli dalam menangani psikis mereka, seperti: ulama, psikolog, ataupun women crisis center. Tapi memang yang paling kita fokuskan saat ini yaitu ekonomi, karna menurut kami, menata mental harus beriringan dengan upaya kelayakan ekonomi. Karna jika tidak seperti itu, kemungkinan untuk turun lagi ke jalan besar”

Upaya bimbingan baik fisik, mental, dan sosial harus dilakukan secara terus menerus. Karna pembangunan sosial tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cenderung singkat. Perlu adanya pendampingan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dengan meningkatnya rasa tanggung jawab sosial, kerukunan, rasa syukur, dan tidak saling iri hati. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak HR selaku koordinator warga Desaku Menanti yang mengatakan:

“Warga disini masih banyak yang tidak mendukung satu sama lain. Padahal seharusnya jika ada warga ataupun tetangga yang berhasil dengan pekerjaannya, didukung maupun dicontoh. Namun tidak bagi warga disini. Mereka terkadang masih iri hati. Jika ada tetangga yang mulai baik secara finansial, terkadang digunjing atau menjadi omongan warga kemudian warga yang menggunjing membuat kelompok sendiri. Rasa iri nya masih besar disini”.

Mengubah mental warga binaan sosial yang memang sebagian besar hidup dijalan bukanlah hal yang mudah. Adanya sifat-sifat iri hati, tidak bersyukur masih menonjol dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu

diperkuat oleh perkataan Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial,

Ia mengatakan:

“Disana yang paling terlihat yaitu rasa bersyukur warga yang kurang, dan iri hati terhadap sesama. Masih ada warga yang memang tidak suka apabila usaha warga lain ataupun tetangganya semakin lama semakin baik. Kemudian rasa bersyukur mereka juga masih sangat kurang, contohnya apabila ada bantuan yang memang kita berikan dan sudah ita hitung kecukupan sembako tersebut, mereka akan tetap minta lagi. Padahal sembako dan listrik sudah kita anggarkan untuk 12 bulan. Bahkan ada warga yang diberikan baju tapi digadaikan. Dan sudah bukan rahasia lagi kalo sembako yang kita berikan sebagian mereka jual. Padahal tujuan kita agar hidup mereka bisa baik dan terjamin selama menjadi warga binaan sosial. Mental-mental yang seperti itu yang memang sampai saat ini terus kita upayakan agar berubah menjadi lebih baik.”

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan fisik, mental, maupun sosial telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan didukung oleh beberapa *stakeholder* lainnya. Salah satu *stakeholder* yang mengupayakan keberhasilan program yaitu dari pihak akademisi. Namun, upaya bimbingan fisik, mental, dan sosial harus terus dilakukan dan diadakan pendampingan. Merubah mental warga binaan sosial yang awal mula nya bekerja sebagai gelandangan dan pengemis bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu pendampingan secara terus menerus harus terus dilakukan melalui peran pemerintah, LKS, akademisi, maupun masyarakat.

### 3) Bimbingan Keterampilan

Para gelandangan dan pengemis yang menjadi warga binaan Desaku Menanti kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai

minat dan bakatnya di Rumah Kerja Desaku Menanti (RDKM). Biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*cost sharing*). Saat ini, Dinas Sosial Kota Malang memprioritaskan bimbingan keterampilan ekonomi keluarga. Bimbingan keterampilan tidak saja dilaksanakan oleh Dinas Sosial maupun LKS Mutiara Insani. Namun, bimbingan keterampilan diberikan langsung oleh ahli-ahli pada bidang yang ingin diajarkan. Hal ini dibutuhkan agar ilmu yang didapat bisa sesuai standard kebutuhan masyarakat atau penyedia lapangan pekerjaan. Bimbingan keterampilan yang dilaksanakan merupakan kerjasama dari berbagai stakeholder yaitu Dinas Sosial, LKS Mutiara Insani, dan Dunia Usaha. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak DJN selaku waki ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“untuk sementara, Dinas Sosial memprioritaskan pemberdayaan dengan memberikan bimbingan keterampilan ekonomi keluarga. Warga binaan sosial diberikan pelatihan dan diberdayakan pada Bengkel Rumah Kerja Desaku Menanti dengan melakukan kegiatan mengolah makanan ringan, seperti rempeyek, dan lain-lain. Minimal Warga Binaan Sosial dapat memiliki pemasukan setiap harinya. Memberikan keterampilan pada wbs kita upayakan dengan memperluas jaringan dengan dunia usaha sehingga WBS mendapatkan pelatihan langsung oleh ahli dari bidang keterampilan tersebut”

Sebagai bentuk kerjasama antara pihak-pihak yang ikut serta dalam memberikan bimbingan keterampilan, pemberdayaan tidak saja dilakukan di Kampung Desaku Menanti ataupun kantor Dinas Sosial. Beberapa pelaksanaan bimbingan keterampilan juga dilaksanakan di perusahaan-perusahaan makanan ringan. Hal tersebut didukung oleh



pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Pelaksanaan bimbingan keterampilan tidak saja dilaksanakan di Desaku Menanti, namun juga tempat lain. Beberapa tempat yang digunakan dalam melaksanakan bimbingan keterampilan misalnya pada perusahaan-perusahaan makanan ringan. Kemudian, contoh lainnya yaitu pada saat pelatihan penjahitan bordir yang dilaksanakan di balai latihan kerja, ataupun UPT-UPT Dinas Sosial Provinsi. Segala sarana prasarana yang diberikan tersebut didukung oleh Dinas Sosial Kota Malang.”

Bagi mereka yang telah lulus pelatihan keterampilan akan diberikan bantuan stimulan untuk modal usaha sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya ataupun dirujuk ke tempat kerja bila dimungkinkan. Namun demikian mereka diharuskan menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis lagi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak HR sebagai salah satu warga binaan sosial Desaku Menanti, Ia mengatakan:

“Warga telah mendapatkan berbagai macam pelatihan seperti pelatihan bengkel, pelatihan tata boga, salon, dan sebagainya. Modal juga telah diberikan, namun memang warga masih belum dapat mengelola modal tersebut. Modal yang diberikan berkali-kali seringkali habis begitu saja. Padahal nominal modal cukup besar mba, 60 juta dibagi untuk 30 KK”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan keterampilan sudah diupayakan dengan sangat baik. Kerjasama berbagai *stakeholder* untuk mendukung keberhasilan bimbingan keterampilan juga sudah diupayakan. Stakeholder yang ikut



terlibat dalam pelaksanaan bimbingan keterampilan, diantaranya pemerintah, swasta, LKS, akademisi/universitas. Pelaksanaan bimbingan keterampilan dilakukan oleh ahli dibidang-bidang keterampilan yang diberikan. Pelatihan juga tidak saja dilaksanakan di Desaku Menanti ataupun kantor Dinas Sosial, namun juga dilaksanakan di berbagai tempat dunia usaha. Para sektor yang terlibat telah melakukan peran yang sangat baik dalam mengupayakan tujuan kemandirian warga binaan sosial. Modal usaha juga sudah diberikan untuk mendukung bimbingan yang telah diberikan kepada warga binaan sosial sehingga bisa membuka usaha sebagai lapangan pekerjaan.

#### 4) Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif

Karakteristik gelandangan dan pengemis memang beragam. Ada diantara mereka yang membutuhkan pelatihan keterampilan, namun ada juga dari mereka yang membutuhkan modal untuk usaha. Penerimaan manfaat yang hanya butuh modal untuk usaha dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan melalui 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota juga akan mendapatkan bantuan stimulan langsung. Bantuan ini berupa bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) yang jenis bantuannya disesuaikan dengan minat, bakat, dan pangsa pasar di daerah setempat. Bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan modal usaha juga harus menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis

lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Sejak awal, modal untuk warga binaan sosial desaku menanti memang sudah menjadi anggaran dari program ini. harapannya dengan adanya pelatihan keterampilan seperti pembuatan telur asin, rempeyek, antari, dan lain sebagainya juga didukung oleh pemberian modal sebagai awal membuka usaha dapat menjadikan warga binaan sosial lebih mandiri dalam pekerjaan. Kita yakin dengan usaha seperti demikian akan ada warga binaan sosial yang berhasil dan berkesinambungan dengan usaha yang dijalankan.”

Bantuan modal diberikan kepada seluruh warga binaan sosial desaku menanti berjumlah 40 KK. Pemberian modal untuk menunjang usaha ekonomi produktif, diberikan sejumlah 5 juta untuk setiap Kepala Kueuarga. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak VVS selaku pekerja sosial desaku menanti, Ia mengatakan:

“Para warga binaan sosial juga mendapatkan uang ataupun bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Mereka mendapatkan uang sebesar 5 juta dan bbisa dipergunakan untuk apa saja. Uang 5 juta dibagikan per-Kepala Keluarga”

Namun pemanfaatan modal yang diberikan masih belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh para warga binaan sosial desaku menanti. Masih banyak warga yang tidak bisa mengelola modal yang diberikan sehingga habis dengan sia-sia. Masih banyak warga yang tidak memiliki usaha setelah modal tersebut telah diberikan. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Bapak HR selaku warga binaan sosial desaku menanti, Ia mengatakan:

“Modal sudah diberikan kepada warga binaan sosial desaku menanti. namun, warga sini memang masih belum bisa memanfaatkan modal tersebut dengan baik. Ada beberapa warga yang memang modalnya habis begitu saja. Beberapa kali dikasih modal namun usaha nya tidak jalan. Karna memang untuk membuka lapangan pekerjaan dan lokasi yang jauh menjadi hambatan utama yang dirasakan warga.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian modal sudah dilakukan melalui dana yang telah dianggarkan dalam program desaku menanti. Namun, pemanfaatan modal belum bisa dilakukan dengan baik oleh sebagian warga binaan sosial desaku menanti.

#### 5) Jaminan Hidup

Sementara gelandangan dan pegemis mengikuti layanan yang ada, otomatis mereka tidak bekerja (menggelandangn dan mengemis). Sebagai konsekuensinya mereka akan mendapatkan jaminan hidup (jadup) yang waktunya disesuaikan dengan situasi kondisi serta dana yang ada. Jaminan hidup bertujuan untuk membantu para warga binaan sosial dalam menata perekonomiannya. Jaminan hidup diberikan selama 3 bulan untuk 40 KK dengan jumlah 4 orang disetiap Kepala Keluarga. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial, Ia mengatakan:

“Setelah pembangunan diresmikan, warga binaan sosial diberikan jaminan hidup selama 3 bulan. Dengan pertimbangan, pergantian lokasi mereka ke daerah baru pasti membutuhkan pekerjaan yang baru dan bukan menggelandang ataupun mengemis. Jadi kita berikan jaminan hidup selama 3 bulan untuk mereka mencari ataupun membuka pekerjaan dan selama

ketidakstabilan itu hidup mereka selama 3 bulan dijamin oleh anggaran yang ada.”

Jumlah jaminan hidup yang diberikan kepada WBS Desaku Menanti yaitu tercatat 25 ribu untuk setiap KK dengan jumlah maksimal 4 jiwa. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak VVS selaku pekerja Dinas Sosial, Ia mengatakan:

“Jaminan hidup diberikan dalam bentuk uang, perjiwa yaitu 25 ribu, namun maksimal diberikan kepada 4 jiwa disetiap KK yang ada. Jadi hanya untuk, ayah, ibu, dan 2 orang anak. Jaminan hidup diberikan setiap hari dengan jumlah 100 ribu apabila terdapat 4 jiwa. Apabila anggota dalam keluarga itu lebih dari 4, tidak kita hitung karna dana yang ada memang terbatas dan hanya mencukupi demikian. Jika kurang dari 4 maka kita berikan kurang dari 4, sesuai keadaan.”

Jaminan hidup akan dihentikan ketika para penerima manfaat diperkirakan sudah hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada program Desaku Menanti Kota Malang, jaminan hidup diberhentikan setelah 3 bulan. Jaminan hidup dalam upaya rehabilitasi sosial sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial selaku pemilik anggaran berupa uang tunai. Jaminan hidup diberikan selama 3 bulan dan diberikan maksimal 4 jiwa pada setiap KK warga binaan sosial Desaku Menanti.

#### 6) Bantuan Stimulan

Layanan ini diberikan kepada mereka yang masuk dalam kategori usia produktif, dianggap mempunyai mental kuat untuk mengubah diri, diperkirakan tidak mempunyai kerabat di desa, dan membutuhkan lingkungan tempat tinggal baru. Mereka yang serius

mengikuti program Desaku Menanti akan dibangun rumah sederhana yang layak ditempati di daerah asalnya. Program Desaku Menanti Kota Malang, membangun rumah sebanyak 40 beserta fasilitas seperti musholla, wc umum, Rumah Kerja Desaku Menanti bertempat di Desa Kesetiakawanan Margo Mulyo, Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandag. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak VVS selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Ia mengatakan:

“Bantuan stimulan diberikan dalam bentuk fasilitas desa itu sendiri. dalam proses pembangunan desa, mereka diikutsertakan karna nantinya mereka akan menempati rumah tersebut. Namun, dalam pelaksanaan tetap diarahkan pekerja profesional. Bantuan stimulan yang diberikan yaitu rumah sebanyak 40 unit, wc umum, Rumah Kerja Desaku Menanti, Musholla, dsb. Anggaran yang diberikan memang hanya cukup untuk membangun rumah dan kamar mandi yang dibikin menjadi WC umum.”

Rumah yang sudah dibangun, menjadi fasilitas yang dapat digunakan oleh para warga binaan sosial Desaku Menanti. Para WBS memiliki hak pakai dalam pemanfaatan fasilitas yang ada. Rumah yang dibangun tidak menjadi milik WBS, hal tersebut bertujuan untuk keberlangsungan program. Program desaku menanti diharapkan bisa terus berkelanjutan dan dirasakan oleh PMKS Kota Malang yang lain. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak DJN selaku Wakil Ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Rumah yang dibangun tidak untuk diberikan sepenuhnya kepada warga binaan sosial Desaku Menanti, mereka memiliki hak untuk menempati rumah tersebut namun bukan hak memiliki. Karna tanah yang ada memang milik pemerintah

sehingga tidak bisa menjadi milik WBS. Harapan kami, program ini hanya menjadi shelter bagi mereka untuk bisa mandiri, sehingga dapat memiliki rumah dan usaha sendiri dengan segala fasilitas dan pemberdayaan yang telah kita berikan. Sehingga nantinya sarana prasarana yang ada ingin kita berikan lagi kepada pmks yang lain agar program ini bisa berkelanjutan.”

Sebagai bentuk pelayanan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial menargetkan 5 tahun dalam mencapai kemandirian warga binaan sosial itu sendiri. Dinas Sosial memiliki target selama 5 tahun yaitu sebesar 5% warga sudah memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini dikatakan okeh Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial, yaitu:

“Target kita dalam upaya mencapai kemandirian warga binaan sosial yaitu 5 tahun, harapannya sebelum 5 tahun sudah ada yang bisa sukses. Kategori sukses disini jika mereka sudah bisa keluar dari sini memiliki pekerjaan yang layak dan ajeg untuk dikerjakan setiap hari dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga. Target dinas sosial sendiri yaitu sebesar 5% dari warga yaitu 5 orang warga sudah bisa keluar dan digantikan oleh PMKS yang lain. Harapannya ga hanya warga 40 KK itu saja, walaupun waktunya masih belum bisa ditentukan tapi setidaknya bisa kita gantikan 5% dari warga yang ada dengan warga lain yang membutuhkan”

Kegiatan ini untuk sementara dibiayai oleh Kementerian Sosial ataupun Dinas/Instansi Sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota, mengingat sifat program yang lingkupnya masih kecil bentuknya masih program ujicoba. Melalui bantuan perumahan ini diharapkan para gelandangan dan pengemis kembali memahami arti sebuah rumah yaitu simbol utama



dalam keluarga. Sehingga nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan juga dapat timbul dengan sendirinya.

Berdasarkan pemaparan hasil data diatas diketahui pembangunan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan bantuan stimulan telah dilaksanakan. Bantuan stimulan diberikan dalam bentuk rumah, serta fasilitas seperti wc umum, musholla, dan sarana prasarana lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh warga desaku menanti. Warga Binaan Sosial memiliki hak untuk menempati dan menggunakan segala fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada selama masih tercatat sebagai warga binaan sosial Desaku Menanti. Target Dinas Sosial yaitu sebesar 5% warga binaan sosial dalam waktu 5 tahun, warga binaan sosial dapat digantikan dengan PMKS lain yang memang membutuhkan dan menjadi sasaran dari program Desaku Menanti.

#### 7) Pengembalian Anak-Anak Gelandangan dan Pengemis Ke Sekolah.

Kegiatan ini merupakan upaya dalam mengembalikan anak-anak para warga binaan sosial desaku menanti ke sekolah. Program Desaku Menanti Kota Malang mencatat bahwa jumlah anak-anak mendominasi pada program yang dilaksanakan. Tercatat sebanyak lebih dari 100 jiwa yang masih termasuk kategori usia anak-anak. Pengembalian anak-anak warga binaan sosial dilakukan mulai tingkat SD sampai SMP. Kementerian Pendidikan membangun PAUD dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak VVS selaku pegawai Dinas Sosial, Ia mengatakan:



“untuk pengembalian anak-anak ke sekolah sudah berjalan sejak awal karna memang kita juga terbantu oleh ibu kepala dinas yang memang dulunya sempat menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Malang. Jadi alhamdulillah untuk upaya pendidikan tidak mengalami kesulitan. Saat ini juga sudah didirikan PAUD yang dibantu oleh kementerian pendidikan. PAUD sendiri bertujuan untuk menjangkau anak-anak dibawah umur, minimal mereka memiliki kegiatan dan belajar. PAUD sendiri dibimbing oleh guru dan difasilitasi dengan buku-buku bacaan. Sedangkan, untuk pendanaan sekolah tingkat SD-SMP tidak diberikan 100%.”

Anak-anak warga binaan sosial mendapatkan bantuan stimulan untuk kebutuhan biaya sekolah. Besarnya bantuan stimulan disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak HR selaku Warga Binaan Sosial Desaku Menanti, Ia mengatakan:

“Dinas Sosial memberikan bantuan untuk biaya anak-anak kembali ke sekolah. Memang tidak secara keseluruhan, namun apabila memang ada biaya yang dibutuhkan, Dinas Sosial membiayai 50% dari biaya yang dibutuhkan. Secara administratif, Dinas Sosial juga membantu untuk pendataan anak-anak agar bisa masuk sekolah”

Pendampingan juga melakukan advokasi ke lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal agar mau menerima anak kembali bersekolah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak DJN selaku Wakil Ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Pendidikan anak-anak untuk sekolah dasar bagi anak-anak warga binaan sosial Desaku Menanti dikatakan sudah mumpuni. Disana terdapat sekolah yang memang tidak jauh dari lokasi desa, untuk SD Negeri terdapat SD Wonokoyo 2, dan ada juga 2 sekolah madrasah Islamiah. Kita juga akan mencanangkan

program paket untuk anak-anak yang memang pernah putus sekolah untuk tetap mendapatkan pendidikan.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembalian anak-anak warga binaan sosial desaku menanti ke sekolah sudah dilaksanakana dengan baik. Dinas Sosial melakukan perannya baik dalam bidang administrasi maupun pendanaan. Pengembalian anak-anak ke sekolah dianggap penting sebagai upaya memutuskan rantai kemiskinan. Pendidikan yang mendapatkan fasilitas yaitu mulai dari Pendidikan Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

#### 8) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas.

Terbatasnya kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki gelandangan dan pengemis sangat berdampak pada ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pengelolaan aktifitas sosial ekonomi. Ketidakmampuan dalam mengkases sumberdaya sosial yang ada sesuai dengan pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Pemberdayaan yang dilakukan sudah baik, namun perlu adanya perluasan jejaring kepada pihak-pihak lain. Harapannya segala bentuk pemberdayaan dilakukan berkelanjutan tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pasar. Karna warga butuh penghasilan tetap dan stabil. Misal seperti jahit menjahit, olahan makanan, seni, dan sebagainya sebaiknya tidak dilakukan padat karya selagi adanya pesanan dan tidak berkepanjangan.”

Para penerima manfaat perlu difasilitasi agar mereka dapat menjangkau berbagai sistem sumber yang tersedia. Ketidakmapuan gelandangan dan pengemis dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan rentannya kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu dilakukan advokasi sosial untuk memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Advokasi Sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya mengembangkan dan memperkuat kestabilan ekonomi keluarga warga binaan sosial Desaku Menanti. Advokasi sosial dilakukan dengan menjangkau pasar yang memungkinkan sebagai upaya distribusi hasil kerja warga binaan sosial Desaku Menanti. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Ia mengatakan:

“Hambatan advokasi sosial yang kita hadapi yaitu pada awalnya apa yang mereka produksi, tidak bisa mereka pasarkan. Akhirnya Dinas Sosial membantu dalam hal advokasi sosial, Dinas Sosial mencari pasar yang bisa dimasukkan oleh produk-produk mereka. Misalnya: di BPJS, gor ken arok, gudang indomaret. Tapi sampai sekarang mereka belum mau untuk memasarkannya sendiri. akhirnya sampai saat ini masih kita yang memasarkan, bahkan terkadang dinas sosial juga yang membelinya.”

Adapun upaya dalam meningkatkan advokasi sosial, Dinas Sosial mencanangkan Desaku Menanti sebagai Kampung Wisata Topeng. Harapannya hasil yang ada dapat terbantu untuk dibeli oleh pengunjung wisata Kampung Topeng. Hal tersebut didukung oleh

pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial kota malang, yaitu:

“Awal mula berawalnya menjadikan Desaku Menanti sebagai Kampung Topeng yaitu dari hambatan yang kita hadapi, pada saat bersamaan Kota Malang juga sedang rame-rame nya dengan kampung tematik atau kampung wisata maka kita mencoba menerapkannya pada Desaku Menanti. Tujuan dari Kampung Topeng itu sendiri yaitu untuk mendatangkan pasar atau pembeli, sehingga usaha yang mereka kerjakan bisa berjalan dengan baik. Harapannya mereka tidak perlu jual keluar, pembeli yang datang langsung ke lokasi desaku menanti. tujuan itulah yang mendasari menjadikan Desaku Menanti menjadi Kampung Wisata Topeng.”

Upaya dalam penambahan wahana di kampung topeng itu sendiri terus dilakukan. Karna tempat yang cukup jauh menjadikan tugas tersendiri bagi Dinas Sosial untuk berperan lebih dalam meningkatkan wisata Kampung Topeng. Beberapa upaya sudah dilakukan maupun yang sedang direncanakan, diantaranya: *flying fox*, wahana *outbound*, dan sebagainya. Hal tersebut diharapkan akan berpengaruh pada ekonomi warga binaan sosial. Pejabaran tersebut selaras dengan perkataan Bapak VVS sebagai pekerja sosial Dinas Sosial yang mengatakan:

“Untuk kampung Desaku Menanti sendiri, kami terus berupaya dalam penambahan wahana-wahana wisata agar dapat menarik lebih banyak pengunjung. Kemarin sudah kita upayakan penambahan wahana *flying fox*, kemudian kita sedang mengupayakan pelengsengan terlebih dahulu agar tidak berbahaya bagi pengunjung. Karna kan kita tau kalo tanah disana sengkedan jadi kalo ujan terus menerus takut terjadi longsor, jadi kita utaakan pelengsengan terlebih dahulu. Selain itu, saya dan teman-teman juga sedang merancang wahana *outbound* yang targetnya siswa TK, dan SD. Saya juga inginnya disana ada event yang tari topeng yang dengan rutin

dilaksanakan misalnya 1 bulan dua kali. Karna kita juga sudah memiliki gamelan dan kostum untuk tari topeng untuk anak-anak. Kami juga sedang men-*desain* brosur kampung topeng yang bisa dibagikan di beberapa sekolah maupun tempat-tempat lainnya.”

Namun, menjadikan kampung topeng sebagai destinasi wisata yang terus layak dapat menarik untuk dikunjungi bukanlah hal yang mudah. Pengunjung kampung topeng terus menerus menurun. Dinas Sosial mengalami beberapa kendala yang sudah diamati. Hal tersebut dibuktikan oleh Dinas Sosial melalui penjualan tiket yang semakin lama semakin sedikit. Hal tersebut selaras dari pernyataan Bapak VVS sebagai pekerja sosial, Ia mengatakan:

“Sebenarnya agak lucu ya memang. Dari awal kita berdiri sampai sekarang penambahan yang dilakukan ya bisa dibilang begitu-begitu saja. Jadi, setelah peresmian kampung topeng pada tanggal 14 februari 2017, bulan maret-mei terbilang rame, menjelang bulan puasa sudah sepi. Perkiraan kami, hari raya idul fitri pengunjung itu rame namun ternyata malah kosong. Setelah kita upayakan membuat wahana *flying fox*, memang rame cuma hanya sebentar dan sekarang sudah sepi lagi. *Flying fox* rame itu pada bulan januari-februari, maret ini sudah sepi lagi. Kita bisa liat itu dari penjualan tiket. Dulu, penjualan tiket pada hari sabtu bisa mencapai 50, minggu lebih dari 100, dan tanggal merah bisa lebih dari 200. Tapi fenomena saat ini, hari biasa yang terjual hanya paling 1-2 tiket, sabtu minggu hanya 10-20 tiket.”

Berdasarkan hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa advokasi sosial sudah diupayakan oleh Dinas Sosial dengan membantu untuk memasarkan hasil olahan Rumah Kerja Desaku Menanti ke beberapa tempat baik pemerintah maupun swasta. Tidak hanya dengan upaya

memasarkan produk, namun menjadikan Desaku Menanti sebagai Kampung Topeng wisata juga merupakan usaha advokasi sosial. Tujuan dari Kampung Topeng itu sendiri, supaya Desaku Menanti bisa ramai dikunjungi dan adanya transaksi jual beli pada usaha para WBS Desaku Menanti. sampai saat ini usaha advokasi sosial untuk Desaku Menanti terus diupayakan dan berjalan.

b. Tahap-tahap Pemberdayaan menurut Sumodiningrat yang dikutip oleh Sulistiyani (2004:83)

1) Tahap penyadaran

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik

Tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dinas Sosial Kota Malang melalui program desaku menanti



melakukan tahapan penyadaran melalui proses penjangkauan dan bimbingan fisik, mental, dan sosial. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang, Ia mengatakan:

“Dalam tahapan pembentukan penyadaran, kita lakukan sosialisasi kepada para gelandangan dan pengemis. Dalam sosialisasi mereka beranggapan bahwa tempat tersebut akan dijadikan penampungan saja bagi gelandangan dan pengemis, hal tersebut menimbulkan kesan negatif, sehingga kami lakukan sosialisasi hingga 3 kali untuk menyampaikan tujuan dari program dan apa program desaku menanti itu sendiri. sebelum kami melakukan pendaftaran bagi warga yang memang ingin dan masuk dalam kriteria warga binaan sosial desaku menanti. karna memang tujuan kita tidak menjadikan mereka sebagai gelandangan dan pengemis lagi.”

Kemudian dalam tahapan penyadaran, pembangunan juga terus dilaksanakan. Pembangunan lokasi yang menjadi tempat tinggal dan pemberdayaan eks gelandangan dan pengemis. Beriringan dengan pembangunan yang dilaksanakan, eks gelandangan dan pengemis diberikan bimbingan mental, sosial, fisik dan juga keterampilan. Para warga binaan sosial desaku menanti juga diikutsertakan dalam proses pembangunan lokasi program desaku menanti. hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Desaku Menanti, Ia mengatakan:

“Jadi kita, saya dan teman-teman pekerja sosial lainnya sudah melakukan penyeleksian bagi calon warga binaan sosial desaku menanti sekitar bulan agustus-desember tahun 2015. Kemudian, setelah warga sudah menjadi daftar calon warga binaan sosial desaku menanti, mereka diberikan pelatihan-pelatihan maupun



bimbingan untuk persiapan menjalankan kehidupan baru yang tidak lagi bisa menggelandang dan mengemis. Pelatihan dan bimbingan dilaksanakan saat pembangunan dilakukan. Warga pun diikutsertakan dalam proses pembangunan didampingi oleh pekerja profesional.”

Bimbingan mental diupayakan oleh Dinas Sosial melalui Pekerja Sosial untuk terus berkelanjutan. Program desaku menanti memberikan bimbingan mental, fisik, dan sosial dengan memberikan pendampingan dan beberapa kegiatan yang didukung oleh stakeholder lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku pekerja Sosial Dinas Sosial, Ia mengatakan:

“dalam upaya menumbuhkan kesadaran bagi para gelandangan dan pengemis, kita mengupayakan bimbingan fisik, mental dan sosial yang sampai saat ini terus kita lakukan. Bimbingan mental dan sosial kita lakukan melalui pekerja sosial di dinas dengan melakukan pekerjaan lapangan di Desaku Menanti. itu tujuannya agar kita bisa tau perkembangan warga hari ke hari dan mencegah adanya konflik yang berkepanjangan. Bimbingan fisik kita lakukan kerjasama dengan puskesmas. bimbingan mental dan sosial juga ada yang dilakukan berbarengan dan oleh beberapa tenaga yang ahli dalam menangani psikis mereka, seperti: ulama, psikolog, ataupun women crisis center.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam tahapan penyadaran, program desaku menanti melakukan pada proses penjangkauan dengan mengadakan sosialisasi serta memberikan bimbingan fisik, mental, dan sosial bagi calon warga binaan sosial desaku menanti yang merupakan eks gelandangan dan pengemis. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga siap untuk tidak lagi menjadi gelandangan dan pengemis.

## 2) Tahap transformasi

Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Sementara gelandangan dan pegemis mengikuti layanan yang ada, otomatis mereka tidak bekerja (menggelandang dan mengemis). Sebagai konsekuensinya mereka akan mendapatkan jaminan hidup (jadup) yang waktunya disesuaikan dengan situasi kondisi serta dana yang ada. Jaminan hidup bertujuan untuk membantu para warga binaan sosial dalam menata perekonomiannya. Jaminan hidup akan dihentikan ketika para penerima manfaat diperkirakan sudah hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial, Ia mengatakan:

“Setelah pembangunan diresmikan, warga binaan sosial diberikan jaminan hidup selama 3 bulan. Dengan pertimbangan, pergantian lokasi mereka ke daerah baru pasti membutuhkan pekerjaan yang baru dan bukan menggelandang ataupun mengemis. Jadi kita berikan jaminan hidup selama 3 bulan untuk mereka mencari ataupun membuka pekerjaan dan selama ketidakstabilan itu hidup mereka selama 3 bulan dijamin oleh anggaran yang ada. Pada kondisi itu bisa dibilang sebagai tahap transformasi mereka, karna mereka sudah di bina kemudian diberikan kepercayaan berupa dana untuk bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Pada tahapan ini mereka masih belum stabil dan perlu banyak penyesuaian”

Tidak hanya jaminan hidup, dalam tahap transformasi para gelandangan dan pengemis yang menjadi warga binaan desaku menanti mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di Rumah Kerja Desaku Menanti (RDKM). Biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*cost sharing*).

Saat ini, dinas sosial Kota Malang memprioritaskan bimbingan keterampilan ekonomi keluarga. Bimbingan keterampilan tidak saja dilaksanakan oleh Dinas Sosial maupun LKS Mutiara Insani. Namun, bimbingan keterampilan diberikan langsung oleh ahli-ahli pada bidang yang ingin diajarkan. Hal ini dibutuhkan agar ilmu yang didapat bisa sesuai standard kebutuhan masyarakat atau penyedia lapangan pekerjaan. Bimbingan keterampilan yang dilaksanakan merupakan kerjasama dari berbagai stakeholder yaitu Dinas Sosial, LKS Mutiara Insani, dan Dunia Usaha. Penjelasan diatas sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial, Ia mengatakan:

“Karna dirasa mereka sudah harus mendapatkan keterampilan untuk menggantikan pekerjaan mereka yang sebelumnya yaitu menggelandangan dan mengemis. Maka tahapan transformasi ini kita juga lakukan dengan memberikan bimbingan keterampilan. Walaupun memang bimbingan ini juga sudah kita lakukan jauh sebelumnya namun ini merupakan upaya lanjutan. Untuk sementara, Dinas Sosial memprioritaskan pemberdayaan dengan memberikan bimbingan keterampilan ekonomi keluarga. Warga binaan sosial diberikan pelatihan dan diberdayakan pada Bengkel Rumah Kerja Desaku Menanti dengan melakukan kegiatan mengolah makanan ringan, seperti rempeyek, dan lain-lain. Minimal warga binaan sosial dapat memiliki pemasukan setiap harinya. Memberikan keterampilan pada wbs kita upayakan dengan memperluas jaringan dengan dunia usaha sehingga wbs mendapatkan pelatihan langsung oleh ahli dari bidang keterampilan tersebut”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan pada tahap transformasi, pemerian wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan diberikan dengan melakukan bimibingan keterampilan serta jaminan hidup. Jaminan hidup diberikan sebagai bantuan dalam tranfromasi keadaan gelandangan dan pengemis yang tidak lagi menggelandang dan mengemis, juga bimbingan keterampilan sebagai upaya kemandirian warga binaan sosial desaku menanti.

### 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi

didalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat akan dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan dilakukan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Para gelandangan dan pengemis sekiranya telah dianggap mampu dalam mengelola finansial dan mempergunakan keterampilan yang diberikan melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif.

Karakteristik gelandangan dan pengemis memang beragam. Ada diantara mereka yang membutuhkan pelatihan keterampilan, namun ada juga dari mereka yang membutuhkan modal untuk usaha. Penerimaan manfaat yang hanya butuh modal untuk usaha dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan melalui 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota juga akan mendapatkan bantuan stimulan langsung. Bantuan ini berupa bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) yang jenis bantuannya disesuaikan dengan minat, bakat, dan pangsa pasar di daerah setempat. Bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan modal usaha juga harus menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis

lagi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, yaitu:

“Sejak awal, modal untuk warga binaan sosial desaku menanti memang sudah menjadi anggaran dari program ini yaitu sebesar 5 juta per Kepala Keluarga. Harapannya dengan adanya pelatihan keterampilan seperti pembuatan telur asin, rempeyek, antari, dan lain sebagainya juga didukung oleh pemberian modal sebagai awal membuka usaha dapat menjadikan warga binaan sosial lebih mandiri dalam pekerjaan. Kita yakin dengan usaha seperti demikian akan ada warga binaan sosial yang berhasil dan berkesinambungan dengan usaha yang dijalankan.”

Namun pada tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan, warga binaan sosial masih belum mampu memanfaatkan modal yang diberikan. Masih banyak warga yang tidak memiliki usaha setelah modal tersebut diberikan, dan modal yang diberikan habis sia-sia. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Bapak HR selaku warga binaan sosial desaku menanti, Ia mengatakan:

“Modal sudah diberikan kepada warga binaan sosial desaku menanti. namun, warga sini memang masih belum bisa memanfaatkan modal tersebut dengan baik. Ada beberapa warga yang memang modalnya habis begitu saja. Beberapa kali dikasih modal namun usaha nya tidak jalan. Karna memang untuk membuka lapangan pekerjaan dan lokasi yang jauh menjadi hambatan utama yang dirasakan warga.”

Tidak hanya bantuan UEP, Advokasi Sosial dan pengembangan aksesibilitas dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya mengembangkan dan memperkuat kestabilan ekonomi keluarga warga binaan sosial desaku menanti. advokasi sosial dilakukan dengan menjangkau pasar



yang memungkinkan sebagai upaya distribusi hasil kerja warga binaan sosial desaku menananti. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Ia mengatakan:

“Hambatan advokasi sosial yang kita hadapi yaitu pada awalnya apa yang mereka produksi, tidak bisa mereka pasarkan. Akhirnya dinas sosial membantu dalam hal advokasi sosial, dinas sosial mencari pasar yang bisa dimasukkan oleh produk-produk mereka. Misalnya: di BPJS, gor ken arok, gudang idnomaret. Tapi sampai sekarang mereka belum mau untuk memasarkannya sendiri. akhirnya sampai saat ini masih kita yang memasarkan, bahkan terkadang dinas sosial juga yang membelinya.”

Tahap peningkatan kemampuann intelektual, kecakapan, dan keterampilan, program desak menanti berupaya untuk meningkatkan advokasi sosial. Dnas sosial mencanangkan desaku menanti sebagai kampung wisata topeg. Harapannya hasil yang ada dapat terbantu untuk dibeli oleh pengunjung wisata kampung topeng. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial kota malang, yaitu:

“Awal mula berawalnya menjadikan desaku menanti sebagai kapung tompeng yaitu dari hambatan yang kita hadapi, pada saat bersamaan kota malang juga sedang rame-rame nya dengan kampung tematik atau kampung wisata maka kita mencoba menerapkannya pada desaku menanti. Tujuan dari kampung topeng itu sendiri yaitu untuk mendatangkan pasar atau pembeli, sehingga usaha yang mereka kerjakan bisa berjalan dengan baik. Harapannya mereka tidak perlu jual keluar, pembeli yang datang langsung ke lokasi desaku menanti. tujuan itulah yang mendasari menjadikan desaku menanti menjadi kampung wisata topeng.”



Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan keterampilan juga sudah bisa dilihat dengan adanya semangat untuk meningkatkan kualitas hidup para warga binaan sosial desaku menanti. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial, Ia mengatakan:

“Tapi alhamdulillah untuk tahun-tahun ini, 2017 kesini, terlihat ada semangat dari mereka terutama dari itu tadi setelah adanya penambahan fasilitas dan semakin bagus kampung mereka, mereka sendiri ya wes sudah mulai sadar dengan kebutuhan mereka. Jadi jualan itu tidak perlu disuruh, kalo dulu harus disuruh kalo mau jualan. Kalo sekarang ya wes tiba-tiba buka jualan, selain itu dari mental mereka walaupun belum ajeg ya tapi minimal dulu itu ga ada yang ke mushola sekarang sudah ada. Kemudian, menjaga taman dan bunga-bunga agar tetap rapi sudah mulai kelihatan. Usaha mereka juga di bengkel kerja sudah mulai kelihatan”

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan pada program desaku menanti sudah didukung dengan upaya, bantuan UEP sebagai modal, advokasi sosial, pengembangan aksesibilitas dengan menjadikan Desaku Menanti sebagai Kampung Topeng. Tujuan menjadikan tempat wisata dan dapat mendatangkan pembeli agar meningkatkan upaya wirausaha para warga binaan sosial desaku menanti. program desaku menanti berdasarkan hasil data diatas belum sampai pada tahapan ketiga yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan keterampilan. Hal tersebut kita ketahui masih banyak warga yang tidak bisa memanfaatkan bantuan UEP yang diberikan dan

masih terhambat dalam pengembangan aksesibilitas untuk memasarkan produk yang dihasilkan.

c. Para Pelaku Pemberdayaan Warga Binaan Sosial Desaku Menanti

1) Dinas Sosial

Peran Dinas Sosial Kota Malang dalam upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti, seperti yang disampaikan oleh Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani menyatakan sebagai berikut:

“Sejak awal, anggaran yang dicairkan dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Malang terdapat pemberdayaan dalam berbagai bentuk pelatihan yang memang dianggarkan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan bagi para warga binaan sosial diantaranya membuat telur asin, topeng, makanan ringan, dan sebagainya. Anggran yang ada juga diberikan sebanyak 5 juta kepada 1 KK dan diberikan untuk Kepala Keluarga yang terdaftar sebanyak 40 KK. Kita berharap, dengan adanya modal dan pemberdayaan yang diberikan akan ada Warga Binaan Sosial yang berhasil dan berkesinambungan. untuk sementara, Dinas Sosial memprioritaskan pemberdayaan dalam bidang ekonomi agar warga binaan sosial memiliki penghasilan harian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”

Kemudian peran Dinas Sosial melalui Pekerja Sosial Dinas Sosial dalam pemberdayaan dengan memberikan bimbingan mental, seperti yang disampaikan Bapak VVS selaku pekerja sosial dinas sosial kota malang, sebagai berikut:

“Sebagai pekerja sosial dinas sosial kota malang, saya dan teman-teman mendampingi warga binaan sosial desaku menanti setiap hari. Kita selalu membimbing dan memberikan perhatian baik secara individu ataupun keluarga. Kita selalu observasi

apabila memang ada konflik ataupun kemajuan yang ada disana. tapi saya sudah tidak lagi setiap hari berada di desa, karna memang sudah ada pekerja sosia yang menggantikan. Untuk bimbingan yang biasanya kita akukan, kita biasanya menggunakan cara *family to familiy* ataupun *one on one*.”

Jadi, Dinas Sosial berperan aktif dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis atau bisa disebut sebagai warga binaan sosial desaku menanti. dinas sosial berperan dalam aktor yang memiliki anggaran dan ikut serta mengawasi dan membimbing melalui pekerja dinas sosial kota malang dalam upaya rehabilitasi sosial warga binaan sosial desaku menanti.

## 2) LKS Mutiara Insani

Peran LKS Mutiara Insani dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis pada program Desaku Menanti, seperti yang disampaikan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani menyatakan sebagai berikut:

“Dinas Sosial Kota Malang bekerja sama dengan LKS Mutiara Insani perannya yaitu LKS Mutiara Insani sebagai lembaga yang akan menerima dana dan mengeksekusi program Desaku Menanti ini. Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, pemberdayaan, evaluasi hingga pengembangan program Desaku Menanti. peran LKS turun serta dalam pemberian keterampilan-keterampilan khusus kepada WBS yang harapannya pasca keterampilan itu diberikan dapat memunculkan sikap kemandirian WBS sehingga mereka nantinya tidak lagi pergi berkeja dengan cara menggelandang ataupun mengemis.”

Jadi, LKS Mutiara Insani merupakan mitra kerja Dinas Sosial yang ikut serta dalam pelaksanaan maupun pemberdayaan warga binaan

sosial desaku menanti. LKS Mutiara Insani berperan dalam memberikan sosialisasi saat penjangkauan, bimbingan, pelatihan keterampilan. LKS Mutiara Insani merupakan pihak yang menandatangani secara tertulis surat perintah kerja antara kementerian sosial dan LKS Mutiara Insani itu sendiri.

### 3) Instansi Pemerintah Pusat

Instansi Pemerintah tidak hanya Dinas Sosial, namun Instansi Pemerintah Pusat juga memiliki peran dalam memanjakan desaku menanti terutama dalam pemberdayaan yang sedang diupayakan, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial sebagai berikut:

“Bank Indonesia juga memberikan bantuan dan pelatihan dalam upaya pemberdayaan gelandangan dan pengemis desaku menanti. pelatihan yang diberikan yaitu tentang *packaging* agar layak untuk dijual dan menarik. Kemudian, Bank Indonesia juga memberikan spinner yaitu mesin untuk mengeringkan minyak, alat potong singkok agar dapat menjadi kripik, panci, kompor, dan banyak lainnya. Kementerian Pendidikan juga memberikan bantuan dalam membentuk paud, kita sudah memiliki paud sendiri untuk desaku menanti. tujuannya untuk menjangkau anak-anak dibawah umur, ya minimal mereka memiliki kegiatan dan keinginan untuk belajar.”

Jadi, Instansi Pemerintah tidak hanya Dinas Sosial melainkan Instansi Pemerintah Pusat memiliki peran dalam ikut serta mengupayakan pelaksanaan pemberdayaan warga binaan sosial desaku menanti dengan memberikan pelatihan serta sarana prasarana yang mendukung keterampilan para warga binaan sosial itu sendiri.

#### 4) Perguruan Tinggi

Peran perguruan tinggi dalam pelaksanaan program desaku menanti, seperti yang disampaikan bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani menyatakan sebagai berikut:

“Dalam pemberdayaan yang diberikan tidak luput juga dari jejaring ataupun kerjasama dengan akademisi khususnya perguruan tinggi. Akademisi ataupun universitas yang ikut serta dalam pemberdayaan wbs yaitu utamanya dalam bidang psikologi. Berhadapan dengan kondisi WBS yang sudah puluhan tahun di jalan, untuk merubah atau memperbaiki karakter dan budaya itu sendiri harus didampingi oleh ahlinya. Beberapa universitas yang membantu dalam pemberdayaan wbs, diantaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Gajayana, Universitas Islam Negeri Malang, dan sebagainya. Tanpa adanya kerjasama dengan akademisi/universitas, akan sulit pemberdayaan berlangsung berkelanjutan. Karna program ini baru bisa dilihat berhasil atau tidaknya 5-6 tahun kedepan atau bahkan 10 tahun mendatang.”

Jadi, pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti juga didukung oleh peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi berperan dalam memberikan bimbingan terutama dalam bimbingan mental warga binaan sosial itu sendiri.

#### 5) Swasta

Peran swasta dalam pelaksanaan program Desaku Menanti, seperti yang disampaikan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Ketika kita berbicara pemberdayaan untuk WBS yang saat ini bertempat tinggal di Desaku Menanti Di Dusun Bara, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Mau tidak mau kita harus menyelaraskan kerjasama dengan dunia

usaha, karna tanpa dunia usaha dukungan anggaran untuk pemberdayaan pun akan terhenti. “

Kemudian bentuk kerjasama dalam pemberdayaan Warga Binaan Sosial melalui Program Desaku Menanti yaitu seperti yang dikatakan oleh Bapak VVS selaku pekerja sosial Dinas Sosial Desaku Menanti, Ia mengatakan:

“Kerjasama dengan Dunia Usaha pasti ada. Contohnya seperti BNI yang pernah memberikan payung pjasera karna memang itu dibutuhkan. kemudian ada juga PLN, yang memberikan pelatihan dalam pengelolaan sampah dan sampai sekarang masih sampah-sampah masih dikelola dan diberikan ke bank sampah malang yang memang uangnya dipergunakan langsung untuk keberlanjutan program. Kalo untul donatur banyak sekali dan sampai sekarang pun kita masih mencari bantuan.”

Jadi, swasta dalam pemberdayaan warga binaan sosial desaku menanti berperan sebagai donatur baik dalam bentuk uang maupun fasilitas yang dibutuhkan. swasta juga berperan dalam memberikan pelatihan maupun bimbingan bagi para WBS untuk menuju kemajuan kualitas hidup yang layak dan kemandirian para WBS itu sendiri.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial melalui Program Desaku Menanti**

### **a. Faktor Penghambat**

Dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti memiliki beberapa hambatan. Hambatan terjadi dikarenakan memang adanya faktor-faktor yang tidak sesuai dengan harapan dan perubahan yang ada belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Faktor-faktor penghambat akan terus menjadi evaluasi berbagai pihak dalam proses pemberdayaan agar program bisa terus berjalan dan mencapai target keberhasilan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemberdayaan diantaranya:

#### **1) Merubah Mindset, Mental, dan Sikap WBS Desaku Menanti**

Menjalankan kehidupan di jalan sangat mempengaruhi terbentuknya karakter pada setiap individu warga binaan sosial Desaku Menanti. Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam mencapai keberhasilan terhadap upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang, yaitu:

“Semangat mereka untuk merubah kualitas hidup belum terlihat, walaupun memang mereka bilang ingin menjadi seperti demikian, tapi yang bisa kita ukur semangat itu apabila omongan berbanding lurus dengan perlakuan mereka dan sampai saat ini itu belum terjadi. Yang paling menonjol disana itu adalah kurangnya rasa syukur, dan tingginyairi hati. Terlihat dari misalnya diberikan bantuan tapi ya tetep minta lagi padahal



bantuan sudah kita perhitungkan kecukupannya. Untuk rasa iri hati itu terlihat saat ada tetangga yang memang berhasil, hal itu bisa jadi omongan warga lain yang belum berhasil. Masih sirik satu sama lain. Jadi ya memang ada hambatan pada warga binaan sosial itu sendiri, dari segi mental dan rasa ingin suksesnya itu belum ada. Kalo dan alhamdulillah nyari pasti dapet. Kalo kendala dana tetap ada tapi disaat kita cari itu pasti ada. Tinggal mereka saat dikasih dan diberikan dana itu dipergunakan untuk apa, bisa digunakan dengan baik atau tidak.”

Kurangnya semangat dan usaha warga binaan sosial Desaku

Menanti menuju kemandirian juga selaras dengan pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Masih kurangnya antusias serta partisipasi WBS dalam mengikuti kegiatan terutama kegiatan keagamaan yang dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan masih tertanam mindset para WBS terhadap imbalan yang akan didapat apabila mereka mengikuti suatu kegiatan. Karakter WBS juga cenderung konsumtif, mereka tidak biasa mengolah sumber daya yang ada untuk diri maupun keluarganya sendiri. mereka lebih cenderung belanja hal instan sehingga cenderung konsumtif.

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa usaha mereka untuk memperbaiki kualitas hidup belum terlihat. Upaya-upaya sudah dilakukan baik mulai dari bimbingan hingga permodalan, namun hasil yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor penghambat berikutnya yaitu sulitnya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas

## 2) Upaya Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas

Upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas dilakukan dalam rangka meningkatkan potensi produk yang dihasilkan oleh warga binaan sosial Desaku Menanti. upaya tersebut sudah

dilakukan oleh Dinas Sosial melalui beberapa cara yaitu membuka potensi pasar yang ada dan menjadikan Desaku Menanti sebagai Desa Wisata. Namun hal tersebut masih menjadi hambatan dan belum menunjukkan keberhasilan. Hal tersebut sesuai pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial yaitu:

“Awal mula nya upaya menajdikan Desaku Menanti sebagai Kampung Topeng yaitu dikarnakan mereka bisa produksi namun tidak bisa memasarkan hasil yang mereka punya. Jadi untuk memasarkan prodk yang ada mereka masih malu dan sulit untuk memasarkan produk mereka sendiri. akhirnya dinas sosial mencarikan tempat-tempat strategis untuk menjual hasil produksi seperti; di BPJS, gor ken arok, gudang indomaret, dan lain-lain. Sampai sekarang mereka belum bisa memasarkan dan pada akhirnya dinas sosial yang sampai saat ini membantu untuk memasarkan bahkan terkadang kita juga yang membeli. Dan untuk kampunng topeng itu sendiri masih terus kita upayakan untuk penambahan wahana wisata untuk menaikkan jumlah pengunjung. Karna agak lucu ya memang, dari awal hingga saat ini penambahan yang ada ya begitu-begitu saja. Saat peresmian kampunng topeng pada blan februari 2017, bulan Maret, April, Mei rame namun menjelang puasa sudah sepi. Nah itu kendala bagi kami, kemudian kami berikan penambahan wahana flying fox tapi ya ramenya hanya sebentar, sekarang sudah sepi lagi. Hal tersebut bisa kita lihat dari pejualan tiket, sabtu tiket yang biasa terjual yaitu lebih dari 50, minggu lebih dari 100, tanggal merah bisa lebih dari 200. Untuk sekarang harian hannya terjual 1 sampai 2 tiket, sabtu minggu hanya 10 sampai 20 tiket.”

Kesulitan yang dihadapi dalam upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas juga diungkapkan oleh Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Bapak DJN mengatakan:

“Peberdayaan yang dilakukan sudah cukup baik namun perlu adanya perluasan jejaring yang lebih luas. Kerjasama dalam pelaksanaan pemberdayaan maupun hasil dari pemberdayaan diperlukan. Jangan menjadi program yang sporadif namun dapat

benar-benar diandalkan. Misalnya, untuk jahit menjahit, kesenian, olahan makanan. Jangan dilakukan padat karya misal jika hanya ada pesanan saja dan tidak berkelanjutan. Maka dari itu pelatihan sebaiknya diberikan oleh ahlinya.”

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal. Hambatan dalam upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas juga berkaitan dengan SDM warga binaan sosial Desaku Menanti. upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas ini sangat berpengaruh dan menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan kemandirian warga binaan sosial yang menjadi penerima manfaat dari program Desaku Menanti. Maka dari itu, perlu adanya keseriusan, kesonsistenan, ketegasan, dan kreatifitas untuk menghilangkan hambatan ini.

### 3) Lokasi Program Desaku Menanti

Kemudian yang juga menjadi hambatan dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program Desaku Menanti yaitu lokasi desa yang jauh dari pusat kota dan tidak adanya transportasi umum yang menuju atau melewati lokasi tersebut. Hal tersbut sesuai dengan pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Lokasi Desaku Menanti di dusun bara, kelurahan tlogowaru, kecamatan kedung kandang, kota malang memang bukan lokasi yang dekat dengan pusat ota malang itu sendiri. lokasi desaku menanti bahkan berbatasan dengan kabupaten kota malang. Hal tersebut menjadi kendala baik pihak yang memberikan

pemerdayaan maupun bagi para warga binaan sosial desaku menanti. misalnya untuk warga binaan yang kerja proyek terkadang kendala dengan waktu dari pekerjaan itu sendiri yang harus berangkat lebih pagi dan pulang lebih awal, ataupun bagi para pengunjung yang ingin datang ke kampung topeng karna memang lokasi yang jauh. Hal tersebut juga menghambat warga binaan dalam memasarkan produk mereka.”

Lokasi yang jauh ini berakibat dalam keterbatasan aksesibilitas warga binaan sosial untuk berwirausaha maupun bekerja di pusat kota yang tidak lagi menggelandang dan mengemis. Lokasi Desaku Menanti yang menjadi hambatan dalam keberhasilan pemberdayaan Desaku Menanti juga didukung oleh hasil observasi peneliti ke Kampung Topeng tersebut. Lokasi yang dijadikan tempat dari program Desaku Menanti merupakan wilayah perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Serta tidak adanya transportasi umum yang melewati lokasi tersebut. Namun memang adanya tujuan penempatan lokasi yang jauh ini bertujuan agar para warga binaan sosial tidak lagi mudah untuk kembali ke jalan dan mengikuti program yang dilaksanakan.

#### 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana di Desaku Menanti

Menjadikan Desaku Menanti sebagai Desa Wisata mengharuskan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Karna tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, Desa Wisata tidak bisa berhasil dan berkelanjutan untuk terus dikunjungi. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, Ia mengatakan:

“Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas warga binaan sosial dalam berwirausaha, Dinas Sosial mencanangkan Desaku Menanti sebagai Desa Wisata Kampung Topeng namun infrastruktur belum memadai. Seperti sarana prasarana, kondisi rumah yang layak, dan lain sebagainya.”

Dalam upaya menjadi Desaku Menanti sebagai Kampung Topeng dan dalam upaya membangun dan menjaga berbagai bentuk fasilitas akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesediaan upaya pembangunan yang lebih baik serta koordinasi dalam merawat dan menjaga fasilitas yang ada baik dari Dinas Sosial maupun warga binaan sosial Desaku Menanti itu sendiri. kurangnya sarana dan orasarana yang adajuga diungkapkan oleh Bapak VVS selaku pekerja sosial Dinas Sosial, Ia mengatakan:

Hasil wawancara dengan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang menunjukkan adanya hambatan-hambatan pada warga binaan sosial desaku menanti. hambatan-hambatan yang terjadi berkaitan erat dengan sikap mental para wbs yang merupakan sasaran dari program desaku menanti itu sendiri. pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani tentang faktor penghambat lainnya dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti sebagai berikut:

“Dan untuk kampung topeng itu sendiri masih terus kita upayakan untuk penambahan wahana wisata untuk menaikkan jumlah pengunjung. Karna agak lucu ya memang, dari awal hingga saat ini penambahan yang ada ya begitu-begitu saja. Saat

peresmian kampung topeng pada bulan februari 2017, bulan Maret, April, Mei rame namun menjelang puasa sudah sepi. Nah itu kendala bagi kami, kemudian kami berikan penambahan wahana flying fox tapi ya ramainya hanya sebentar, sekarang sudah sepi lagi.”

Pernyataan-pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung sebagai fasilitas dari Desa Wisata Kampung Topeng ini harus terus ditingkatkan. Karna tanpa adanya fasilitas yang memadai Desa Wisata akan sulit berhasil. Upaya ini juga berkaitan dengan upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas yang dilakukan. Tujuan dari Kampung Topeng sendiri untuk menciptakan pasar di Desaku Menanti agar segala hasil produk mereka bisa lebih dikenal masyarakat dan dapat terjual di kampung mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari Dinas Sosial dan LKS Mutiara Insani dalam Pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti di Kota Malang adalah kemampuan baik secara pengetahuan maupun sikap dan mindset para warga binaan sosial desaku menanti, upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas yang harus terus ditingkatkan melalui peran *stakeholder*, lokasi Desaku Menanti yang jauh dari pusat kota dan sulit untuk dijangkau, serta kurangnya sarana prasarana serta fasilitas yang mendukung Desaku Menanti untuk menjadi Desa Wisata.



#### b. Faktor Pendukung

Pemberdayaan gelandangan dan pengemis tidak hanya membutuhkan peran pemerintah untuk menuju target keberhasilan yaitu kemandirian warga binaan sosial desaku menanti itu sendiri. Diperlukan peran stakeholder baik dari Instansi Pemerintah maupun diluar pemerintah. Pelaksanaan pemberdayaan seperti pelatihan dan lain sebagainya tidak saja dilakukan dalam waktu satu kali namun juga harus berkelanjutan. Hal tersebut membutuhkan peran berbagai pihak dalam mewujudkan kemandirian warga binaan sosial desaku menanti sehingga tidak lagi hidup di jalan.

Faktor-faktor pendukung dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti di Kota Malang salah satunya yaitu dana yang mencukupi dalam proses pemberdayaan.

##### 1) Dana Program Mencukupi

Faktor finansial menjadi hal penting dalam keberlangsungan sebuah program dan kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya. Program desaku menanti merupakan program yang baru dan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Hal ini menjadi faktor pendukung agar kegiatan yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial Dinas Sosial, Ia mengatakan:



“Untuk kekurangan dari program ini sih apaya, bagi saya sendiri tidak ada kurangnya karna mereka sudah diberikan tempat tinggal yang layak, yang notabennya mereka tinggal mencari kerja untuk mencari uang. Kalo dulu mereka mencari uang masih mikir untuk bayar kontrakan, sekarang sudah tidak. Jadi itungannya sudah mengurangi beban hidup mereka. Bahkan juga air dan listrik kita subsidi, nah kan mereka benar-benar bekerja untuk diri mereka sendiri. hal tersebut bisa kita katakan sebagai faktor-faktor yang memang sangat mendukung dalam kebutuhan hidup mereka. Segala prasarana dan pemberdayaan pun sudah kita laksanakan. Dana juga selalu kita cari dan alhamdulillah ada aja mba.”

Dana yang mencukupi tidak saja berasal dari Anggaran program Desaku Menanti namun juga dari sumber lain yang tidak mengikat yaitu bantuan *stakeholder* terlibat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang, Ia mengatakan:

“Program Desaku Menanti mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (CSR), LSM/LKS maupun relawan-relawan masyarakat luas sehingga mempermudah pelaksanaan program ini. Bantuan dana sendiri kita dapatkan dari pihak swasta baik langsung dalam bentuk kegiatan, fasilitas, ataupun tunai. Ada juga dukungan lainnya, seperti bantuan dari SKPD terkait yaitu akses jalan, listrik, PDAM, dan lain-lain. Banyak yang men-support proses pemberdayaan ini, mulai dari kegiatan, fasilitas, dan hal lain yang dibutuhkan.”

Berdasarkan hasil dokumentasi dari Pedoman Program Desaku Menanti Kota Malang 2016, diketahui pembiayaan program Desaku Menanti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang tidak mengikat. Perlu ditekankan peranserta dari pemangku kepentingan dengan pola sharing

budget dan kerjasama. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Nomor : 349a/ RSTS & KPO-GP/KEP/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Nama LKS sebagai Penyalur Bantuan Sosial dan Penerima Biaya Operasional Lembaga serta penetapan nama-nama Penerima Bantuan Sosial Bimbingan Sosial dan Keterampilan. Jaminan Hidup dan Pemberian Bahan Baku Rumah pada Kegiatan Pengembangan Model Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Gelandangan, Pengemis dan Pemulung dalam rangka Desaku Menanti di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah dana Rp. 1.834.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan Bimbingan Sosial dan Keterampilan sebesar 40 KK x @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*)
2. Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup (Jadup) untuk 144 jiwa x 90 hari x @ Rp. 25.000,- = Rp. 324.000.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*)
3. Pemberian Bantuan Sosial Bahan Baku Rumah (BBR) untuk 40 orang x @ Rp. 30.000.000,- dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.000.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*)
4. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk 40 KK x @ Rp. 5.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*)

5. Bantuan Perlengkapan Rumah Tangga untuk 40 KK x @ Rp. 1.500.000,- = Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*)
6. Bantuan Operasional LKS Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*),
7. Bantuan ini tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak maupun sesuai Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Nomor : 349a/RSTS&KPO-GP/KEP/4/2016 tanggal 20 April 2016 Tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagai Penyalur dan Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bimbingan Sosial dan Keterampilan, Jaminan Hidup dan Keterampilan bagi Gelandangan, Pengemis dan Pemulung dalam rangka Desaku Menanti di Kota Malang Provinsi Jawa Timur tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah dilaksanakan dan bukan pada pendanaan yang menjadi titik masalah. Hal tersebut merupakan faktor pendukung pada proses pemberdayaan yang dilakukan karna tidak mungkin kegiatan dapat terlaksana dengan baik apabila dana yang dibutuhkan tidak mencukupi.

## 2) Kerjasama yang Baik Antar *Stakeholders*

Upaya pemberdayaan tidak mungkin berhasil apabila hanya dilakukan oleh satu *stakeholder*. Pemberdayaan pada masa kini harus mengikutsertakan peran-peran yang dimiliki tiap *stakeholder*. Kerjasama

yang baik antar *stakeholder* dengan menjalankan masing-masing fungsi dan perannya akan membuat pemberdayaan menncapai tujuan yang diinginkan yaitu kemandirian.

Program Desaku Menanti mengikutsertakan stakeholder untuk ikut serta dalam proses pemberdayaan. Kerja sama yang dilakukan pada saat ini dapat dibilang cukup baik, hal tersebut selaras dengan yang pernyataan Bapak DJN selaku wakil ketua LKS Mutiara Insani, yaitu:

“Semangat dan kemampuan pemerintah terhadap desaku menanti luar biasa, segala upaya demi tidak kembalinya para WBS kembali ke jalan dilakukan. Sehingga evaluasi kementerian sosial terhadap desaku menanti kota malang dapat dikatakan salah satu yang paling progresif, dan menjadi sasaran ataupun tolak ukur apabila kota/provinsi/kabupaten lain ingin mengadopsi program ini. dan banyak sekali mahasiswa yang menjadikan Desaku Menanti sebagai kajian ataupun penelitian oleh berbagai jurusan yang memang relevan. Kemudian semangat ini juga yang diberikan pada stakeholder yang terlibat yang bekerjasama dengan Dinas Sosial karna memang Dinas Sosial bertanggung jawab atas bentuk kegiatan yang dilakukan. Sehingga saat ini kerja sama baik Dinas Sosial, LKS, dan stakeholder lain terbilang cukup baik”

Stakeholder yang ikut dalam proses pemberdayaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diantaranya yaitu LKS Mutiara Insani, Instansi Pemerintah Pusat, Swasta, Perguruan Tinggi. Dinas Sosial mapun stakeholder yang terlibat berupaya melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan mencapai tujuan kemandirian pada gelandangan dan pengemis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak VVS selaku pekerja sosial Dinas Sosial Kota Malang, Ia mengatakan:

“Banyak sekali yang ikut berkontribusi dalam segala upaya pemberdayaan. Tapi memang, semua harus melalui izin kita sebagai Dinas Sosial. Ya karna ini program kita, mereka kita berdayakan, jadi hasil maupun kegiatan harus melalui kita dulu. Namun sejauh ini semua kegiatan asal tujuan kita sama yaitu untuk kemandirian pasti kita izinkan bahkan kita ikut turun langsung dan bantu. Pekerja sosial Dinas Sosial selalu ikut turun langsung, dan memantau kegiatan yang ada. Dan semua berjalan baik, karna memang tujuan kita dengan *stakeholder* lain ya sama, ingin mereka mandiri, hidup mereka layak, udah itu aja. Jadi ya kita pasti semua sama-sama usaha sesuai perannya.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan Dinas Sosial, LKS Mutiara Insani, dan *stakeholder* yang terlibat memiliki harapan untuk dapat memandirikan para warga binaan sosial desaku menanti. Program Desaku Menanti diharapkan dapat berkelanjutan dan berhasil dalam mengikis angka kemiskinan dan jumlah PMKS di Kota Malang. Peran Dinas Sosial dalam upaya memberdayakan didukung oleh pendanaan serta sarana dan prasarana sudah diberikan. Dinas Sosial mengupayakan segala bentuk pemberdayaan agar warga binaan sosial desaku menanti yang juga merupakan Eks Gelandangan dan Pengemis tidak lagi turun kejalan.

Dinas Sosial berharap dengan segala hal-hal pendukung dan dukungan dari berbagai *stakeholder* akan berpengaruh dalam perubahan sikap dan mental para warga binaan sosial. Tujuan dari segala upaya Dinas Sosial bukan membuat mereka “kaya”, namun membuat mereka bersyukur dan semangat untuk hidup lebih layak. Karna dengan segala upaya yang dilakukan namun, sikap dan mental para WBS tidak jalan

bersamaan untuk terus berupaya menuju hidup yang lebih baik maka akan semakin sulit tujuan program ini untuk dicapai.

Jadi, dengan segala faktor pendukung yaitu dana yang cukup, diharapkan akan terus berkelanjutan dan mencapai keberhasilan baik dari segi ekonomi, dan sosial itu sendiri. Serta kerja sama yang baik antar *stakeholder* terlibat menciptakan pengaruh yang baik dalam upaya pemberdayaan menuju rehabilitasi sosial para warga binaan sosial Desaku Menanti.

### **C. Analisis Data Fokus**

#### **1. Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti**

##### **a. Bentuk Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti**

Kegiatan rehabilitasi sosial selama ini dilakukan di kota-kota besar melalui panti-panti gelandangan pengemis milik kementerian sosial maupun pemerintah daerah. Namun demikian, jumlah gelandangan dan pengemis tidak berkurang secara signifikan. Berkenaan dengan hal tersebut kementerian sosial menciptakan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan secara terpadu di daerah asal gelandangan dan pengemis, serta difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan kontrol sosial masyarakat.

Penanganan gelandangan dan pengemis selama ini telah dilakukan melalui sistem panti dan non panti, yang pada umumnya dilaksanakan oleh

pemerintah. Terdapat beberapa jenis pelayanan yang telah dikembangkan antara lain:

1) Panti

Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan sarana tempat tinggal dalam suatu atap yang dihuni oleh beberapa keluarga.

2) Liposos

Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya.

3) Transit Home

Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap di tempat yang telah disediakan.

4) Pemukiman

Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal yang permanen di lokasi tertentu.

5) Transmigrasi

Merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal baru di lokasi lain terutama di luar pulau Jawa.



Penanganan di masa lalu sebagai mana tersebut di atas sudah cukup baik, namun masih mengedepankan sistem panti dan belum optimal dalam melibatkan peran serta masyarakat. Jenis-jenis pelayanan itu, tidak lagi menjawab kebutuhan penanganan gelandangan dan pengemis saat ini. Penanganan yang telah dilaksanakan selama ini belum mampu menjawab pemenuhan kebutuhan individu yang terlibat di dalamnya meliputi; pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan, kesehatan), psikis, sosial, dan spiritual. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan itu akan terpenuhi apabila orang dimaksud mampu mendapatkan nafkah yang memadai. Namun demikian karena tidak memiliki ketrampilan yang mampu mencukupi kebutuhan, sikap mental yang kurang mendukung, sikap sosial yang tidak adaptif, maka mereka melakukan menggelandang dan mengemis. Rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dalam paradigma baru tidak lagi mengandalkan bantuan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah namun lebih mengoptimalkan sumber-sumber atau potensi yang ada di masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kementerian sosial dalam hal ini direktorat rehabilitasi sosial tuna sosial berupaya mengembangkan sebuah model rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis terpadu berbasis desa yang diberi nama “Program Desaku Menanti”. Program Desaku Menanti merupakan alternatif penanganan yang ditawarkan dengan maksud untuk memberikan sentuhan baik sebelum menjadi gelandangan dan pengemis, setelah menjadi gelandangan dan pengemis, dan pemberdayaan di kampung

halaman (desa). Program ini tidak hanya menyentuh aspek rehabilitatif saja, tetapi juga memperhatikan aspek preventif, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Kegiatan Desaku Menanti berfokus kepada penanganan keluarga gelandangan dan pengemis termasuk di dalamnya anak, dan orang tuanya. Untuk itu dukungan terbesar dari keberhasilan program ini adanya ketersediaan potensi dan sumber yang ada di desa dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan Desaku Menanti dalam upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan sesuai dengan pendekatan rehabilitasi sosial yang diajarkan dalam UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang (2013:31) terdapat tiga bentuk pendekatan pelayanan rehabilitasi sosial yakni sebagai berikut:

- a. Secara institusional, adalah suatu system pelayanan rehabilitasi sosial dengan menempatkan penyandang masalah sosial dalam suatu institusi, yaitu meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi sosial dan kelas karya (*pre-vocasional training*).
- b. Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan cara membangkitkan kesadaran masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, dengan adanya konsep RBM memungkinkan adanya peran serta lembaga dalam penanganan penyandang masalah sosial di setiap daerah.

- c. Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK) adalah suatu system pelayanan dengan menepatkan penyandang masalah sosial pada keluarga, sehingga keluarga yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan rehabilitasi lanjutan di dalam keluarga itu sendiri, terutama yang bersifat rehabilitasi medik seperti fisioterapi, terapi wicara, dan terapi okupasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan program Desaku Menanti menggabungkan pendekatan secara institusional, rehabilitasi sosial dengan pendekatan sumber daya masyarakat, serta rehabilitasi sosial dengan pendekatan Rehabilitasi Dalam Keluarga (RDK).

Program desaku menanti merupakan program terobosan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bagian kedua pasal 7 ayat 1 bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Tujuan program “Desaku Menanti” yaitu mengembalikan gelandangan dan pengemis dari daerah kota ke daerah asal melalui rehabilitasi sosial secara terpadu, sehingga mereka dapat mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang ada, baik yang sifatnya rehabilitatif, preventif, maupun suportif, dilakuakn secara bersamaan, simultan, dan

berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan UPT pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang (2013:34) rehabilitasi bukan hanya merupakan proses restorasi semata, melainkan juga merupakan suatu usaha untuk mencapai kemandirian, perawatan diri, dan mewujudkan potensi yang dimiliki.

Pada program desaku menanti dalam upaya rehabilitasi sosial, kegiatan dilakukan secara terpadu di daerah asal gelandangan dan pengemis, serta difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga dan kontrol sosial masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bagian kedua pasal 7 ayat 3 bahwa rehabilitasi sosial dalam program desaku menanti yang diberikan berupa bantuan dan asistensi sosial. Kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya:

- 1) Penjangkauan dan Pemulangan Gelandangan

Kementerian sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah menyediakan alokasi dana untuk pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal. Gelandangan dan pengemis yang akan dipulangkan adalah hasil dari operasi yutisi yang dilakukan oleh kementerian sosial, dinas sosial dan satuan polisi pamong raja ataupun mereka yang sudah keluar dari panti-panti rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis milik pemerintah. Dalam pemulangannya, kementerian sosial berkoordinasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Dinas/Instansi Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- 2) Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial

Para gelandangan dan pengemis yang lolos seleksi dan persyaratan, diberikan bimbingan fisik, mental, dan sosial. Bimbingan fisik diarahkan pada tuntunan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin, agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan mental diarahkan pada tuntunan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, dengan belajar tentang keagamaan, cara berpikir positif dan keinginan untuk berprestasi. Bimbingan sosial diarahkan pada tantangan kerukunan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

### 3) Bimbingan Keterampilan

Para gelandangan dan pengemis yang menjadi warga binaan desaku menanti kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di Rumah Kerja Desaku Menanti (RDKM). Biaya pelatihan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*cost sharing*). Bagi mereka yang telah lulus pelatihan keterampilan akan diberikan bantuan stimulan untuk modal usaha sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya ataupun dirujuk ke tempat kerja bila dimungkinkan. Namun demikian mereka diharuskan menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis lagi.

### 4) Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif

Karakteristik gelandangan dan pengemis memang beragam. Ada diantara mereka yang membutuhkan pelatihan keterampilan, namun ada

juga dari mereka yang membutuhkan modal untuk usaha. Penerimaan manfaat yang hanya butuh modal untuk usaha dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan melalui 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota juga akan mendapatkan bantuan stimulan langsung. Bantuan ini berupa bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) yang jenis bantuannya disesuaikan dengan minat, bakat, dan pangsa pasar di daerah setempat. Bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan modal usaha juga harus menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis lagi.

#### 5) Jaminan Hidup

Sementara gelandangan dan pegemis mengikuti layanan yang ada, otomatis mereka tidak bekerja (menggelandang dan mengemis). Sebagai konsekuensinya mereka akan mendapatkan jaminan hidup (jadup) yang waktunya disesuaikan dengan situasi kondisi serta dana yang ada. Jaminan hidup akan dihentikan ketika para penerima manfaat diperkirakan sudah hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

#### 6) Bantuan Stimulan

Layanan ini diberikan kepada mereka yang masuk dalam kategori usia produktif, dianggap mempunyai mental kuat untuk mengubah diri, diperkirakan tidak mempunyai kerabat di desa, dan membutuhkan lingkungan tempat tinggal baru. Mereka yang serius

mengikuti program desaku menanti akan dibangun rumah sederhana yang layak ditempati di daerah asalnya. Kegiatan ini untuk sementara dibiayai oleh kementerian sosial ataupun Dinas/Instansi Sosial di provinsi/Kabupaten/Kota, mengingat sifat program yang lingkupnya masih kecil bentuknya masih program ujicoba. Melalui bantuan perumahan ini diharapkan para gelandangan dan pengemis kembali memahami arti sebuah rumah yaitu simbol utama dalam keluarga. Sehingga nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan juga dapat timbul dengan sendirinya.

#### 7) Pengembalian Anak-Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah

Kegiatan ini berupa bantuan stimulan seperti peralatan sekolah untuk anak-anak yang meliputi seragam, sepatu, tas, buku, dan alat tulis dalam satu paket. Besarnya bantuan stimulan disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia. Pendampingan juga melakukan advokasi ke lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal agar mau menerima anak kembali bersekolah.

#### 8) Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas

Terbatasnya kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki gelandangan dan pengemis sangat berdampak pada ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pengelolaan aktifitas sosial ekonomi. Para penerima manfaat perlu difasilitasi agar mereka dapat menjangkau berbagai sistem sumber yang tersedia. Ketidakmampuan gelandangan dan pengemis dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan



rentannya kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu dilakukan advokasi sosial untuk memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara.

Kegiatan yang dilakukan pada program Desaku Menanti sesuai dengan bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial. Bentuk-bentuk rehabilitasi sosial dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014, diantaranya:

- 1) Bimbingan motivasi dan diagnosis psikososial;
- 2) Perawatan dan pengasuhan;
- 3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- 4) Bimbingan mental dan spiritual;
- 5) Bimbingan fisik;
- 6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- 7) Pelayanan aksesibilitas;
- 8) Bantuan dan sistensi sosial;
- 9) Bimbingan resosialisasi;
- 10) Bimbingan lanjut dan/atau;
- 11) Rujukan.

Pemberdayaan melalui program Desaku Menanti berdasarkan kegiatan rehabilitatif yang dilakukan yaitu: penjangkauan dan pemulangan gelandangan dan pengemis, bimbingan fisik, mental, dan sosial, bimbingan keterampilan,

bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP), jaminan hidup, bantuan stimulan, pengembalian anak-anak gelandangan dan pengemis ke sekolah, advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas sesuai dengan pendekatan pemberdayaan menurut Suharto dalam Suharto (2017:67). Menurut Suharto (2017:67) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5p, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyongkongan, dan Pemeliharaan.

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Upaya pemungkinan program Desaku Menanti menciptakan suasana iklim yang mungkin potensi masyarakat berkembang dengan melakukan upaya penjangkauan dan bimbingan fisik, mental, dan sosial. Penjangkauan adalah kegiatan kunjungan pekerja sosial/pendamping ke kantong-kantong gelandangan dan pengemis sebagai upaya menciptakan kontak pendahuluan dan persahabatan dengan mereka. Proses pemberdayaan dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang program serta tujuan Program Desaku Menanti. Tujuan penjangkauan yaitu; memperoleh dan memahami kondisi tempat/kantong-kantong gepeng sebagai wilayah binaan, mendapatkan gepeg yang akan dibina, memperoleh kepercayaan dari gepeng. Kemudian, upaya lain yang dilakukan dalam pendekatan pemungkinan

yaitu memberikan layanan sosial awal berupa bimbingan fisik, mental, dan sosial. Bimbingan fisik diarahkan pada tuntunan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin, agar kondisi badan/fisik dalam keadaan sehat. Bimbingan mental diarahkan pada tuntunan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, dengan belajar tentang keagamaan, cara berpikir positif dan keinginan untuk berprestasi. Bimbingan sosial diarahkan pada tantanan keruknan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. Upaya penguatan pada program Desaku Menanti dilakukan melalui bimbingan keterampilan, dan pengembangan aksesibilitas. Bimbingan keterampilan dengan tujuan memberikan pengetahuan, pelatihan agar dapat digunakan dalam menapai kemandirian pencapaian kebutuhan hidup gelandangan dan pengemis. Para gelandangan dan pengemis yang sudah dipulangkan kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya di 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM) yang ada di Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota. Bagi mereka yang telah lulus pelatihan

keterampilan akan diberikan bantuan stimulan untuk modal usaha sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Namun demikian mereka diharuskan menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis lagi. Bimbingan keterampilan dilakukan dengan memberikan pelatihan pembuatan makanan ringan seperti rempeyek, kue basah, telur asin, tata rias, dan lain sebagainya. Upaya penguatan dalam menunjang kemandirian yang dilakukan lainnya adalah dengan upaya pengembangan aksesibilitas. Terbatasnya kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki gelandangan dan pengemis sangat berdampak pada ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pengelolaan aktifitas sosial ekonomi. Para penerima manfaat perlu difasilitasi agar mereka dapat menjangkau berbagai sistem sumber yang tersedia. Pengembangan aksesibilitas dilakukan dengan menjangkau pasar-pasar dalam memasarkan hasil produk olahan Rumah Kerja Desaku Menanti. Hasil produk yang ada dipasarkan di beberapa lokasi diantaranya gudang indomaret, gor ken arok, dan beberapa tempat lainnya. Tidak hanya itu, Dinas Sosial berupaya untuk menarik konsumen dengan menjadikan Desaku Menanti sebagai Desa Wisata Kampung Topeng. Pembangunan Kampung Topeng diharapkan dapat menjadikan Desaku Menanti sebagai destinasi yang layak untuk dikunjungi dan meningkatkan penghasilan dengan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung, membeli, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Perlindungan masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah dalam hal ini juga bisa dikatakan yaitu kelompok gelandangan dan pengemis. Menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) dilakukan dengan bantuan stimulan berupa tempat tinggal yang layak, advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas. Bantuan stimulan diberikan pada mereka yang masuk dalam kategori usia produktif, dianggap mempunyai mental kuat untuk mengubah diri, diperkirakan tidak mempunyai kerabat di desa, dan membutuhkan lingkungan tempat tinggal baru. Mereka yang serius mengikuti Program Desaku Menanti akan dibangun rumah sederhana yang layak ditempati di daerah asalnya. Melalui bantuan ini diharapkan para gelandangan dan pengemis kembali memahami arti sebuah rumah yaitu sebagai simbol utama dalam keluarga, sehingga nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan juga dapat timbul dengan sendirinya. Dengan membangun tempat tinggal serta wilayah khusus program Desaku Menanti serta fasilitas yang ada didalamnya diharapkan dapat mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Kemudian, upaya perlindungan melalui program Desaku Menanti dilakukan dengan memberikan advokasi sosial. Ketidakmampuan gelandangan dan pengemis dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan rentannya kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu dilakukan advokasi sosial untuk memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara.

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dukungan agar gelandangan dan pengemis mampu menjalankan peran dan tugas kehidupannya dilakukan dengan memberikan jaminan hidup dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sementara gelandangan dan pengemis mengikuti layanan yang ada, otomatis mereka tidak bekerja (menggelandang dan mengemis). Sebagai konsekuensinya mereka mendapatkan jaminan hidup (jadup) yang waktunya disesuaikan dengan situasi kondisi serta dan ayang ada. Jaminan hidup akan dihentikan ketika para penerima manfaat diperkirakan sudah hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Program Desaku Menanti Kota Malang memberikan jaminan hidup dalam bentuk uang tunai dan diberikan kepada tercatat warga binaan sosial Desaku Menanti sebanyak 40 KK, maksimal diberikan kepada empat anggota keluarga dengan jumlah per individu sebanyak Rp. 25.000,-. Sedangkan bantuan

UEP diberikan sebagai bentuk modal usaha dalam menyokong kemampuan gelandangan dan pengemis setelah mengikuti bimbingan keterampilan yang diberikan. Karakteristik gelandangan dan pengemis memang beragam. Bantuan ini berupa bantuan stimulan UEP yang jenis bantuannya disesuaikan dengan minat, bakat, dan pangsa pasar di daerah setempat. Bantuan UEP Desaku Menanti Kota Malang diberikan dalam bentuk dana sebesar Rp. 5.000.000,- per Kartu Keluarga warga binaan sosial Desaku Menanti. Bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan modal usaha juga harus menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang dan mengemis lagi.

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemeliharaan kondisi yang kondusif pada program Desaku Menanti dilakukan dengan upaya monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan apakah proses rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis melalui *Program Desaku Menanti* berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada setiap tahapan dan pada akhir pelaksanaan Program Desaku Menanti untuk masukan guna perbaikan program di masa mendatang.

Program desaku menanti merupakan program terobosan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif



dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dan merupakan program yang diturunkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan (Pasalong, 2008:7) yang menjelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan publik dikoordinasi untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik yang ditentukan.

Tujuan dari program desaku menanti yaitu mengembaikan gelandangan dan pengemis dari daerah kota ke daerah asal melalui rehabilitasi sosial secara terpadu, sehingga mereka mandiri dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Indradi (2010:120-122) yang mengatakan tujuan administrasi publik adalah meningkatkan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam suatu negara atau daerah. Motif dari seluruh proses kegiatan dari administrasi publik adalah pemberian pelayanan (service) yang seluas-luasnya dan sebaik-baiknya pada seluruh masyarakat. Sifat pelayanan yang diberikan administrasi publik yaitu memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga masyarakat. Sumber kekuasaan administrasi publik yaitu administrasi publik memperoleh kekuasaan dari rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam menjalankan kegiatannya. Artinya, rakyat yang berdaulat.

Program “Desaku Menanti” merupakan upaya rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kosasih (2012:7) yang menyatakan bahwa rehabilitasi sosial merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan, peningkatan, penyembuhan, pemakaian, serta pemulihan kemampuan bagi individu-individu yang membutuhkan layanan khusus. Menurut pendapat Kosasih (2012:10) juga menyimpulkan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi bagi individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar.

b. Tahap-tahap Pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Desaku Menanti

Pada masa kini, pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan pada masa kini, terutama bagi kelompok orang yang berkekurangan baik dalam hal ekonomi maupun hal lain. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan dalam mencapai kemandirian berkesinambungan. Namun, dalam upaya menciptakan kemandirian berkesinambungan perlu dilakukan motivasi secara terus menerus, pemeliharaan semangat, pengembangan potensi agar tidak adanya kemunduran. Adapun tahap-tahap pemberdayaan masyarakat seperti diungkap oleh Sulistiyani (2004: 83), adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/actor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku pada program Desaku Menanti terdapat pada proses penjangkauan gelandangan dan pengemis, serta bimbingan fisik, sosial, dan mental. Pada tahap

penyadaran dan pembentukan perilaku, penjangkauan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui sosialisasi tentang apa itu program Desaku Menanti serta tujuan dari program Desaku Menanti itu sendiri. Sosialisasi diarahkan dalam membuka kesadaran gelandangan dan pengemis tentang kondisi saat ini dan bagaimana program Desaku Menanti bias menjadi salah satu upaya pelesaian masalah yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan, pada tahap ini pihak pemberdaya/actor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk mensiptakan masa depan yang lebih baik. Proses penjangkauan dan pemulangan gelandangan dan pegemis di Kota Malang, Kementerian Sosisal berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan LKS Mutiara Insani dalam menentukan keluarga yang menjadi sasaran program Desaku Menanti. Penjangkauan gelandangan dan pengemis dilakukan pada bulan Agustus-Desember 2015, tercatat sekitar 40 KK yang terdiri dari 180 jiwa menjadi warga binaan social desaku menanti. Penjangkauan dan sosialisasi program dilakukan di beberapa daerah kumuh yaitu

kecamatan sukun, bantaran sungai muharto, pasar gadang, dan beberapa tempat yang tersebar lainnya. Pada tahap ini, selain sosialisai yang dilakukan, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan juga LKS Mutiara Insani melakukan verifikasi, pengolahan data, dan seleksi terhadap calon warga binaan social Desaku Menanti.

Upaya pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku yang dilakukan melalui program Desaku Menanti yaitu bimbingan fisik, mental, dan sosial. Para gelandangan dan pengemis yang lolos seleksi dan persyaratan diberikan bimbingan fisik, mental, dan social. Bimbingan fisik diarahkan pada tuntunan untuk pengenalan dan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin, agar kondisi badan/fisik dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik pada program desaku menanti dilakukan dengan pengecekan kesehatan gratis, sosialisai pola hidup bersih, pembangunan sarana toilet umum. Bimbingan mental diarahkan pada tuntunan untuk memahami diri sendiri dan orang lain, dengan belajar tentang keagamaan, cara berpikir positif dan keinginan untuk berperestasi. Bimbingan sosial dilakukan dengan memberikan motivasi yang diberikan oleh ahli dalam bidang psikologi, sosialisai keagamaan, serta didukung oleh pembangunan sarana musholla. Bimbingan sosial diarahkan pada tantangan kerukunan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Bimbingan sosial yang

dilakukan dengan memberikan pendampingan yang dilakukan setiap harinya oleh pekerja social Dinas Sosial Kota Malang. Sesai dengan teori pemberdayaan pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, upaya bimbingan fisik, mental, dan social yang dilakukan bertujuan untuk memberikan sentuhan akan rasa yang akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebagkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang

rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap transformasi pada program Desaku Menanti sesuai dengan hasil data yang diperoleh menunjukkan terjadi pada upaya bimbingan keterampilan dan pemberian jaminan hidup. Para gelandangan dan pengemis yang telah menjadi warga binaan social Desaku Menanti kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya di Rumah Kerja Desaku Menanti (RDKM). Bimbingan keterampilan diberikan apabila tahap penyadaran dan pembentukan perilaku telah dilakukan dan gelandangan dan pengemis sudah memiliki motivasi dalam meningkatkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bimbingan keterampilan yang telah diberikan warga binaan sosial Desaku Meenanti yaitu pelatihan makanan ringan, pelatihan pembuatan bros, pelatihan salon, dan lain sebagainya. Bimbingan keterampilan ini diharapkan dapat digunakan warga binaan sosial untuk membuka lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Upaya yang dilakukan sesuai dengan pernyataan teori pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas bahwa pada tahap ini masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.

Tahap transformasi pada program desaku menanti juga terlihat dalam pemberian Jaminan Hidup (JaDup). Sementara gelandangan dan



pengemis mengikuti layanan yang ada, otomatis mereka tidak bekerja (menggelandang dan mengemis). Sebagai konsekuensinya mereka akan mendapatkan jaminan hidup yang diberikan berupa dana sebesar Rp 25.000,- per individu dan diberikan kepada maksimal empat anggota keluarga. Jaminan hidup akan dihentikan ketika para penerima manfaat diperkirakan sudah hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam bentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan pada program Desaku Menanti terdapat pada pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan pengembangan

aksesibilitas. Melalui bantuan UEP, penerima manfaat diberikan modal untuk usaha dan setelah mengikuti pelatihan keterampilan melalui 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM)/ Balai Latihan Kerja/Panti yang ada di Dinas Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota. Bantuan ini merupakan bantuan stimulant usaha ekonomi produktif (UEP) yang jenis bantuannya disesuaikan dengan minat, bakat, dan pangsa pasar di daerah setempat. Bagi mereka yang telah menandatangani bantuan modal usaha juga harus menandatangani surat perjanjian tidak menggelandang atau mengemis lagi. Dana bantuan UEP sudah dianggarkan dan berasal dari Dana Hibah dalam Negeri dan diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- per Kartu Keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat program. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang dilakukan, warga binaan social Desaku Menanti belum mampu mengelola dan memanfaatkan modal yang diberikan. Masih adanya warga binaan social Desaku Menanti yang modalnya habis tanpa membuka usaha atau memanfaatkannya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori pemberdayaan pada tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan yang menyatakan pada tahap transformasi, kemandirian masyarakat tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam bentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Pada kondisi ini,

belum adanya inisiatif, maupun inovasi yang dilakukan warga binaan sosial Desaku Menanti dalam mencapai kemandirian.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan pada program Desaku Menanti terlihat pada upaya pengembangan aksesibilitas. Terbatasnya kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki gelandangan dan pengemis sangat berdampak pada ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui pengelolaan aktifitas sosial ekonomi. Para penerima manfaat perlu difasilitasi agar mereka dapat menjangkau berbagai sistem sumber yang tersedia. Pengembangan aksesibilitas dilakukan dengan upaya memasarkan hasil produk olahan RKDM, dan menjadikan Desaku Menanti sebagai Desa Wisata Kampung Topeng. Dinas sosial membantu memasarkan produk hasil olahan RKDM dengan menjangkau pasar diantaranya: BPJS, gudang indomaret, gor ken arok, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, ditemukan bahwa warga binaan sosial belum mampu memasarkan hasil produk olahan yang dihasilkan, sehingga Dinas Sosial menjadi aktor yang membantu langsung keterbatasan aksesibilitas yang dihadapi dengan memasarkan hasil olahan RKDM.

Upaya lain yang juga dilakukan yaitu menjadikan Desaku Menanti sebagai Desa Wisata Kampung Topeng. Upaya menjadikan Desaku Menanti sebagai desa wisata Kampung Topeng didasarkan

oleh hambatan yang dihadapi dalam pengembangan aksesibilitas. Desaku Menanti diberikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang sebagai desa wisata. Beberapa yang telah dibangun dalam mewujudkan Kmapung Topeng yaitu pembangunan wahana *flying fox*, fasilitas tempat untuk *spot* foto, pembangunan *icon* topeng malang sebagai *icon* Desaku Menanti. Namun, upaya menjadikan Desaku Menanti sebagai desa wisata mengalami hambatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan pada hasil data, penurunan pengunjung yang terjadi menjadi hambatan yang dialami. Pada bulan Maret-Mei tahun 2017, pengunjung kampung topeng terbilang ramai dengan pengunjung yang dapat ditotal sekitar 50-200. Namun pada saat ini, penjualan tiket yang terjual hanya mencapai 10-20 tiket. Hal tersebut menunjukkan, upaya menjadikan Desaku Menanti sebagai desa wisata Kampung Topeng mengalami hambatan begitupun dengan pengembangan aksesibilitas warga binaan sosial Desaku Menanti.

Jadi, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program Desaku Menanti memiliki beberapa tahapan dalam mewujudkan kemandirian warga binaan sosial Desaku Menanti itu sendiri. Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku pada program Desaku Menanti terdapat pada proses penjangkauan gelandangan dan

pengemis, serta bimbingan fisik, sosial, dan mental. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Tahap transformasi pada program Desaku Menanti sesuai dengan hasil data yang diperoleh menunjukkan terjadi pada upaya bimbingan keterampilan dan pemberian jaminan hidup. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian masyarakat dalam bentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan pada program Desaku Menanti diupayakan melalui pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan upaya advokasi sosial serta pengembangan aksesibilitas.

Pemberdayaan melalui program Desaku Menanti dapat disimpulkan sudah mencapai tahap penyadaran dan tahap transformasi, namun belum mencapai tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan. Hal tersebut dibuktikan dengan belum mampunya warga binaan sosial dalam memanfaatkan dan mengelola bantuan UEP serta pengembangan aksesibilitas yang menjadi masalah dalam mewujudkan kemandirian warga binaan sosial Desaku Menanti.

### c. Para Pelaku Pemberdayaan Program Desaku Menanti

Pemberdayaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, namun juga membutuhkan stakeholder lain dalam menjalankan fungsi dan perannya. Pemberdayaan melalui program desaku menanti dilakukan oleh beberapa aktor yang terlibat. Aktor-aktor dalam pemberdayaan merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan program desaku menanti. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Sulistiyani 2004: 93-94) yang mengatakan dalam rangka menciptakan good governance di suatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Pemberdayaan melalui program Desaku Menanti dijalankan atas campur tangan dari aktor-aktor tertentu yang bertanggung jawab dalam fungsi dan perannya masing-masing. Aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan melalui program Desaku Menanti meliputi:

#### 1) Dinas Sosial

Dinas Sosial melakukan perannya sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Desaku Menanti. Dinas Sosial merupakan pihak yang melakukan manajemen baik dari segi finansial, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi.

## 2) LKS Mutiara Insani

LKS Mutiara Insani sebagai lembaga kesejahteraan sosial yang menerima dana dan mengeksekusi program Desaku Menanti. LKS Mutiara Insani juga melakukan peran aktif dalam proses pemberdayaan berlangsung, hal tersebut dikarenakan LKS Mutiara Insani secara resmi merupakan LKS yang dipercaya baik Dinas Sosial maupun Kementrian Sosial dalam membantu pemberdayaan gelandangan dan pengemis.

## 3) Instansi Pemerintah Pusat

Instansi Pemerintah Pusat memiliki peran besar sebagai donatur baik secara finansial maupun fasilitas yang dibutuhkan Desaku Menanti. karna berdasarkan penelitian yang dilakukan, fasilitas yang mendukung Desaku Menanti untuk menjadi desa wisata Kampung Topeng masih terbilang sangat sedikit. Instansi Pemerintah Pusat melakukan perannya untuk memberikan fasilitas, dan juga kegiatan peningkatan kemampuan intelektual. Instansi Pemerintah Pusat yang dimaksud disini adalah Kementerian Pendidikan, dan Bank Indonesia. Bantuan fasilitas yang diberikan diantaranya adalah PAUD Desaku



Menanti, dan juga seminar tentang manajemen keuangan serta pemasaran produk hasil Desaku Menanti.

#### 4) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi melakukan perannya sebagai salah satu sektor yang ikut berperan aktif dalam proses pelaksanaan pemberdayaan. Upaya-upaya yang senantiasa dilakukan oleh perguruan tinggi yaitu dengan ikut serta membantu mengembangkan usaha seperti memberikan fasilitas ternak lele, menjadikan Desaku Menanti sebagai tempat KKN, serta dan menjadikan Desaku Menanti sebagai objek kajian untuk ikut serta mengevaluasi program yang dilaksanakan.

#### 5) Swasta

Sektor swasta aktif melakukan perannya sebagai donatur dalam proses pemberdayaan yaitu dengan memberikan fasilitas yang mendukung juga memberikan bimbingan pengetahuan bagi para warga binaan sosial Desaku Menanti. sektor swasta juga menjadi target pasar dan ikut serta membantu untuk memasarkan produk hasil warga binaan sosial Desaku Menanti. Hal itu sangat penting dilakukan untuk keberhasilan kemandirian program Desaku Menanti.

Masing-masing aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti memiliki fungsi, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, dalam proses

pemberdayaan melalui program Desaku Menanti dibutuhkan kerjasama yang selaras dan seimbang untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan. setiap aktor telah melakukan peran dan fungsinya dengan baik. Hingga saat ini, bantuan dan kerjasama dengan *stakeholder* yang terlibat terus diupayakan dan dilaksanakan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang maksimal hingga mencapai kemandirian warga binaan sosial desaku menanti.

## **2. Faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program desaku menanti**

### **a. Faktor Penghambat**

Pada proses pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal ini PMKS jenis gelandangan dan pengemis tidak jarang memiliki beberapa masalah yang menjadi penghambat proses pemberdayaan yang dilakukan. Hal tersebut pun terjadi pada proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti. berdasarkan hasil data yang diperoleh dan dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, terdapat 3 faktor utama yang menjadi penghambat dari proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti, diantaranya:

- 1) Merubah Mindset, Mental, dan Sikap Warga Binaan Sosial Desaku Menanti

Merubah mindset, mental, dan sikap gelandangan dan pengemis bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu serta proses yang berkelanjutan. Para gelandangan dan penngemis yang menggantungkan hidupnya dijalan dan meminta-minta pada dasarnya disebabkan oleh permasalahan yang disebabkan oleh kemiskinan, kualitas pendidikan, lapangan pekerjaan, sosial dan budaya. Sehingga dalam menciptakan semangat, motivasi, perubahan sikap, dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup PMKS gelandangan dan pengemis membutuhkan pembinaan dan sosialisasi.

## 2) Upaya Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas

Proses pemberdayaan yang dilakukan tidak saja memberikan bimbingan serta modal untuk membuka usaha sebagai lapangan pekerjaan, namun juga bagaimana memasarkan produk yang dihasilkan. Memberikan pengetahuan tentang manajemen penghasilan, dan pemasaran menjadi hal yang penting dalam upaya menciptakan kemandirian. Namun, tingkat pendidikan dan pengetahuan gelandangan dan pengemis yang terbilang relatif rendah sehingga menjadi kendala selama proses pemberdayaan. Dinas Sosial dan stakeholder yang terlibat sudah berupaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas bagi para warga binaan sosial. Upaya tersebut harus terus dilakukan, karena tanpa adanya daya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas wirausaha yang terlaksana maka kemandirian akan sulit untuk dicapai.

### 3) Lokasi Program Desaku Menanti

Faktor penghambat selanjutnya adalah lokasi kampung desaku menanti yang juga merupakan kampung wisata topeng jauh dari pusat kota. Lokasi program desaku menanti berada di Kampung kesetiakawanan Sosial Margo Mulyo Dusun Baran Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Lokasi tersebut berbatasan dengan kabupaten malang dan terbilang cukup jauh dari pusat kota malang itu sendiri. hal tersebut menjadi hambatan untung aksesibilitas para warga binaan sosial desaku menanti, terutama dalam bekerja seperti berjualan, wisata desaku menanti itu sendiri, maupun hal lainnya. Namun lokasi program desaku menanti yang terbilang jauh juga dikarnakan agar tidak kembalinya para warga binaan sosial menggelandang dan mengemis di jalan-jalan pusat kota.

### 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana di Desaku Menanti

Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dalam mensukseskan upaya peberdayaan sangat penting untuk dilakukan. Salah satu upaya dalam mencapai kemandirian warga binaan sosial yaitu dengan menjadikan Desaku Menanti sebagai Desa Wisata Kampung Topeng. Hal tersebut mengharuskan adanya fasilitas, lokasi, dan suasana yang memadai agar terus dapat mengikat para pengunjung yang datang. Namun sarana seperti rumah WBS, maupun kamar mandi umum masih terbilang tidak terawat. Kemudian fasilitas yang ditawarkan

sebagai Desa Wisata masih perlu dibangun karna fasilitas yang ditawarkan bisa dibilang kurang inovatif.

#### b. Faktor Pendukung

Pada proses pemberdayaan masyarakat dalam hal ini PMKS jenis gelandangan dan pengemis juga memiliki beberapa kekuatan yang menjadi pendukung proses pemberdayaan yang dilakukan. Hal tersebut juga terjadi pada proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, terdapat 2 faktor utama yang menjadi pendukung dari proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti, diantaranya:

##### 1) Dana Program Mencukupi

Anggaran APBN juga digunakan untuk pembiayaan rangkaian tahapan kegiatan program Desaku Menanti dan pemberian bantuan sosial. bantuan sosial yang diberikan melalui APBN adalah bahan baku rumah, jaminan hidup, bimbingan sosial dan ketarampilan, bantuan sosial peralatan rumah tangga, serta biaya operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Dana Hibah Dalam Negeri terdiri dari Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, dan Penambahan biaya kebutuhan hidup warga binaan sosial Desaku Menanti seperti listrik dan sembako. Donatur-donatur yang memberikan bantuan finansial maupun fasilitas juga menjadi pendukung dalam proses pemberdayaan. Donatur yang memberikan bantuan diantaranya Bank

Indonesia, Kemneterian Pendidikan, PLN, dan lain sebagainya. Maka, dana yang dibutuhkan selama ini mencukupi dan adanya pihak-pihak yang terus mengupayakan kelancaran program desaku menanti itu sendiri.

## 2) Kerjasama yang Baik antar *Stakeholders*.

Proses pemberdayaan tidak bisa dilakukan hanya dengan peran pemerintah, melainkan perlu adanya peran-peran stakeholder yang terlibat. Adanya stakeholder lain dalam menjalankan fungsi dan perannya penting untuk keberlangsungan proses pemberdayaan. Kerjasama dan koordinasi tentang apa yang dibutuhkan oleh para warga binaan sosial dan bantuan yang akan diberikan perlu terus dikomunikasikan oleh pemerintah dan *stakeholder* lainnya, juga warga binaan sosial itu sendiri sebagai sasaran Program Desaku Menanti. Sehingga apa yang diupayakan sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian tujuan bisa lebih cepat dan maksimal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan pada penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Sebagai Upaya Rehailitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)” sebagai berikut:

1. Program desaku menanti merupakan program terobosan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis. Program ini tidak hanya menyentuh aspek rehabilitatif saja, tetapi juga memperhatikan aspek preventif, jaminan dan perlindungan sosial, pemberdayaan, Ruang Lingkup pememberdayaan dalam upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan diantaranya:

- a. Penjangkauan dan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis

Penjangkauan dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang pengertian dan tujuan dari program Desaku Menanti, verifikasi, pengolahan data dan seleksi calon warga binaan sosial Desaku Menanti. Proses Penjangkauan menghasilkan calon warga binaan sosial Desaku Menanti sebanyak 40 Kartu Keluarga, 180 Jiwa.



b. Bimbingan Fisik, Mental, dan Sosial

Bimbingan fisik yang dilakukan diantaranya: bimbingan pola hidup bersih, cek kesehatan gratis, penyuluhan pengelolaan sampah. Bimbingan mental yang dilakukan diantaranya: kegiatan keagamaan, bimbingan dari ahli psikologi, penyuluhan dari woman crisis center. Bimbingan sosial yang dilakukan diantaranya: pembinaan dan pendampingan oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial.

c. Bimbingan Keterampilan

Warga binaan sosial Desaku Menanti kemudian mendapatkan pelatihan keterampilan di 'Rumah Kerja Desaku menanti' (RKDM). Bimbingan keterampilan yang dilaksanakan diantaranya: pelatihan pembuatan makanan-makanan ringan seperti telur asin, dan rempeyek, pelatihan pembuatan kue basah, pelatihan jasa kecantikan seperti salon, dan pelatihan pembuatan cenderamata seperti bros, dan lain sebagainya.

d. Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Warga binaan sosial Desaku Menanti diberikan modal untuk usaha dan setelah mengikuti pelatihan keterampilan melalui 'Rumah Kerja Desaku Menanti' (RKDM)/Balai Latihan Kerja. Bantuan UEP bersumber dari Dana Hibah Dalam Negeri berjumlah 5.000.000 per Kartu Keluarga.

e. Jaminan Hidup

Jaminan hidup diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 25.000 untuk maksimal diberikan pada 4 orang dalam setiap Kartu Keluarga yang terdaftar. Jaminan hidup diberikan selama 3 bulan dan akan

dihentikan ketika para penerima manfaat diperkirakan sudah hidup mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

f. Bantuan Stimulan

Program Desaku Menanti Kota Malang membangun dan menyediakan rumah sebanyak 40 beserta fasilitas seperti musholla, wc umum, Rumah Kerja Desaku Menanti bertempat di Desa Kesetiakawanan Margo Mulyo, Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang.

g. Pengembalian Anak-Anak Gelandangan dan Pengemis ke Sekolah

Bantuan pengembalian anak-anak warga binaan sosial Desaku Menanti ke sekolah diberikan dalam bentuk alokasi dana yang tersedia yaitu sebesar 50% dana yang harus dikeluarkan, kemudian advokasi ke lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal, dan fasilitas PAUD di Kampung Topeng Desaku Menanti.

h. Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas

Bentuk-bentuk upaya advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas yang dilakukan yaitu menjadi Desaku Menanti sebagai desa wisata Kampung Topeng, serta memasarkan hasil olahan Rumah Kerja Desaku Menanti ke beberapa tempat baik pemerintah maupun swasta, seperti di kantor BPJS dan gudang indomaret.

2. Program desaku menanti memiliki tahapan dalam proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Sesuai dengan teori menurut Sumodiningrat dalam (Sulistiyani 2004:83) bahwa proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap tersebut meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku dalam program Desaku Menanti yaitu: penjangkauan gelandangan dan pengemis, serta bimbingan fisik, mental dan sosial.
  - b. Tahap transformasi dalam program Desaku Menanti yaitu meliputi bimbingan keterampilan dan jaminan hidup.
  - c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan program Desaku Menanti yaitu pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas.
3. Berbagai aktor yang terlibat dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program desaku menanti di Kota Malang yaitu Dinas Sosial Kota Malang, LKS Mutiara Insani, Instansi Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Swasta.
  4. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Desaku Menanti di Kota Malang. Faktor yang menghambat pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui Program Desaku Menanti, antara lain: 1) Merubah mindset, mental, dan sikap SDM Warga Binaan Sosial Desaku Menanti; 2) Upaya Advokasi Sosial dan Pengembangan Aksesibilitas; 3) Lokasi Program Desaku Menanti; 4) Kurangnya Sarana dan Prasarana. Sedangkan faktor yang mendukung keberhasilan pemberdayaan gelandangan dan pengemis melalui program Desaku Menanti, yaitu: 1) Dana program mencukupi; 2) Kerjasama yang baik antar *stakeholders*.

## B. Saran

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu tentang pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai upaya rehabilitasi sosial melalui program Desaku Menanti di Kota Malang, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembuatan perencanaan kegiatan pemberdayaan setiap tahun. Perencanaan pemberdayaan pada tahun pertama seharusnya difokuskan pada pembentukan karakter, mental dari para warga binaan sosial Desaku Menanti, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan. Kemudian pada tahun berikutnya bisa dilakukan pada tahap pembinaan lanjut dan pendampingan serta pengembangan aksesibilitas para Warga Binaan Sosial Desaku Menanti.
2. Pembuatan indikator keberhasilan setiap tahun. Indikator keberhasilan sebaiknya dibuat lebih terinci setiap satu tahun. Sehingga keberhasilan maupun progres bisa terus dievaluasi, tidak hanya sekali dalam lima tahun. Sehingga setiap tahun kekurangan maupun kelebihan dari program bisa terus diupayakan dan dapat mencapai tujuan dari program Desaku Menanti itu sendiri yaitu kemandirian Warga Binaan Sosial Desaku Menanti.
3. Pembentukan kelompok ataupun pekerja sosial yang terdiri dari beberapa *stakeholder* dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis Desaku Menanti. *Stakeholder* dalam kelompok pekerja sosial pada program Desaku Menanti nantinya dapat terdiri dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial,

LKS Mutiara Insani, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Swasta, Masyarakat.

4. Inovasi kegiatan dalam upaya memberikan bimbingan mental dan sosial, serta advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas. Berdasarkan dari hasil data tentang faktor penghambat pemberdayaan yang dilakukan, SDM serta minimnya aksesibilitas menjadi permasalahan utama. Bimbingan mental dan sosial yang dapat diupayakan yaitu berupa pemberian motivasi, bimbingan agama secara rutin dan dilakukan oleh *stakeholder* yang ahli dibidangnya. Pengembangan aksesibilitas dapat dilakukan dengan kerjasama antara Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, maupun Swasta.
5. Penambahan fasilitas wisata Kampung Topeng. Dinas Sosial dan *stakeholder* harus lebih fokus dalam memberikan bantuan yang dapat mendukung fasilitas dari kampung wisata topeng dan menciptakan kesadaran warga binaan sosial tentang desa wisata Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pembinaan seperti memberikan kesadaran pentingnya budaya dan pelatihan terhadap anak-anak warga binaan sosial seperti tari topeng dan lain sebagainya. Sedangkan sarana dan prasarana yaitu panggung pentas, galeri topeng, pertunjukan atau event rutin, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. "Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 Mencapai 10,64 Persen". Diakses Pada 21 November 2017 dari <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379>
- Dirjen Bina Rehabilitasi Sosial. 2004. *Pedoman Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Depsos RI.
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Irawan, Dimas Dwi. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2010. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasirin, Chairun. 2010. *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Indo Press.

- Pasalong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan Lingkungan.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Masyarakat.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06B/HUK/2010 tentang Penyelenggaraan Pemangungan Kesejahteraan Sosial di 50 Kabupaten Daerah Tertinggal.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soehartono, Irwan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2009. *Metode Peneletian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama

Sulistiyani, T.A. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 H, dan Pasal 34.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

